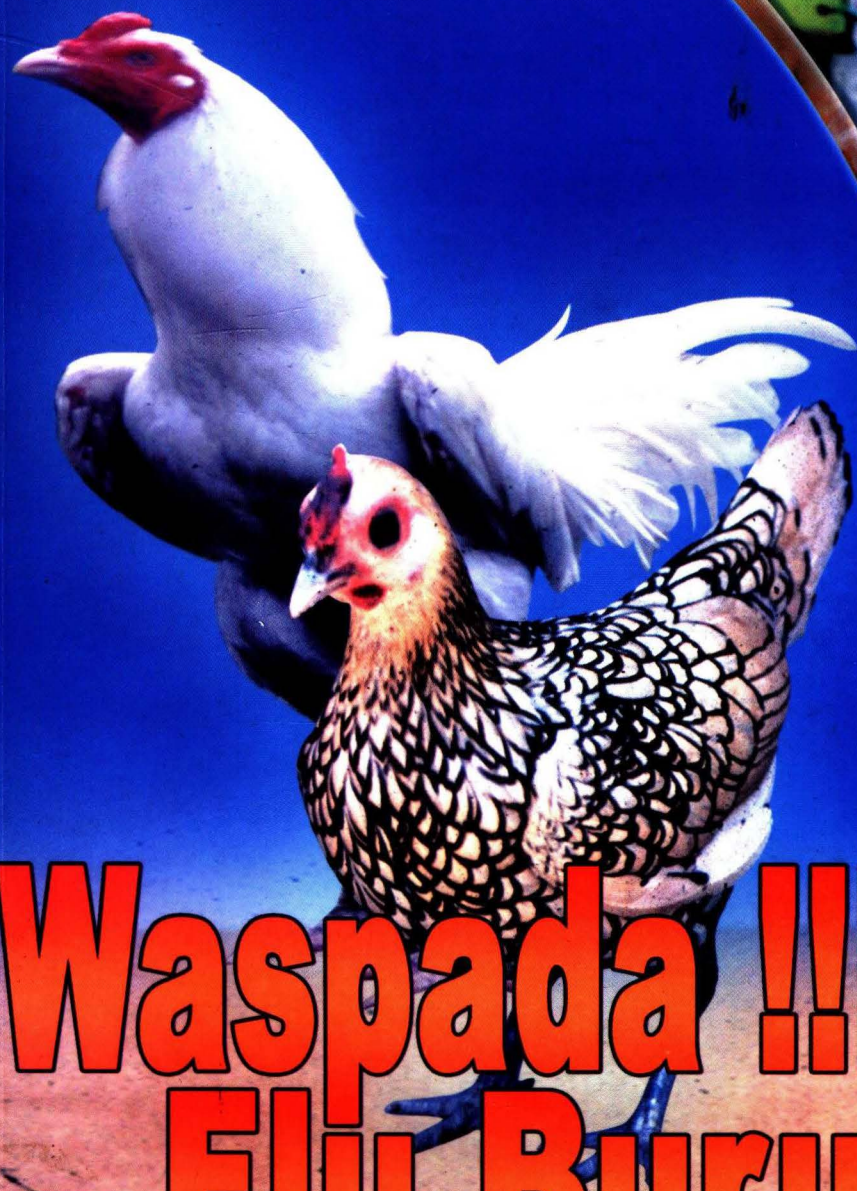




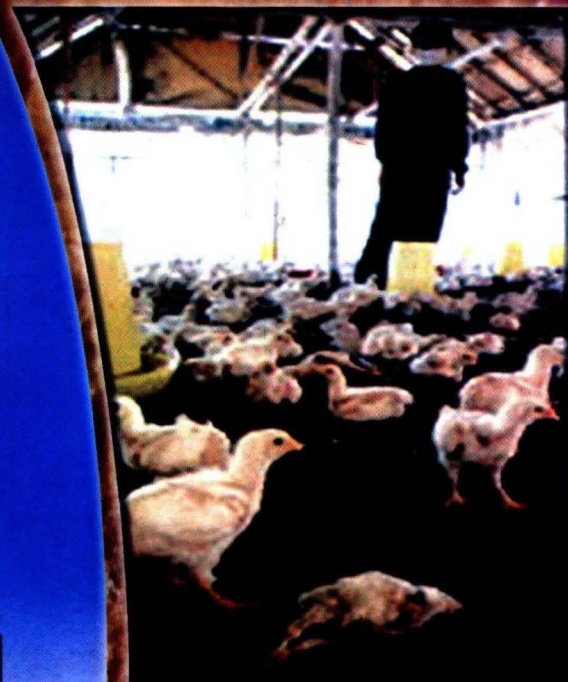
EDISI KHUSUS

Newsletter

Agustus- September 2005



Waspada !!! Flu Burung



Pengarah :

Kepala Biro Hukum dan Humas
Para Sekretaris Unit Eselon I
Lingkup Departemen Pertanian

Penasehat : Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian, Ketua Penyunting : Drs. Dudi Gunadi, MSi, Penyunting Pelaksana : Drs. Edy Mulyono, MM; Anggota Penyunting : Dra. Ria Satiti Irawati, Pembantu Teknis : Muhamad Yamin, Sp; Hery Kurniawan Amd; Imam Santoso, Amd; Distribusi: Rastono; Nara Sumber : Pejabat Kehumasan Eselon I Lingkup Departemen Pertanian; Alamat : Jl. Harsono RM. No. 3 Ragunan, Jakarta 12520
Telp/Fax : (021) 78840923; E-Mail : pemberitaan@deptan.go.id



Newsletter

Biro Hukum dan Humas
Departemen Pertanian

DAFTAR ISI

1. 5,2 Juta Ha Lahan Irigasi Potensial Kekeringan	1	15. Kerusakan Irigasi Pangkas 6,5% Produksi Beras	9
2. Izin Impor Gula Akan Diumumkan Agustus	2	16. Perdagangan Beras Antarpulau Meningkat	10
3. Impor Gula Boleh Setelah Giling	3	17. PHRI Akan Impor 39.00 Ton Brown Rice	10
4. Perbaikan Irigasi di Pantura Butuh Dana US\$ 50 Juta	3	18. Menunggu Realisasi Revitalisasi Pertanian	10
5. Kekeringan Tidak Mempengaruhi Produksi Beras Nasional	3	19. Persediaan Beras Nasional Mencukupi	11
6. Kerugian Peternak Belum Dibayar Pemerintah	4	20. Program Lumbung Pangan Sumsel Butuh Rp 32,6 T	12
7. Dana Ketahanan Pangan Untuk NTB dan NTT	4	21. 80 Persen irigasi Rusak	13
8. Hari Krida Pertanian Ke-33	5	22. Genjot Produksi dan Mutu	13
9. Batas Izin Impor Daging Sapi dari AS Hingga Agustus	5	23. Produk Pertanian Harus Kompetitif	14
10. Pelatihan Petani Gambia di RI Dilanjutkan	6	24. Deptan Ujicoba Desa Mandiri Pangan di 9 Propinsi	15
11. Masalah Pangan Bukan Pada Ketersediaannya	6	25. Deptan Tetap Bertahan	15
12. Dibuka Keran Impor Beras Terbatas, Jika Terpaksa	7	26. RI Tolak Permintaan Impor Beras Thailand	16
13. Kenaikan Harga Beras Masih Wajar ..	8	27. Virus H5N1 Tidak Mematikan	16
14. September, Impor Daging Dari AS Dilarang	8	28. Soropadan Agro Ekspo II-2005 Berhasil Sukses Produk Pertanian Dapat Bersaing di PAsaran Internasional ...	16
		29. Lima Langkah Untuk Pencerahan Revitalisasi Penyuluhan	17
		30. Produk Pertanian Riau Curi Perhatian	17

31. Dana Darurat Atasi Flu Burung Disetujui	18
32. Semua Unggas di Daerah Terjangkit Dimusnahkan	18
33. Pasokan Surplus, Harga Beras Tak Perlu Dikhawatirkan	19
34. Babi di Lokasi yang Ada Virus AI Dimusnahkan	19
35. Industri Teh Hadapi Situasi Tak Kondusif	20
36. Wapres Minta Kompensasi Flu Burung Harus Layak	20
37. Deptan Butuh Anggaran Tambahan Rp 85 M	21
38. Sembilan Strategi Berantas Flu Burung	22
39. Deptan Cairkan Kompensasi	22
40. Pemerintah Segera Larang Impor Daging dari AS	23
41. Pengembangan Sawit di Perbatasan Terbuka Bagi Investor	23
42. 2009, PDB Sektor Pertanian Rp 226 Triliun	24
43. Tangerang Daerah Merah Flu Burung	24
44. Pemerintah Belum Keluarkan Kebijakan Isolasi Ternak	25
45. Dana Penjamin Syariah Deptan Ditolak DPR	25
46. Hama Wereng Serang Jabar dan Jateng	26
47. Indonesia Bisa Bebas Tahun 2007	26
48. Juli, Industri Ayam Rugi Rp 7 Miliar	27
49. Deptan Segera Batasi Impor Buah	27
50. Daya Saing Jamur Indonesia Turun	28
51. Pemusnahan 24 Kontainer Gagal	28

52. RI Pasok 0,9% Kebutuhan Jamur Dunia	29
53. Daging Ilegal Segera Dimusnahkan	29
54. Arah Pangan 2025, Fortifikasi Beras	29
55. Mentan Pertanyakan Izin 12 PG Rafinasi	30
56. Goodyear Jual Kebun Karet Ke Bridgestone	30
57. Mentan dan Gubernur Kampanye Makan Ayam	31
58. Target Swasembada Gula Mundur	31
59. Hama Wereng Menyerang	31
60. Produktivitas Benih Padi tak Cukupi Kebutuhan 2025	32
61. Serangan Hama Padi Meningkat	33
62. Deptan Setuju Koptan Salurkan Pupuk	33
63. Indonesia Bebas Flu Burung 2007	34
64. Pelaksanaan Sumpah PNS Lingkup Barantan	34
65. Workshop dan Pelantikan PPNS Lingkup Barantan	35
66. Masalah Pangan Bukan Pada Ketersediaannya	35
67. Apresiasi Keortalaan	36
68. Peluncuran Virgin Coconut Oil dan Puree Buah oleh Mentan	37
69. Peringatan Hari Krida Pertanian Ke XXXIII	37
70. Eksistensi Pengkajian Teknologi Pertanian di Irian Jaya Barat	38

71. Peningkatan Kinerja Melalui Penyediaan Teknologi Tanaman Pangan	38	94. Indonesia Swasembada Jagung 2007	49
72. Satu Abad Lembaga Penelitian Tanah Indonesia	39	95. OP Dilaksanakan Jika Harga Beras Diatas Rp 3.500/Kg	50
73. Pelantikan Direktur Puslit Karet dan Puslit Kopi dan Kakao	39	96. Deptan Rekrut 40 Ribu Penyuluh Pertanian	50
74. Varietas Unggul Kakao Baru	40	97. Deptan Siapkan RUU Penyuluhan Pertanian	51
75. Swasembada Gula Tertunda	40	98. Teknologi Kabi, Peluang Genjot Produksi	51
76. Gula Rafinasi Agar Masuk Daftar Negatif Investasi	41	99. Dewan Minyak Sawit dan Kakako Perlu Dibentuk	52
77. Harga Gabah Akan Dinaikkan	41	100. Penjaminan Harga Komoditas Strategis Diperluas	53
78. Paha Ayam AS Serbu Pasar	42	101. Mentan: Impor Gula Belum Perlu	53
79. Perlu Jalin Aliansi Strategis dengan Cina	42	102. Varietas Unggul Kakao Baru	53
80. Indonesia Akan Impor Gula 2006	43	103. Pembukaan Pelatihan Polsus Badan Karantina Pertanian di SPN Lido	54
81. Konversi Hutan Untuk Kebun Sawit .	44	104. Apresiasi Keortalaan	54
82. Penyuluh Honor Masa Kerja 10 Tahun diangkat Tanpa Testing	44	105. Peningkatan Kinerja Melalui Penyediaan Teknologi Tanaman Pangan	55
83. Harga Beras Lampaui Batas Psikologis	44	106. Eksistensi Pengkajian Teknologi Pertanian di Irian Jaya Barat	56
84. Hati-Hati Konversi Hutan Jadi Lahan Sawit	45	107. Satu Abad Lembaga Penelitian Tanah Indonesia	56
85. Kurang 44.000 Penyuluh Tani	45	108. Pelantikan Pengurus Koperasi Waikatera Badan Karantina Pertanian	57
86. 100 Kabupaten Rawan Pangan	46	109. Peluncuran Buku Food Insecurity ATLAS (FIA) INDONESIA	57
87. Subsidi Pupuk Tahun Depan 6 Juta Ton	46	110. Pelantikan Direktur Puslit Karet dan Puslit Kopi dan Kakao	58
88. Swasembada Gula Pada 2009	47	111. Peluncuran Virgin Coconut Oil dan Puree Buah oleh Mentan	58
89. Indonesia Pacu Produksi CPO	47		
90. Deptan Dorong Ekspor Kakao Olahan .	48		
91. Kemitraan Tembakau Tak Perlu Perangkat Hukum	48		
92. Dana Subsidi BBM Untuk Kembangkan Biodisel	48		
93. Impor Beras Wangi PHRI Ditolak	49		

112. Perketat Impor Unggas	59	131. Anggaran Penanganan Flu Burung	
113. Orientasi Pembangunan Pertanian		Mandek	69
Perlu Diubah	59	132. Impor Beras Tertutup	69
114. Tujuh Komoditas Prioritas Agroindustri	60	133. Rencana Impor Beras Langkah	
115. Mentan : Kurangi Konsumsi		Antisipasi	70
Pupuk Kimia	60	134. Perlu Rp 100 M Basmi Virus	
116. Mentan : Beras Impor Jangan		Flu Burung	70
Rusak Pasar	61	135. Cukup Besar, Dampak Flu Burung	
117. Deptan Bentuk Tim Riset Flu Burung	61	Terhadap Perekonomian Indonesia	71
118. Pemanfaatan Teknologi Pertanian		136. Direktur Kesehatan Hewan Diganti	71
Belum Maksimal	62	137. Buah Tak Layak Konsumsi Masuk RI	72
119. Oktober Harga Gabah Naik	62	138. Impor Buah Akan Diperketat	72
120. Kepala Balai Karantina Tumbuhan		139. Presiden : Flu Burung Jangan	
Jayapura Menerima Penghargaan ..	63	Dilihat Berlebihan	73
121. International Flora Show 2005	63	140. Serah Terima Jabatan Eselon II	
122. Seminar Nasional Implementasi		Lingkup Badan Karantina Pertanian	73
Cites Di Indoensia	64	141. Workshop Operasional Notification	
123. Pertemuan CORRA dan BOT IRRI,		Body Enquiry Point SPS-WTO	74
Konferensi Padi Internasional, dan		142. Pertemuan Komisi Nasional	
Ekspose Inovasi Teknologi Padi	65	Karantina Hewan (KNKH)	75
124. Dewan Ketahanan Pangan		143. DPR Setuju Harga Gabah Petani	
Harus Dilibatkan	65	Naik	76
125. Swasembada Pangan Perlu		144. Pemerintah Akan naikkan Harga	
Rp 53,4 Triliun	66	Beli gabah	76
126. Deptan Perluas Areal dan		145. Simpan Saja Beras Impor Di LN	76
Produktivitas Padi	66	146. Mentan Putuskan Harga Pupuk Tetap	77
127. Sebagian Besar PG Tidak Efisien ..	67		
128. Mentan Harus Cepat Ajukan			
Kenaikan HPP Gabah	67		
129. Peternakan Ayam Terbebas Flu Burung	68		
130. Deptan Tawarkan Sawah Sejuta			
Hektare di Merauke	68		



Newsletter

Biro Hukum dan Humas
Departemen Pertanian

Nomor: 119/NL/07-09/2005

Juli-September 2005

ISI :

- 5,2 JUTA HA LAHAN IIRIGASI POTENSIAL KEKERINGAN
- IZIN IMPOR GULA AKAN DIUMUMKAN AGUSTUS
- IMPOR GULA BOLEH SETENGAH GILING
- PERBAIKAN IIRIGASI DI PANTURA BUTUH DANA USS 50 JUTA
- KEKERINGAN TIDAK MEMPENGARUHI PRODUKSI BERAS NASIONAL
- KERUGIAN PETERNAK BELUM DIBAYAR PEMERINTAH
- DANA KETAHANAN PANGAN UNTUK NTB DAN NTT
- HARI KRIDA PERTANIAN KE -33
- BATAS IZIN IMPOR DAGING ASAL AS HINGGA AGUSTUS
- PELATIHAN PETANI GAMBIA DI RI DILANJUTKAN
- MASALAH PANGAN BUKAN PADA KETERSEDIAANNYA
- DIBUKA KERAN IMPOR BERAS TERBATAS, JIKA TERPAKSA

FOKUS MINGGU INI :

1 5,2 Juta Ha Lahan Irigasi Potensial Kekeringan

Departemen Pertanian memperkirakan pada musim kemarau 2005, seluas 5,2 juta ha lahan pertanian irigasi permukaan tanah potensial mengalami kekeringan. Menurut Dirjen Pengolahan Lahan dan Air (PLA) Deptan, Hilman Manan, menyatakan wilayah rawan kekeringan pada lahan irigasi teknis tersebut terbesar terjadi di pantai utara (Pantura) Pula Jawa.

Kondisi lingkungan di pulau Jawa saat ini, tambahnnya, banyak hutan yang sudah rusak, saluran irigasi umumnya pendek dan sempit, catchment area atau wilayah resapan yang berkurang serta penduduk yang padat. Karena itu, pihaknya merencanakan memperbaiki saluran irigasi permukaan tanah, khususnya di wilayah Pantura Jawa dengan bantuan dana dari Bank Pembangunan Islam (IDB) sebesar 50 juta dolar AS.

Menurut Hilman, saat ini selain lahan, pertanian irigasi permukaan juga terdapat areal irigasi dari waduk seluas 780 ribu ha sedangkan total areal pertanian irigasi di tanah air mencapai 6,7 ha. Menyinggung antisipasi musim kering, Hilman menyatakan pemerintah



meminta petani untuk mengganti padi dengan tanaman palawija pada musim gadu II yang jatuh mulai September-Oktober mendatang karena tanaman tersebut lebih tahan kering.

Menurutnya, petani pada umumnya tetap memilih menanam padi dengan alasan lebih mudah karena sudah terbiasa dan lebih mudah karena sudah terbiasa dan lebih murah biaya produksinya dibanding mengembangkan palawija.

Sementara Menteri Pertanian Anton Apriyantono menyatakan pada 2005 pemerintah merencanakan untuk melakukan impor gula guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. "Kita akan melakukan rapat dengan Menteri Perdagangan setelah dia pulang dari luar negeri," ujarnya.

Tambahnya, masuknya gula impor tersebut harus setelah musim giling sehingga tidak merugikan petani gula dalam negeri karena harga produksi mereka bisa terpuruk jika masuknya komoditas tersebut pada musim giling.

Menyinggung volume impor gula pada 2005, menurut Mentan, hal itu tergantung kebutuhan dalam negeri yang saat ini diprediksikan mencapai 2,3 juta ton. Sementara itu, mengenai larangan impor beras yang sudah akan berakhir pada Juli 2005, dia menyatakan perpanjangan ketentuan tersebut tinggal menunggu keputusan Menteri Perdagangan.

Namun, Anton menyatakan sejak awal Deptan sejak telah memprediksi tidak perlu dilakukan impor karena dengan produksi 53 juta ton GKG cukup untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri selama satu tahun. "Kebijakan larangan impor beras kemungkinan akan diperpanjang."

[2] Izin Impor Gula Akan Diumumkan Agustus

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan pengumuman izin impor gula putih akan dipercepat paling lambat Agustus 2005 karena harga gula di laur negeri mulai merangkak naik.

Mentan mengatakan target produksi gula tahun ini diprediksi sebanyak 2,2 juta ton. Sedangkan soal waktunya, tetap mengacu pada kebijakan impor sebelumnya. "impor tidak boleh dilakukan pada saat menjelang musim giling dan saat musim giling," ujarnya.

Kebijakan yang diberlakukan sekarang yang pada dasarnya cukup memadai untuk memotivasi pelaku usaha meningkatkan daya saing produk endaknya tetap dilanjutkan sampai terwujudnya kemandirian dan swasembada gula.

Artinya, kebijakan seperti pembatasan impor gula, harga dasar penyanggaan produk petani, subsidi pupuk, tersedianya modal kerja berupa kredit program, dan bantuan langsung kepada petani yang bersedia melakukan rehabilitasi tanaman (bongkar ratoon) hendaknya tetap dilanjutkan sampai swasembada gula benar-benar mantap.

Diluar kebijakan tersebut, menurut dia, pembangunan pabrik gula (PG) baru di luar Jawa harus segera direalisasi sebagai antisipasi meningkatnya kebutuhan gula di masa mendatang dan sangat sulit dipenuhi dari optimalisasi pemanfaatan existing assets yang ada sekarang. "Yang juga tidak kalah pentingnya adalah adanya kebijakan tata ruang kawasan budidaya pertanian yang dapat dilaksanakan secara taat azas, bukan hanya untuk PG di laur Jawa yang menggunakan lahan sendiri, tetapi juga PG berbasis tebu rakyat di Jawa.

3 *Impor Gula Boleh Setelah Giling*

Menteri Pertanian Anton Apriyantono menegaskan impor gula hanya akan diijinkan masuk ke tanah air setelah musim giling atau sekitar bulan Desember. Mentan menyatakan pada 2005 pemerintah merencanakan untuk melakukan impor gula guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Mengenai ijin pelaksanaan impor dan waktu masuknya gula impor tersebut, Anton menyatakan pembahasannya akan dipercepat pada Agustus sehingga nantinya importir bisa mempersiapkan untuk masuk setelah musim giling. Namun, tambahanya masuknya gula impor tersebut harus setelah musim giling tidak merugikan petani gula dalam negeri karena harga produksi mereka bisa terpuruk jika masuknya komoditas tersebut pada musim giling. Menyinggung volume impor gula pada 2005, menurut Mentan, hal itu tergantung kebutuhan dalam negeri yang saat ini diprediksikan mencapai 2,3 juta ton.

4 *Perbaikan Irigasi di Pantura Butuh Dana US\$ 50 Juta*

Perbaikan jaringan irigasi disepanjang Pantura di perkiraan menelan dan sebesar US\$ 50 juta. Untuk keperluan itu, Deptan mengajukan pinjaman ke Bank Pembangunan Islam.

Menurut Dirjen Pengolahan Lahan dan Air Deptan Hilman Manan, perbaikan jaringan irigasi di Pantura

diharapkan bisa mengatasi kebutuhan air selama musim kemarau.

Hilman menyebutkan rencananya dana tersebut akan dipergunakan untuk mengembangkan sumur resapan, pompa air tanah dan waduk lapangan.

Menurut Hilman, pembangunan dan perbaikan irigasi di Pantura sangat dibutuhkan untuk mendukung pertanian di pulau Jawa. Sebab, kondisi lingkungan di pulau Jawa kualitasnya sudah menurun.

Kerusakan tersebut karena disebabkan menurunnya daerah tangkapan air akibat pengundulan hutan. Kondisi saluran yang ada di Pantura umumnya pendek dan sempit. Juga masih ditambah tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

Hilman berharap kami tidak berspekulasi dalam menanam komoditas pertanian. Sebab, di Indonesia petani umumnya tetap memilih menanam padi karena sudah terbiasa dan lebih murah biaya produksinya dibanding mengembangkan tanaman palawija. "Para petani umumnya juga suka berspekulasi bahwa tanamannya akan mendapat hujan meski pada musim kemarau sehingga mereka tetap menanam padi, ujarnya.

5 *Kekeringan Tidak Mempengaruhi Produksi Beras Nasional*

Kekeringan yang melanda daerah di Indonesia dinilai tidak akan mengganggu produksi padi nasional secara signifikan. Sehingga, rencana pemerintah untuk memperpanjang larangan impor beras hingga akhir 2005 tetap berlaku.

Menurut Mentan, meskipun saat ini musibah kekeringan sudah melanda kekeringan disejumlah daerah, namun kondisinya dinilai tidak lebih buruk dari tahun lalu, sehingga diharapkan tidak mengganggu produksi padi secara nasional.

"Namun demikian kita telah memberikan bantuan pada petani dalam bentuk penggantian bibit padi yang rusak sehingga dapat ditanam saat musim hujan tiba," ujar Mentan.

Langkah Deptan lain dalam rangka mencegah agar petani tidak rugi saat musim kemarau, ujar Mentan, dengan memberikan informasi kepada petani agar tidak menanam padi di daerah kering dan menundanya hingga musim tanam berikutnya.

Mentan juga menegaskan, walaupun saat ini di beberapa daerah telah mengalami kekeringan, pihaknya tetap mengusulkan agar sampai akhir 2005 impor beras di larang seperti pada tahun sebelumnya.

Lebih jauh Mentan mengatakan bahwa Indonesia tahun ini bisa kembali swasembada beras sehingga seluruh kebutuhan masyarakat mampu dipenuhi dari dalam negeri dan tidak perlu impor.

Oleh karena itu, Deptan merencanakan untuk memperbaiki saluran irigasi permukaan tanah khususnya di wilayah Pantura Jawa dengan bantuan dana dari Bank Pembangunan Islam sebesar US\$ 50 juta

6 Kerugian Peternak Belum Dibayar Pemerintah

Menteri Pertanian Anton Apriyantono, menyatakan pencairan dana kompensasi bagi peternak unggas yang menderita kerugian akibat penyakit flu burung tahun 2005 belum bisa dilaksanakan.

"Pencairan dana kompensasi yang diambil dana tanggapan darurat tersebut terkendala mekanisme atau pengeluarannya. Realisasi kompensasi flu burung masih terkendala, mekanisme pengeluaran dana tanggap darurat. Secepatnya akan diberi kompensasi," ujar Mentan.

Kondisi tersebut, tambahnya, mengakibatkan PH Direktorat Jenderal Peternakan tidak berani mengambil keputusan karena berdasarkan aturan ganti rugi tidak diperbolehkan dalam bentuk uang namun dalam bentuk DOC atau ayam dewasa.

"Karena itu Sekjen Deptan dan Dirjen Peternakan harus hati-hati dalam mengeluarkan uang tersebut. Nanti bisa dilaporkan BPK," ujarnya. Menurut Anton, tidak semua unggas yang mati akibat flu burung mendapat ganti rugi dari pemerintah.

7 Dana Ketahanan Pangan Untuk NTB dan NTT

Deptan mengalokasikan anggaran tahun 2005 untuk program ketahanan pangan di NTB dan NTT sebesar Rp 33,81 miliar, masing-masing Rp 13,64 miliar untuk NTB dan Rp 20,17 miliar untuk NTT.

Anton mengemukakan untuk mengatasi kasus gizi buruk di NTT melalui dana dekonsentrasi, telah dialokasikan bantuan penanggulangan daerah rawan pangan sebesar Rp 560 juta, masing-masing Rp 35 juta untuk 16 kabupaten. Sedangkan untuk NTB sebesar Rp 142,5 juta, masing-masing Rp 23,75 juta untuk 6 kabupaten.

Dana tersebut, akan digunakan untuk imbalan kegiatan padat karya dan bantuan beras, sementara untuk kasus gizi buruk penanganannya melalui makanan tambahan. Deptan juga menyiapkan benih tanaman pangan dan mete, serta ternak sapi.

Deptan akan melibatkan Departemen Keuangan dan Perikanan dan Perguruan Tinggi serta akan berkoordinasi dengan Departemen Pekerjaan Umum untuk membantu sarana irigasi.

"Wakil Presiden telah menugaskan Deputi membuat perencanaan, termasuk mengenai akan ditanam di daerah mana, siapa yang akan menanam dan menerima bantuan. Diharapkan saat musim hujan sekitar September-Oktober mendatang semua sudah dapat dilaksanakan," ujarnya.

Dana bantuan bibit tanaman dan ternak tersebut, ungkapnya, berasal dari APBN tahun 2005 berupa dana dekonsentrasi dan bantuan dari Organisasi dan bantuan dari Organisasi Pangan Dunia (FAO), serta partisipasi swasta.

implementasinya. Bahkan ada yang mengatakan betapa sudahnya mengurus pertanian yang peaninya amat banyak, tingkat pendidikannya rendah dan miskin. Bila produksinya tinggi, amat repot mengurusnya, dan jika ada kebijakan baru maka amat susah mengimplementasinya.

Anton Apriyantono Menteri Pertanian dalam sambutan pada Peringatan Hari Krida Pertanian di Departemen Pertanian menyatakan bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan pertanian adalah apabila menjadi kekuatan perekonomian nasional.

Tanpa keberanian dan terobosan semacam itu jangan harap petani dan sektor pertaniannya akan bangkit. Kini tiba saatnya kita berpihak kepada petani dan sektor pertanian. kita tak perlu lagi hanya mengidentifikasi masalah, terlalu banyak teori. Fakta bahwa potensi kita adalah di sektor pertanian, kepada sektor inilah kita harus bertumpu yang menjadi tumpuan bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Selamat Hari Krida Pertanian. Dirgahayu petani Indonesia, ujar Menteri Pertanian Anton Apriyantono.

8 *Hari Krida Pertanian Ke-33*

Peringatan Hari Krida Pertanian ke-33 di Departemen Pertanian diadakan dalam suatu upacara. Bagi masyarakat pertanian hari Krida Pertanian merupakan hari penting untuk bersyukur atas apa yang telah dinikmatinya, dan menghargai mereka yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan petani.

Seperti biasanya kuat dalam mengadakan indentifikasi masalah, tetapi selalu lemah dalam

9 *Batas Izin Impor Daging Sapi dari AS Hingga Agustus*

Pemerintah menetapkan batas akhir ketibaan daging impor asal Amerika Serikat (AS) di pelabuhan dalam negeri pada 31 Agustus tahun ini sebelum pelarangan sementara daging impor dari AS diberlakukan.

Menurut Dirjen Peternakan Deputi, Mathur Riyadi, selama masa tenggang dua bulan itu, para importir dalam negeri sudah harus memutuskan kontrak

yang telah ditandatangani dengan rumah potong hewan (RPH) di AS sebelumnya.

Dia menambahkan langkah pemerintah menutup larangan impor, berdasarkan pertimbangan kesehatan masyarakat dan hewan di dalam negeri. Sebab, penyakit sapi gila meskipun disebut lokal tapi tertular melalui makanan ruminansia. Jadi, lanjutnya, peluang tertular sangat mungkin.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan kabar bahwa Indonesia kembali melarang impor daging sapi dari AS, masih merupakan rencana. "Itu masih akan, belum diberlakukan saat ini," ujanya.

Mathur mencontohkan pada masa pelarangan antara Januari hingga Juni lalu, menurut data United States Departement of Agriculture (USDA) hampir tiap bulan sebanyak 22,3 ton-118 ton jenis beef masih diimpor. Selain itu, lanjutnya, untuk offal mencapai 207,6 ton-1.437 ton tiap bulan. "Jadi semua butuh dukungan, sehingga jaminan kesehatan di masyarakat bisa sama-sama dijaga," tegasnya.

Selama ini, ungkapnya, pemerintah telah memberikan 71 ijin SPP kepada importir. Dari importir tersebut, menurut dia, yang telah terealisasi tahun ini totalnya 16,751 ton, dengan jenis daging sapi segar 10 ton, daging beku 8.611 ton, dan jeroan 7.950 ton. "Tahun lalu, total realisasi impor daging dari AS mencapai 30,59% atau sekitar 10.343,7 ton," jelasnya.

10 *Pelatihan Petani Gambia di RI Dilanjutkan*

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, sejak 1996 hingga 2003, Indonesia telah

melatih sekitar 1500 petani Gambia maupun beberapa negara Afrika Barat, dan kerjasama pelatihan itu akan dilanjutkan.

"Gambia ingin belajar banyak dari Indonesia yang telah berkontribusi besar di negara tersebut dalam bidang pelatihan pertanian," ujar Anton .

Kerjasama dengan Gambia, ujar Mentan, akan kembali dilanjutkan karena adanya keinginan dari negara sahabat tersebut mempelajari pertanian Indonesia untuk dipraktikan di negara itu. "Waktu datang di Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo, mereka ingin Indonesia mengajarkan bagaimana cara menanam jagung serta mengembangkan bibit jagung," ujar Mentan.

11 *Masalah Pangan Bukan Pada Ketersediaannya*

Masalah gizi buruk dan kerawanan pangan justru terjadi saat ketersediaan pangan, khususnya beras, secara nasional dinyatakan surplus. Kejadian tersebut menyadarkan semua pihak bahwa masalah pangan yang dihadapi saat ini bukanlah pada ketersediaannya, namun pada kemampuan rumah tangga untuk memperolehnya.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen, Kaman Nainggolan, mengatakan masalah gizi buruk dan kerawanan pangan berlangsung cukup lama dan terus berlangsung. Menurut Undang-Undang No. 7/1996 tentang Pangan, harus diwujudkan oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat.

Menurut Kaman, kemiskinan, kegagalan panen, ketidaktahuan dan ketidakpedulian merupakan penyebab utama meluasnya kasus gizi buruk di Indonesia. "Masalah



ini juga terjadi pada masyarakat berpenghasilan rendah, baik di pedesaan maupun di perkotaan, yang terpaksa hidup dalam kemiskinan, kekurangan pangan dan gizi, serta terancam wabah penyakit menular," ucapnya.

Yang lebih memperhatikan, ungkapnya, kejadian itu bersamaan waktunya dengan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah dan lembaga non pemerintah, serta lembaga non pemerintah, serta masyarakat secara berkelompok maupun perorangan.

Kaman mengajak semua pihak untuk menyatukan pengerak dan langkah dalam satu wadah, yakni berbentuk aliansi yang idenpenden, yang beranggotakan pihak-pihak yang peduli pada masalah gizi buruk dan kerawanan pangan, yang menghormati prinsip dan kreativitas masing-masing.

[12] Dibuka Keran Impor Beras Terbatas, Jika Terpaksa

Pemerintah memutuskan untuk tetap melarang impor beras. Pasalnya, cadangan beras samapi akhir tahun masih mencukupi dan harganya masih kondusif. Harga gabah saat ini rata-rata Rp 1.351 hingga Rp 1.436 per kg per bulan.

"Bahkan antara konsumsi dan produksi akan ada kelebihan 1,6 juta ton beras diakhir tahun 2005. Selain itu ada stok di masyarakat dari tahun 2004 sebanyak 2,6 juta ton. Jadi di akhir tahun kita tidak khawatirkan ada kekurangan karena ada sekitar 4,2 juta ton. Belum lagi kita masih mempunyai cadangan beras 350.000 ton yang disimpan di Badan Urusan Logistik (Bulog)," ujar Mentan Anton Apriyantono.

Kebijakan itu harus diikuti dengan pemantuan sistem produksi dan perdagangannya, serta memberi bantuan untuk para petani karena mereka membutuhkan proses pengeringan, pergudagangan, dan distribusi. Selain itu gangguan akan tetap ada, seperti banjir, kekeringan, dan hama.

Data terakhir dari berbagai instansi menunjukkan, produksi gabah secara nasional tidak mendapat hambatan, kecuali di beberapa daerah yang dilanda kekeringan, banjir, atau diserang hama. Produksi Gabah Kering Giling (GKG) tahun ini diharapkan tetap 54 juta ton, atau setara dengan 33 juta ton beras.

Konsumsi beras didalam negeri, sekitar 31 juta ton, sehingga akan ada surplus sekitar dua juta ton beras. Jika tidak terjadi bencana alam dahsyat di daerah sentra-sentra produksi beras, kondisi itu akan sesuai prediksi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Pertanian.

Ia berpendapat tidak ada alasan mengimpor beras, karena pangan merupakan landasan dan parameter berjalan tidaknya pembangunan. Lahan-lahan pertanian di Indonesia sangat luas dan subur. Sebagian besar rakyat adalah petani dan bekerja di sektor pangan beras ini. "Kita harus membenahi dulu persoalan pangan itu sampai tuntas. Kalau persoalan pangan bisa diselesaikan dengan baik, 50 persen persoalan pembangunan sudah kita selesaikan dengan baik," tutumya.

Ia berpendapat untuk mengangkat kesejahteraan petani jangan tanggung-tanggung, karena mereka sudah sangat lama di dera kemiskinan. Para pedagang jangan sampai mempermainkan harga, sebab dibandingkan dengan pedagang, para petani memiliki resiko lebih besar menghadapi berbagai kendala produksi.

13 *Kenaikan Harga Beras Masih Wajar*

Kenaikan harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta dinilai masih wajar. Kenaikan ini menguntungkan petani dan sepanjang produksi tidak bermasalah masih bisa ditoleransi. Akan tetapi, tetap harus diwaspadai kemungkinan munculnya kekuatan yang bersifat oligopoli.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono, mengatakan dari pantauan sementara tidak ada gangguan produksi. Dengan harga beras berkisar Rp 2.900 per kg, masih aman, "Ini bagus bagi petani," ujar Mentan.

Mentan mengatakan, sesuai dengan kesepakatan, pemerintah baru akan melakukan operasi pasar bila harga beras telah mencapai Rp 3.500 per kg. Menurut pengamat ekonomi pertanian, Bustanul Arifin, mengungkapkan kemungkinan munculnya kekuatan oligopoli itu terbuka dari riset yang saya lakukan, perdagangan beras memang cenderung bersifat oligopoli. Apalagi Perum bulog sudah menyatakan stok yang berasal dari pengadaan untuk tahun ini lebih rendah," ujarnya.

Menurut Bustanul, kenaikan harga beras yang dibarengi terjadinya kelangkaan BBM serta nilai tukar rupiah yang melemah memang perlu diwaspadai. Mengenai kaitan kenaikan harga beras dengan penurunan produksi yang dikeluarkan BPS, Bustanul mengatakan, meski ada penurunan, tetapi belum membahayakan.

Sementara itu, untuk memperkuat stok pangan di Asia Timur, mulai Kamis ini sejumlah pejabat senior ASEAN+3 bertemu di Manila, Filipina. Filipina telah

memutuskan agar stok tersebut disimpan di negara-negara yang mengalami surplus beras. Di sisi lain, Filipina juga berkeinginan mengubah mekanisme yang memungkinkan mereka untuk mengakses stok yang ada.

14 *September, Impor Daging Dari AS Dilarang*

Dirjen Peternakan Departemen Pertanian Mathur Riyadi mengatakan, akhir Agustus 2005 ditetapkan sebagai atas akhir ketibaan daging impor asal Amerika Serikat (AS) di pelabuhan dalam negeri. Setelah bulan itu, daging impor dari AS dilarang masuk ke Indonesia.

Dalam surat edaran itu untuk dua bulan ini pihaknya masih memperkenankan importir mengirimkan daging asal AS yang telah dibayar dimuka. Meski begitu diingatkan, selama masa tegang dua bulan mereka sudah harus memutuskan kontrol dengan rumah potong hewan (RPH) AS.

Langkah pemerintah menutup larangan impor karena pertimbangan kesehatan masyarakat dan hewan. Bagaimanapun, penyakit sapi gila kendati disebut lokal tetap dapat tertular melalui makanan ruminansia. Jadi peluang tertular sangat mungkin. Jadi kebijakan ini nanti tidak seberapa menurunkan dampak ekonomi," jelasnya.

Mathur menambahkan, dirinya akan terus mewaspadai kecurangan-kecurangan importir daging yang masih bandel memasukkan daging asal AS. ini didasarkan pada pengalaman sebelumnya, meskipun masa pelarangan ditetapkan masih banyak daging impor yang tetap masuk.

Contohnya, masa pelarangan antara Januari-Juni tahun lalu, menurut data United States Departement of Agriculture (USDA) hampir tiap bulan memasukkan sebanyak 22,3 ton-118 ton jenis beef ke Indonesia. Selain itu, untuk offal mncapai 207,6 ton-1,437 ton tiap bulan. "Jadi semua butuh dukungan, sehingga jaminan kesehatan di masyarakat bisa sama-sama dijaga," ujanya.

Selama ini, pemerintah telah memberikan 71 izin SPP kepada importir. Dari importir tersebut, yang telah terealisasi tahun ini totalnya 16.751 ton, dengan jenis daging sapi segar 10 ton, daging beku 8.611 ton, dan jeroan 7.950 ton. "Tahun llau, total realisasi impor daging dari AS mencapai 30,59.

Selain itu Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi), Thomas Sembiring, mengungkapkan, pihaknya siap memutuskan semua kontrak dengan pihak AS, meski kerugian yang ditanggung pengusaha akan besar, namun, di berharap pemerintah mempertimbangkan lagi keputusan itu. Ia beralasan selama ini yang menikmati industri daging asal AS bukan saja para importir, tapi para industri produsen temak. Para pengusaha bakso dan mi ayam juga memudahkan.

15 *Kerusakan Irigasi Pangkas 6,5% Produksi Beras*

Produksi beras nasional terancam turun 6,5% akibat rusaknya jaringan irigasi teknis di wilayah pertanian sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura). Padahal kawasan itu merupakan lumbung beras nasional, ujar Dirjen Pengolahan Lahan dan Air Deptan Hilman Manan.

Berdasarkan catatan yang bersumber dari Departemen Pekerjaan umum (DPU), tingkat kerusakan jaringan irigasi waduk,dam, dan bendungan mencapai 30-40%. Kerusakan pada jaringan irigasi primer dan tersier, seperti terjadinya pendangkalan, bocor, atau alat ukur di pintu air tidak berfungsi sepenuhnya, sehingga distribusi air sering tersendat dan tidak efesien. Saat ini, 30% jaringan irigasi harus direhabilitasi secara menyeluruh.

Rusaknya jaringan irigasi akan menurunkan secara signifikan produksi beras. Jika mengacu pada produksi gabah kering giling tahun 2005 sebanyak 53,01 juta ton, atau berupa beras sebanyak 32,93 juta ton dengan angka konversi 1,61 kg gabah menjadi 1 kg beras kerusakan jaringan irigasi itu ke depan akan memangkas produksi beras menjadi 30,79 juta ton.

Produksi beras sebanyak 30,97 juta ton itu dipastikan tidak mampu menutup kebutuhan/konsumsi beras nasional yang di masa mendatang akan meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk. Tahun 2005, Deptan memprediksi konsumsi beras nasional sebanyak 30 juta ton.

Menurut Hilman, total lahan sawah irigasi di Indonesia saat ini seluas 6,7 juta ha, untuk pulau Jawa, lahan sawah irigasi mencapai sekitar 2,6 juta ha. di musim kemarau. lahan sawah irigasi di Indonesia yang berpotensi kekeringan mencapai 5,2 juta ha per tahun. Lahan kekeringan terluas berada di Pantura.

Hilman menjelaskan, jaringan irigasi teknis di wilayah pertanian Pantura membentang dari Provinsi Banten hingga Jawa Timur, seperti Bojonegoro, lamongan, dan Tuban. Di Pantura Jawa Barat ada bendungan Jatiluhur (Purwakarta), dan Bendungan

Rentang di Cirebon. Di Pantura Jawa Tengah ada Bendungan Pamali-Comal. Setiap jaringan irigasi akan mengairi 400-500 ha sawah teknis.

Selain sangat mengganggu produksi beras, kerusakan jaringan irigasi sawah di Pantura juga menimbulkan persoalan lain. "Sebab, daerah irigasi Pantura endemik banjir maupun kekeringan," ujar Dirjen Pengolahan Lahan dan Air Deptan, Hilman Manan.

Untuk mempertahankan produksi beras, Deptan berencana memperbaiki jaringan irigasi di Pantura. Biaya perbaikan diperkirakan mencapai US\$ 50 juta, yang akan dipinjam dari Bank Pembangunan Islam (IDB). Hilman menjelaskan, Deptan kini melakukan studi kelayakan (feasibility study) untuk pengajuan pinjaman ke IDB. Studi kelayakan diharapkan selesai akhir 2005, sehingga perbaikan bisa dimulai 2006. Pelaksanaan perbaikan jaringan irigasi di Pantura diperkirakan butuh waktu tiga tahun.

"Tidak seperti pinjaman untuk pembangunan jalan tol atau pembangkit listrik, IDB akan memberikan pinjaman nonkomersial untuk perbaikan infrastruktur sawah ini. Service fee biasanya 1%-2% per tahun selama 30 tahun, dengan grace period (tenggang waktu pembayaran) 15 tahun," ujar Hilman.

16 *Perdagangan Beras Antarpulau Meningkat*

Departemen Pertanian terus memantau perdagangan beras antarpulau yang terus meningkat akhir-akhir ini, bahkan mencapai 17 persen dibandingkan tahun 2003 yang hanya berkisar satu persen. Permintaan

cukup tinggi dari sentra-sentra produksi padi dan beras di Pulau Jawa, ujar Menteri Pertanian Anton Apriyantono.

Permintaan menggebu datang dari Pasar Induk Beras Cipinang, antara lain dari sentra-sentra produksi beras di Jawa Tengah yang menyebabkan terjadinya pengurangan stok beras di beberapa daerah di provinsi itu. Beras di Cipinang dikirim lagi ke sejumlah daerah di Pulau Jawa.

"Permintaan yang tinggi itu menaikkan harga jual gabah maupun beras di tingkat petani. Ini sangat menggembirakan karena petani menikmati hasil jerih payahnya. Mudah-mudahan kenaikan harga itu benar-benar dinikmati oleh petani, bukan hanya pedagang," ujarnya.

Mentan menjelaskan, jika beras mulai langka dan harganya naik tinggi tak terkendali, terutama jika menebus harga Rp 3.500 per kg (beras medium untuk rakyat kecil) maka akan dilakukan operasi pasar (OP).

17 *PHRI Akan Impor 39.00 Ton Brown Rice*

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) akan mengimpor sebanyak 39.00 ton brown rice Thai hom mali dari thailand, sementara pemerintah sedang mengkaji permohonan itu secara mendalam.

Menurut Dirjen Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (BP2HP) Departemen Pertanian, Djoko Said Damardjati, mengatakan Deptan akan melakukan kajian mendalam mengenai dispensasi impor brown rice

Thai hom mali sebanyak 39.00 ton untuk memenuhi permintaan PHRI.

Menteri Pertanian sendiri telah memberikan arahan agar masalah impor brown rice (beras pecah kulit) dikaji betul, apakah beras dibutuhkan sebanyak itu (39.000 ton untuk 3 bulan). Menurutnya, jika memang PHRI membutuhkan beras wangi Thai hom mali sebanyak itu, maka tidak menjadi masalah. Padahal, ada informasi kebutuhan PHRI sekitar 5.000 ton/bulan. "Jadi dapat dihitung berapa besarnya kebutuhan untuk masa tiga bulan," ujarnya.

Menurut Mentan Anton Apriyantono, pihaknya tidak risau adanya pendomplengan impor dengan beras jenis lainnya jika impor beras jenis itu dilakukan. "Makanya, yang diijinkan dalam bentuk beras pecah kulit, supaya bisa dibedakan dengan beras biasa. Beras ini masih harus diproses lagi," ujar dia.

Berdasarkan surat salinan Dirjen BP2HP Deptan sebelumnya (Delima Hasri Azahari) No. 183/PP.130/G/5/05, perihal dispensi impor brown rice Thai hom mali, menyebutkan importasi beras wangi itu dianjurkan oleh empat perusahaan distributor beras.

PT Alam Makmur Sembada (3.000 ton), PT sarinah (18.000 ton), PT Surya Citra MAndiri Perkasa (3.000 ton), PT Delta Asia Pangan Sejahtera (15.000 ton).

18 *Menunggu Realisasi Revitalisasi Pertanian*

Banyak pihak yang menaruh perhatian pada sektor pertanian bernafas lega ketika Presiden mencanangkan program revitalisais pertanian, perikanan dan kehutanan (RPPK) Juni lalu.

Menurut Menteri Pertanian, Anton Apriyantono, pemerintah menilai pembangunan tiga sektor tersebut harus terintegrasi, tidak boleh terpisah-pisah lagi. Karena itu visi dan misi RPPK itu juga sudah ditentukan.

Dalam kondisi seperti itu, Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspoyo mengusulkan petani lebih baik memperoleh subsidi benih padi dibanding pupuk. Itu bila pemerintah memang mengiginkan subsidi yang diberikan jatuh ke petani. Alasannya, karena salah satu faktor penting yang menentukan produktivitas serta kualitas beras adalah bahan baku gabah yang dihasilkan dari benih yang bermutu. "Selain itu benih tidak bisa diekspor, tidak seperti pupuk apa daerah.

Menurutnya, sejumlah manfaat diharapkan dipetik dengan program SAP. Ia menuturkan hal itu antara lain tersedianya sarana input produksi (saprodi) dengan cara tepat lokasi, waktu, harga, jumlah, mutu melalui kredit murah (kredit ketahanan pangan).

Konsep SAP ini telah di uji cobakan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Kabupaten Subang dan Krawang di Jabar, serta beberapa kabupaten lain telah meminta agar konsep ini dapat diterapkan di wilayahnya. Peningkatan kualitas dalam negeri sangat strategis dalam memperkokoh daya saingnya terhadap desakan beras impor, menciptakan nilia tambah, serta efesiensi sumber daya. Pada akhirnya program ini akan menunjang peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Dalam mengatasi kesulitan para petani saat menghadapi puncak panen yang sering berbarengan dengan curah hujan yang tinggi, Bulog telah melakukan upaya penambahan sarana mesin pengering mekanis (drying center). Program ini dengan melakukan kerjasama secara BOT (build, operate, transfer) antara Perum Bulog dan pihak investor.



Dirut Perum Bulog menyatakan melalui penyebarluasan pola kemitraan yang membina secara utuh proses agribisnis beras dalam negeri mulai penyediaan input faktor produksi yang baik berupa benih, pupuk, dan obat-obatan, pengelolaan oleh petani serta jaminan pemasaran yang didukung sarana pasca panen yang baik, akan dapat segera tercipta kualitas beras yang prima.

Pemerintah memang telah mencanangkan program revitalisasi itu dan jangan sekedar pencanangan tanpa realisasi. Seperti ujar Ketua Komisi IV Mindo Sianipar program revitalisasi jangan hanya menjadi sebatas retorika.

19 *Persediaan Beras Nasional Mencukupi*

Menteri Pertanian Anton Apriyantono menegaskan, persediaan beras nasional untuk tahun ini mencukupi meski impor beras telah dilarang. Kekeringan dan kelangkaan bahan bakar minyak di beberapa wilayah di Tanah Air diyakini tak berpengaruh terhadap produksi beras nasional.

Kebutuhan beras nasional tahun ini diperkirakan 31 juta ton, sedangkan produksi beras nasional diperkirakan antara 32 juta-33 juta ton atau setara 53 juta ton produksi padi.

Departemen Pertanian, lanjut Mentan, siap mengantisipasi kemungkinan puso di sejumlah wilayah akibat musin kering yang mulai tiba. Ada dua macam antisipasi yang dilakukan, yakni memberi informasi

mengenai waktu yang tepat untuk mulai tanam dan mengganti bibit tanaman yang puso untuk musim tanam berikutnya.

Hingga pertengahan tahun ini beberapa wilayah mengalami kekeringan, di antaranya Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Jawa Timur. Dampak terhadap produksi padi akibat kekeringan itu paling parah terjadi di NTB dan NTT. Sedangkan di beberapa wilayah di Jatim belum terlalu parah.

Mengenai cuaca yang tak menentu akhir-akhir ini. Anton mengatakan ada dua akibat secara langsung. Pertama bersifat positif karena turunnya hujan di musim kemarau ini mendorong petani untuk menanam padi. Di sisi lain, cuaca tak menentu itu mengakibatkan meningkatnya serangan hama wereng.

20 *Program Lumbung Pangan Sumsel Butuh Rp 32,6 T*

Sumatera Selatan membutuhkan dana Rp 32,67 triliun untuk mewujudkan program lumbung pangan melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sumber dana tersebut, ujar Gubernur Sumsel Syahril Oesman ketika memaparkan program lumbung pangan kepada Dirjen Pengolahan Lahan dan Air Deptan Hilman Manan di Palembang.

Dari sumebr APBN dan APBD diharapkan sebesar Rp 4,46 triliun, swasta (investor) Rp 22,85 triliun, perbankan melalui kredit sebesar Rp 4,31 triliun, dan masyarakat Rp 1,05 triliun. Dana ini untuk program dan implementasi revitalisasi pertanian, perikanan dan

perkebunan di Sumsel, dengan sasaran produksi tahun 2009. Sasaran produksi itu berupa beras sebanyak 2 juta ton, karet 800 ribu ton, minyak sawit mentah (CPO) 1,8 juta ton, sapi 538.700 ekor, udang 35 ribu ton, dan kayu bahan baku bubur kertas (pulp) sebanyak 10,3 juta meter kubik.

21 80 Persen irigasi Rusak

Sekitar 80 persen saluran irigasi di Indonesia rusak, sebagian rusak berat sehingga distribusi air tidak bisa lagi diatur dengan baik. Akibatnya, jutaan petani dirugikan karena sawah-sawah mengering di saat musim kemarau dan banjir ketika musim hujan mencapai puncaknya.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono, memaparkan, anggaran total Deptan saja hanya Rp 4 triliun per tahun, sedangkan bantuan dari luar negeri tidak mudah didapatkan. Beberapa negara di Timur Tengah, sudah menjanjikan bantuan sekitar Rp 1 triliun untuk memperbaiki saluran irigasi.

"Banyak saluran yang sudah mendangkal karena sedimentasi. Banyak juga yang disedot atau dipotong di tengah jalan oleh warga sehingga wilayah lain tidak mendapatkan air. Tenaga pengawasannya hanya sedikit. Kami minta perhatian pemerintah pusat." Menurut Mentan pembangunan saluran irigasi sebenarnya ditangani oleh instansi lainnya. Sedangkan Deptan sudah membentuk Direktorat Jenderal Pengolahan Lahan dan Air yang mencoba untuk menangani masalah irigasi, namun masih dalam keterbatasan.

Departemen Pertanian, akan membantu menguji tanah untuk mengukur kebutuhan pupuk. Para petani disarankan memakai pupuk kandang atau kompos supaya tanahnya subur dan tidak tergantung lagi pada pupuk yang dijual penyalur dan pabrik-pabrik yang terkadang langka dan harganya tinggi.

Mentan mengakui, setelah era otonomi daerah, penanganan PPL diserahkan ke daerah. Namun, tidak semua pemimpin daerah memperhatikan masalah ini. Akibatnya, PPL ditelantarkan dana banyak yang beralih profesi, bahkan ada yang tidak diangkat menjadi pegawai tetap, padahal sudah 20 tahun mengabdikan.

Mentan berjanji akan berusaha meyakinkan Presiden dan anggota Kabinet lainnya untuk mengangkat PPL yang masih berstatus honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan mengangkat PPL baru hingga jumlahnya keseluruhan mencapai 68.000 orang sesuai dengan jumlah desa yang ada di Indonesia. Dulu jumlah PPL sekitar 36.000 orang, saat ini tinggal 24.000.

22 Genjot Produksi dan Mutu

"Program pengembangan produksi komoditi hortikultura ditekankan pada sasaran peningkatan produktivitas dan produksi. Tujuannya ialah memenuhi permintaan dalam negeri dan meningkatkan ekspor," ujar Dr. Ahmad Dimiyati, Direktur Jenderal Hortikultura yang menggantikan Dr. Sumarno, MSc.

Dimiyati menambahkan sekaligus peningkatan produksi, harus juga ditingkatkan daya saing produk

melalui peningkatan mutu. Diharapkan melalui peningkatan mutu ini dapat mengurangi impor.

Menurut Dimiyati, dalam pengembangan produksi hortikultura ini harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Artinya, bukan hanya pada kondisi "on farm" saja tetapi juga kondisi "off farm". Misalnya pengembangan prasarana, infrastruktur, penyimpanan dan pemasaran.

Bukan hanya itu, perlu mengajak instansi terkait. Sehingga diperlukan adanya koordinasi eksternal. Misalnya kalau menginginkan perbaikan efisiensi transportasi dan distribusi kita jalin kerjasama dengan Departemen Perhubungan dsbnya. "Masak, mengangkut durian monthong dari Bangkok, lebih murah dari mengangkut durian dari Medan," ujarnya bergurau.

Dimiyati juga mengingatkan bahwa semua upaya peningkatan produksi dan mutu ini dilakukan dengan bantuan Iptek. "Bukan hanya Iptek yang dimiliki oleh Badan Litbang Pertanian, tetapi juga Iptek yang dihasilkan oleh berbagai kalangan seperti swasta atau bahkan penemuan petani sendiri," ujar Dimiyati.

23 *Produk Pertanian Harus Kompetitif*

Petani Indonesia perlu bekerja keras untuk menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing tinggi untuk mengantisipasi semakin terbukanya pasar produk pertanian. Produk pertanian Indonesia ke depan harus dapat bersaing dengan produk pertanian negara lain sehingga mampu berbicara pada era perdagangan bebas (free trade agreement/FTA).

Menteri Pertanian, Anton Apriyantono mengatakan, era perdagangan bebas yang sudah dimulai seperti negara-negara ASEAN dengan negara-negara mitra Jepang dan Cina menuntut segala sektor perekonomian lebih kompetitif. "Produk pertanian Indonesia harus lebih kompetitif," ujar Mentan.

Menurut Mentan, pameran produk pertanian yang dilaksanakan dan dirancang sebagai kegiatan tahunan berskala nasional dan internasional itu, akan dapat memacu kalangan petani dan dunia usaha di sektor pertanian untuk menghasilkan produk yang kompetitif.

Menteri Pertanian berharap Soropadan Agro Expo 2005 dapat memberikan sumbangan positif bagi pembangunan agribisnis di Indonesia. Selain itu, para pelaku usaha agribisnis di Jateng dapat memanfaatkan dan berperan aktif dalam berbagai pameran yang berskala nasional maupun internasional.

Sementara itu, Gubernur Jateng H Mardiyanto mengatakan, pameran kedua kalinya yang digelar 11-17 Juli 2005 mengalami peningkatan dari sisi kualitas maupun kuantitas produk dan peserta. Hal itu dinilai baik karena dalam era global ini, selain memberi peluang juga memunculkan tantangan baru.

Mardiyanto menambahkan, para petani harus siap menggunakan teknologi tinggi untuk produksi maupun untuk pemasaran. Untuk itu, pemerintah provinsi Jateng telah memfasilitasi transaksi jarak jauh dengan pengusaha di benua Eropa untuk hubungan bisnis. "Yang penting kita harus bersinergi untuk memberdayakan masyarakat petani, agar mereka mampu mandiri untuk mengangkat kehidupan mereka," ujar Gubernur Jateng H Mardiyanto.



24 *Deptan Ujicoba Desa Mandiri Pangan di 9 Propinsi*

Deptan tahun 2005 akan melakukan uji coba Desa Mandiri Pangan di 9 Propinsi yakni seluruh Jawa, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Jambi.

"Program ini diharapkan mampu membantu masyarakat di daerah rawan pangan agar tidak mengalami busung lapar dan gizi buruk," ujar Ir. Kaman Nainggolan Kepala Badan Ketahanan Pangan Deptan. Dalam program Desa Mandiri Pangan, desa harus mengenal potensi daerahnya. Ketersediaan pangan, distribusi dan akses petani apda bahan pangan juga perlu dibenahi. Selain itu, dalam program ini Deptan juga akan menghidupkan kembali lumbung pedesaan dan perikanan darat sistem mina padi.

Dalam program Desa Mandiri Pangan, ini, desa harus mengenal potensi daerahnya. Dicontohkan, Desa Cirendeuh Cimahi Jawa Barat yang makanan utama penduduknya adalah ubi dan cara masakannya ditanak seperti nasi, maka tidak perlu ada paksaan kepada masyarakatnya untuk mengkonsumsi nasi. Ketersediaan pangan, distribusi dan akses petani pada bahan pangan juga perlu dibenahi. Selain itu, dalam program ini Deptan juga akan menghidupkan kembali lumbung pedesaan dan perikanan darat sistem mina padi.

Deptan juga memprogramkan dana bantuan untuk daerah rawan pangan sebanyak Rp 15 juta/kabupaten diberikan pemerintah untuk 300 kabupaten di Indonesia. Khusus daerah yang mengalami masalah terberat yaitu Nusa Tenggara Barat dengan 6 kabupaten mendapat Rp 23,75 juta/kabupaten dan 16 kabupaten bantuan Rp 35 juta/kabupaten.

Kemiskinan yang terjadi di NTT dan NTB juga disebabkan oleh lingkungan yang tidak mendukung untuk berusaha tani. Uang ini, ujar Kaman digunakan untuk program intensif Padat Karya, contohnya, memperbaiki saluran irigasi tersier, tapi upah tidak dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk bahan pangan.

25 *Deptan Tetap Bertahan*

Deptan hingga saat ini tetap bertahan dengan kebijakan pelarangan impor beras. Kebijakan ini dinilai tepat karena memberi intensif bagi petani dan menggairahkan perdagangan beras di dalam negeri, terutama dari daerah surplus ke daerah yang kekurangan.

"Deptan masih bersikap sama, Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan telah sepakat untuk kembali melarang impor beras," ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kaman Nainggolan.

Meski ada penurunan produksi sekitar satu juta ton gabah kering giling atau sekitar 600.000 ton beras pada tahun ini, produksi di dalam negeri masih mencukupi kebutuhan.

"Saat ini kita belum perlu mengimpor beras meski produksi diramalkan turun. hingga sekarang belum ada gejolak yang berarti," ujar Kaman. Ia mengatakan, hingga sekarang belum ada permintaan pembukaan impor itu.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Deptan Kaman Nainggolan mengungkapkan, dengan pelarangan itu, harga beras makin menarik buat petani dan perdagangan antarpulau berkembang. Pasar beras makin bergairah dengan pengiriman beras antar daerah dan antarpulau.



26 *RI Tolak Permintaan Impor Beras Thailand*

Menteri Pertanian Anton Apriyantono, mengatakan permintaan Thailand supaya Indoensia kembali mengimpor beras dari sana tidak bisa dipenuhi. "Karena pemerintah sudah, membuat keputusan itu sejak lama," ujanya.

Sementara itu, menurut Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Agusdin Pulungan, larangan impor beras merupakan kebijakan yang realistis dan rasional. Karena menurut data lapangan diketahui bahwa sentra-sentra produksi khususnya di Jawa diperkirakan akan panen dengan baik.

"Kebijakan ini sekurang-kurangnya telah menunjukkan sebuah langkah awal dalam merealisasikan merevitalisasi pertanian yang bukan sekedar retorika," ujanya.

Agusdin mengingatkan meskipun larangan impor beras sudah ditetapkan sejak Januari sampai Desember 2005, namun pemerintah harus tetap waspada terhadap kemungkinan masuknya beras-beras selundupan.

Produksi gabah hingga akhir tahun 2005 diperkirakan mencapai 53 juta ton gabah menurut data Badan Urusan Logistik (Bulog) stok beras nasional sampai dengan akhir 2005.

27 *Virus H5N1 Tidak Mematikan*

Menteri Pertanian Anton Apriyantono, mengatakan dugaan meninggalnya Iwan (alm) beserta dua putrinya akibat flu burung harus dibuktikan. Menurutnya virus H5N1 penyebab penyakit flu burung yang menyerang hewan unggas di Indonesia tidak berbahaya bagi manusia.

Peristiwa meninggalnya tiga warga Tangerang tersebut, menurut Mentan Anton Apriyantono, sejauh ini belum diindikasikan karena terkena virus flu burung. Untuk memastikan secara benar apakah para korban terkena virus ini, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap riwayat hidup korban.

Menurutnya, varian virus H5N1 dapat ditularkan kepada manusia di negara Asia lainnya, tidak sama dengan varian virus H5N1 yang ada pada hewan unggas di Indonesia. Jajaran Direktorat Kesehatan Hewan Dirjen Bina Produksi Peternakan Deptan menggelar rapat pembahasan wabah flu burung (AI).

Meski sejauh ini belum ada jatuh korban menausia karena positif terkena virus flu burung, namun kondisi saat ini sudah dapat dikatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk flu burung ini.

Namun demikian, pihak Deptan sendiri terus mengintensifkan pelaksanaan vaksinasi flu burung terhadap unggas di beberapa daerah endemik flu burung. "Deptan sudah berusaha sesuai dengan kemampuan yang ada, dan menjalin kerja sama dengan para peternak unggas dan AI center."

Mentan menuturkan, penyebaran virus flu burung dapat terjadi melalui udara. Namun, sebelum virus tersebut menyerang ke manusia terlebih dahulu virus berkembang di dalam tubuh babi.

28 *Soropadan Agro Ekspo II-2005 Berhasil Sukses Produk Pertanian Dapat Bersaing di PAsaran Internasional*

Peyelenggaraan Soropadan Agro Ekspo II yang berlangsung dari 11 s/d 17 Juli 2005 serta dihadiri Menteri



Pertanian Anton Apriyantono dan Gubernur Jawa Tengah H. Mardiyanto berhasil dengan sukses.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono dalam sambutannya pada pembukaan acara Soropadan Agro Ekspo II menegaskan melalui pameran tersebut diharapkan dapat bersaing di pasaran internasional. Berdasarkan laporan yang diterima penyelenggara Soropadan Agro Ekspo 2004 telah berhasil, sehingga untuk 2005 sekamg lebih berhasil lagi.

Disamping pameran dan bursa komoditi selama berlangsungnya Soropadan Agro Ekspo II juga diadakan lelang komoditas agro, temu dan kontak bisnis, seminar, workshop, sarasehan, dan lokakarya agribisnis, ekspose produk dan teknologi pertanian, tour diplomat, tour agro wisata, lomba prestasi dan kontes agro, serta Pentas Seni Budaya.

Pasar lelang agro yang diselenggarakan di Joglo utama berlangsung pagi dan dihadiri ratusan pembeli dan penjual dengan dipandu oleh petugas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Dinas Pertanian setempat. Beberapa barang yang dilelang antara lain tembakau, beras organik, ternak sapi, kluwak, melon dan lain-lain hasil agro yang diproduksi petani atau pengusaha agribisnis.

[29] Lima Langkah Untuk Pencerahan Revitalisasi Penyuluhan

Terdapat lima langkah pencerahan penyuluhan pertanian yang harus segera dilakukan agar revitalisasi penyuluhan berjalan lancar, yaitu sistem penyuluhan yang meliputi unsur semua unsur, pemanfaatan teknologi untuk perubahan, kemudahan petani mengakses kebijakan,

penyuluhan harus tetap dilakukan, serta adanya jaringan dan sistem informasi teknologi pertanian. Kelima hal tersebut merupakan rumusan workshop Penyuluhan Pertanian "Menciptakan Pencerahan Penyuluhan Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian" yang diadakan.

Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian Dr. Ir. Hasanuddin Ibrahim, Sp. I. menuturkan pencerahan penyuluhan pertanian dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pasar terlebih dahulu lalu ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain itu menurut Hasanuddin untuk mencerahkan revitalisasi penyuluhan perlu diadakan secara kolektif, pengadaan infrastruktur yang mendukung pertanian, politik yang mendukung pertanian daerah perbatasan.

Tidak dapat dipungkiri, revitalisasi Pertanian yang digulirkan SBY membawa angin segar bagi pemecahan masalah petani terutama petani gurem. Sebenarnya masalah yang terjadi dalam pertanian, khususnya penyuluhan pertanian lanjutnya merupakan tanggung jawab kita bersama. Masalah-masalah yang terjadi dalam penyuluhan pertanian mendapat perhatian masyarakat pertanian dari berbagai unsur seperti pejabat Deptan, akademis, penyuluhan, organisasi petani, perbankan, maupun perusahaan swasta.

[30] Produk Pertanian Riau Curi Perhatian

Berbagai produk unggulan pertanian Riau menjadi pusat perhatian masyarakat dalam pameran menyambut Hari Krida Pertanian ke-33 di Riau.



Pameran tersebut menggelar berbagai produk makanan, tanaman hias, dan tanaman hortikultura. "Produk yang banyak mendapat perhatian masyarakat tanaman buah dalam pot (tabu lampot), dan produk makanan khas Riau roti jala (roti cane)," ujar Gubernur Riau HM Rusli Zainal.

Dalam sambutan yang dibacakan Rusli, Menteri Pertanian Anton Apriyantono menyatakan, Deptan dan masyarakat pertanian mempunyai komitmen kuat untuk menyediakan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanian ini menjadi salah satu sumber devisa negara dan penyedia lapangan kerja, terutama di pedesaan.

Walaupun demikian, ujar Mentan, amanah tersebut dirasakan semakin berat bagi masyarakat pertanian. "Kami menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang semakin kuat. Namun demikian masyarakat pertanian tidak boleh menyerah dan pesimistis," ujar Mentan Anton Apriyantono.

31 *Dana Darurat Atasi Flu Burung Disetujui*

Mentan Anton Apriyantono menyatakan, Departemen Keuangan akan menyediakan dana darurat, selain dana yang sudah ada APBN-P 2005, untuk mengatasi serangan penyakit flu burung di Indonesia.

Menurut Anton, dana darurat tersebut antara lain untuk mengganti unggas milik peternak yang akan dimusnahkan karena terjangkit flu burung.

Mentan belum dapat memastikan berapa anggaran yang diperlukan untuk mengatasi flu burung di Indonesia. Namun, dia berharap dalam waktu dua tiga

hari ini sudah bisa diketahui besarnya dana yang dibutuhkan. "Untuk itu kami sedang menyusun anggaran untuk flu burung, karena sudah menjadi masalah yang serius," tambahnya.

Menurut Anton, Deptan akan menangani secara spesifik terhadap kasus flu burung di tangerang, karena telah ada korban manusia akibat virus tersebut.

Deptan selanjutnya melakukan pengawasan secara ketat di Tangerang, yakni pada radius 20 kilo meter dari tempat yang ditemukannya kasus flu burung.

Menurut Mentan, jika di suatu tempat ditemukan flu burung, ternak yang ada pada radius 3 km akan dimusnahkan. pemerintah akan mengganti ternak-ternak yang dimusnahkan tersebut.

32 *Semua Unggas di Daerah Terjangkit Dimusnahkan*

Pemerintah akan memusnahkan semua unggas di daerah yang terjangkit flu burung. Dana untuk penanganan flu burung tersebut telah disetujui diambil dari APBN dan dana darurat di Departemen Keuangan.

Anton menyebutkan, seluruh daerah akan diinventarisasi, khususnya Tangerang. Sebab, katanya terkait dengan temuan virus flu burung pada babi di dekat daerah tersebut.

Menurut Mentan, sangat kuat dugaan virus penyebab flu burung sudah menular dari unggas ke babi. Selain itu, lanjutnya, pihaknya telah memerintahkan agar tidak mengizinkan hewan menyeberang ke luar dari Tangerang.

"Peternakan babi akan diganti dengan sapi atas biaya pemerintah. Untuk itu seluruh babi di sana akan dimusnahkan," kata anton.

33 *Pasokan Surplus, Harga Beras Tak Perlu Dikhawatirkan*

Kepala Badan Ketahanan Pangan Deptan mengatakan, pasokan beras di dalam negeri tahun 2005 surplus. Sehingga kenaikan harga pada puncak paceklik tahun ini tidak perlu dikhawatirkan.

Menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan Deptan Kaman Nainggolan, kenaikan harga beras di musim kamarau sekarang hal yang wajar saja. Lanjut Kaman, untuk orang miskin yang berdaya beli lemah sudah tersedia beras untuk keluarga miskin (raskin). Sedangkan bagi orang mampu, harga beras Rp 4.000 per kg tidak menjadi masalah. Sebab, konsumsi beras per orang hanya 0,5 kg per orang per hari (15 kg per bulan), atau hanya membutuhkan dana Rp 60.000 per bulan.

Untuk wilayah pesisir Timur Sumatera, menurut Kaman, jika harga beras Rp 4.000 per kg juga wajar. Sebab, daerah ini produksi berasnya sangat tidak mencukupi dibanding kebutuhan setempat (defisit berat). "Jika harga beras tinggi, Deptan juga tinggal menyuruh Bulog untuk melakukan Operasi Pasar (OP). Ini sudah sering kami lakukan," ujar Kaman.

OP akan dilakukan Bulog, jika harga beras sudah Rp 3.500 per kg untuk kualitas sedang, dan Bulog mempunyai stok minimal 1 juta ton gabah setara beras. Dari pengamatan Bulog, dalam dua bulan terakhir harga beras di PIC-untuk semua jenis kualitas-naik. Pada Juli 2005, harga rata-rata IR I, IR II, dan IR III masing-masing Rp 3.100 per kg, Rp 2.900 per kg, serta Rp 2.700 per kg. Harga ini tertinggi pada bulan yang sama sejak 2001. Harga di PIC ini harga grosir, yang jauh lebih murah dibandingkan harga beras yang dibeli konsumen rumah tangga di pedagang pengcer.

34 *Babi di Lokasi yang Ada Virus AI Dimusnahkan*

Seluruh ternak babi di dua peternak di Kabupaten Tangerang, Banten, tempat ditemukannya virus AI pada babi, akan dimusnahkan untuk mencegah penularan lebih lanjut. Peternakan babi tersebut akan dialihkan menjadi peternakan sapi.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, pemusnahan dilaksanakan Deptan bersama dengan pemerintah Kabupaten Tangerang.

Babi yang akan dimusnahkan sebanyak 196 ekor, Mentan menolak pendapat bahwa pemusnahan terlambat dilakukan karena virus flu burung pada babi di Tangerang adalah diketahui sejak Februari 2005. "Hasil penelitian kami terhadap komposisi DNA dari virus AI di beberapa daerah ada kesamaan, juga yang di Sulawesi Selatan.

Sejak Agustus 2003 hingga 1 Juli 2005 lebih dari 9,5 juta ekor unggas diseluruh Indonesia mati terkena flu burung hanya dalam 2 tahun, penularan virus ini telah menyebar ke 21 propinsi, yang meliputi 132 kabupaten/kota. daerah baru yang terkena serangan adalah Sumatera Utara, Jambi, dan Kalimantan Timur.

Untuk mencegah penularan lebih luas, tahun ini dilakukan vaksinasi terhadap peternakan unggas rakyat di propinsi terkait. Jumlah vaksin yang disediakan 126 juta dosis. "Vaksin AI stok pusat 52 juta dosis dan dana operasional vaksinasi yang disediakan APBN 2005 untuk Ditjen Peternakan Rp 3 miliar telah didistribusikan ke daerah tertular, ujar Dirjen BP Peternakan Mathur Riady.

Mentan menjelaskan Deptan akan mengalokasikan setengah dari dana tanggap darurat yang dikelola Deptan untuk menanggulangi flu burung.

Dana tanggap darurat yang dikelola Deptan Rp 104 miliar"dana ini sesuai dengan acuan Departemen Keuangan, masalah sudah dibicarakan dengan Menteri Keuangan agar dapat menggunakan dana tanggap darurat yang ada di Depkeu karena ini sudah masuk pase sangat membahayakan,"ujar Mentan.

Penelitian akan dilakukan kembali terhadap babi dan unggas di Kecamatan Panongan dan Legok, Tangerang, untuk memastikan penularan flu burung dilakukan Balivet Bogor, dengan mengambil air liur, kotoran, dan darah babi, serta liur bebek yang hidup disekitar peternakan babi.

85 *Industri Teh Hadapi Situasi Tak Kondusif*

Mentan Anton Apriyantono menilai, industri teh menghadapi situasi kurang kondusif akibat ketidakseimbangan suplay dan permintaan ini berakibat jatuhnya harga teh yang berimbas pada menurunnya operasi produsen teh baik pengusaha kecil maupun perkebunan besar.

Masalah yang sama juga dibahas dalam International Tea Business Conference (ITBC) yang diselenggarakan di tempat yang sama, 18-19 Juli lalu.

Produksi teh dunia pada 2004 yang mencapai 3,2 juta ton, menunjukkan peningkatan 2% dibandingkan tahun sebelumnya. Ekspor teh global juga meningkat 4,5% dengan pasokan sebesar 1,47 juta ton.

ITBC yang mendesak ditemukannya mekanisme untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan nilai terhadap suplay berlebihan melalui

peningkatan nilai produktivitas, kemampuan usaha-usaha kecil, dan mutu produk.

Menyangkut kondisi industri teh di Indonesia, Mentan mengungkapkan, perkebunan teh Indonesia yang dikembangkan sejak abad ke 19 menunjukkan pertumbuhan yang menarik. Wilayahnya telah meluas dengan pertumbuhan 0,8% dari 129 ha pada 1990, menjadi 143 ribu ha pada 2003 Indonesia bahkan tercatat sebagai negara produsen teh terbesar di dunia pada 2003, dengan total produksi 168 ribu ton.

86 *Wapres Minta Kompensasi Flu Burung Harus Layak*

Sebanyak 18 ekor dari 31 ekor babi dan 40 ekor itik yang positif terjangkit virus flu burung di Tangerang, Banten, proses pemusnahan ternak dan unggas yang berlangsung di desa Babad, Kecamatan Legok, Tangerang itu dipimpin Mentan Anton Apriyantono.

Menurut dia, Balitvet Bogor telah melakukan survei terhadap 167 ekor babi di peternakan di kecamatan Panongan dan Legok. Hasilnya, dari jumlah tersebut hanya 18 ekor yang positif tertular virus flu burung dan semuanya di Panongan.

Mentan juga mengatakan 31 ekor babi yang positif tertular virus flu burung itu kondisi fisiknya seperti biasa dan tidak ada masalah dengan kesehatan tubuhnya. Tetapi, setelah dilakukan tes secara intensif, ternyata tubuhnya terserang flu burung (AI).

Menurutnya, proses pemusnahan ternak dan unggas positif tertular virus flu burung memang tidak boleh

merugikan peternak. Untuk itu, pemerintah memberikan ganti rugi yang cukup meringankan mereka adalah sebesar Rp 7.000 per kg untuk babi.

Anton megemukakan pada tahun anggaran 2005, Deptan mengalokasikan dana tanggap darurat sebanyak Rp 104 miliar, setengah dari jumlah tersebut, yakni Rp 52 miliar diprioritaskan untuk mengganti temak masyarakat yang dimusnahkan akibat berjangkitnya wabah flu burung di beberapa daerah di Indonesia.

Menurut dia, Deptan akan membagikan dana tanggap darurat ke semua daerah yang membutuhkan, termasuk yang akan diprioritaskan kepada wilayah yang telah terjangkit wabah flu burung.

Sejumlah pedagang misalnya Suradi pedagang ayam mengaku, dalam pekan ini harga ayam potong maupun ayam petelur afkir justru cenderung naik. Harga ayam potong mencapai Rp 8.800-Rp 9.000 per kg.

Sedangkan ayam petelur afkir yang pada Senin pekan ini masih dijual Rp 17.000-Rp 18.000 per ekor, kemarin sudah mencapai Rp 20.000 per ekor. Meski pasokan sepi, dalam pekan ini Suradi mengaku masih bisa menjual ayam rata-rata 200 kg sehari.

37 *Deptan Butuh Anggaran Tambahan Rp 85 M*

Departemen Pertanian menetapkan cara pemusnahan unggas atau hewan secara selektif untuk mengurangi penyebaran wabah flu burung, karena dukungan anggaran yang terbatas.

Menteri Pertanian, Anton Apriyantono, menambahkan, pemusnahan massal pada radius tiga kilometer dari lokasi yang terserang flu burung membutuhkan biaya yang besar Rp 850 miliar.

Deptan mempunyai dana tanggap darurat Rp 104 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2005. Dana itu dipakai untuk menangani masalah yang terjadi dibidang pertanian dan peternakan. Kemudian untuk menangani flu burung, setidaknya separuh dari dana tanggap Deptan tersebut akan dipakai untuk menangani penyebaran flu burung.

Mentan menambahkan, risiko penyebaran virus flu burung tetap ada, meskipun dilakukan pada hewan-hewan yang terkena virus tersebut. Sebab, virus flu burung menyebar lewat udara. "Jadi, tidak mudah untuk memberantasnya secara total, karena bila satu burung terkena bisa terbang kemana-mana untuk menularkan pada hewan lainnya," ujarnya.

Namun demikian, dari pantauan, Deptan hewan yang terkena virus flu burung tahun 2005 jauh menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada Januari 2004, ada sekitar 2,5 juta unggas mati akibat flu burung kemudian jumlahnya terus menurun hingga akhir tahun 2004.

Pada awal 2005, jumlah unggas yang mati terserang virus flu burung naik kembali, dan mencapai puncaknya pada Maret 2005 yaitu sebanyak 390.000 ekor. Karena itu, pemerintah telah menyiapkan langkah pencegahan virus, mulai dari langkah pencegahan penyebaran virus, mulai dari langkah karantina hingga monitoring.

"Saya kira langkah itu sudah mulai menunjukkan hasil, dan bisa dilihat dari jumlah unggas mati yang semakin sedikit," ujar Mentan.



38 Sembilan Strategi Berantas Flu Burung

Departemen Pertanian menetapkan sembilan strategi untuk memberantas wabah flu burung (AI) yang kini berlangsung marak di Indonesia. Sembilan strategi tersebut dilakukan sebagai satu kesatuan, dengan melibatkan pelaksana di tingkat dinas kabupaten/kota. Sebab, dengan otonomi daerah, Deptan sudah tidak mempunyai "kepanjangan tangan" di daerah.

Dirjen Peternakan Deptan, Mathur Riady, menjelaskan, strategi pertama adalah pelaksanaan tindakan biosekuriti secara ketat. Langkah ini merupakan pertahanan pertama untuk mencegah penularan atau penyebaran penyakit, dengan karantina/isolasi dan dekontaminasi/desinfeksi. Biosekuriti ini mengaplikasikan manajemen peternakan secara bersih, dengan pengawasan ketat lalu lintas ternak dan alat-alat peternakan.

Strategi ke dua melakukan tindakan pemusnahan secara selektif di daerah tertular. Tindakan pemusnahan terbatas pada ternak yang sakit dan ternak sehat yang berpotensi tertular (satu kandang dengan ternak sakit).

Mathur mengatakan per satu Juli 2005 sudah 21 provinsi di Indonesia yang tertular virus flu burung. Provinsi yang baru tertular Sulsel, Jambi, Kaltim dan Sumut.

Strategi ketiga adalah vaksinasi (pengebalan), yang merupakan pertahanan kedua. Vaksinasi dilakukan terhadap seluruh populasi unggas di daerah yang tertular, dimana peternakan rakyat akan mendapat bantuan vaksin gratis dari Deptan.

Secara terpisah, Mentan Anton Apriyantono mengungkapkan, vaksin flu burung yang kini tersedia mencapai 140,2 juta dosis, dan seluruhnya untuk jatah daerah tertular flu burung. "Sebenarnya kebutuhan vaksin mencapai 194 juta dosis," ujarnya.

Mathur menjelaskan strategi ke empat untuk pemberantasan flu burung adalah, pengaturan secara ketat terhadap pengeluaran dan pemasukan unggas hidup, telur, dan produk unggas serta limbah peternakan.

Strategi ke lima adalah surveilans dan penelusuran ulang. Maka ini untuk menentukan hewan sumber infeksi sehingga bisa diputus mata rantai penyebaran flu burung.

Strategi ke enam, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat, melalui penyuluhan diberbagai media. Strategi ketujuh adalah penyisihan kembali untuk mengganti ternak yang dimusnahkan.

Sementara strategi ke delapan memusnahkan unggas secara menyeluruh di daerah tertular baru. Dan, strategi ke sembilan, memantau, pelaporan dan evaluasi.

39 Deptan Cairkan Kompensasi

Deptan telah mencairkan dana kompensasi sebesar Rp 34,87 juta bagi peternak babi dan unggas di Kabupaten Tangerang, Banten.

Mentan Anton Apriyantono mengatakan, dana sebesar Rp 34,87 juta tersebut untuk mengganti 32 ekor babi, terdiri 20 ekor dewasa dan 12 ekor anak babi serta 192 ekor itik asal peternakan di Kecamatan Legok dan Panongan, Tangerang yang dimusnahkan.

Menyinggung upaya penanggulangan virus flu burung, Mentan menyatakan, saat ini pihaknya telah menerapkan biosecurity secara ketat pada peternakan-peternakan unggas maupun babi yang dinilai bisa sebagai media penyebar virus tersebut.

Penerapan biosecurity tersebut, tidak hanya diberlakukan pada peternakan berskala besar namun juga peternakan berskala kecil atau dengan pemilikan unggas ayam kurang dari 15.000 ekor.

40 *Pemerintah Segera Larang Impor Daging dari AS*

Dirjen Peternakan Deptan Mathur Riady mengatakan, keputusan pemerintah segera melarang impor daging ternak dari AS mulai akhir Juni karena diketahui positif terjangkit penyakit sapi gila/Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE), keputusan larangan itu diambil berdasarkan laporan Laboratorium Internasional, Way Bridge Inggris.

Hasil dari tim emergency centre menyatakan, ternak di AS positif terjangkit BSE. Daging yang dilarang itu berasal dari semua jenis ternak antara lain sapi, kambing, domba dan sejenisnya termasuk kerbau dan rusa.

Mathur menambahkan berdasarkan laporan pihak AS, mereka juga mengakui bahwa telah ditemukan satu ekor sapi yang positif terjangkit BSE. Menurut dia sapi yang menderita penyakit sapi gila tersebut asli kelahiran AS dan tidak ada catatan dari negara lain. Sehingga dipastikan penyakit tersebut adalah penyakit lokal.

Hanya saja, menurut Mathur, daging sapi yang kini sudah beredar dalam pasaran tidak akan ditarik kembali atau masih bisa dijual. Namun, ujamya, daging sapi yang masih dalam perjalanan ke Indonesia dan yang sedang masuk Ditjen Peternakan masih menunggu keputusan Menteri.

Dihubungi terpisah Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (Apfindo) Budi Mulyana mengatakan, apapun yang dilakukan pemerintah pihaknya turut mendukung. Sebab, ujamya Apfindo sudah berkomitmen untuk menghasilkan daging-daging yang mempunyai standar kesehatan dan kualitas yang sesuai dengan peraturan pemerintah.

41 *Pengembangan Sawit di Perbatasan Terbuka Bagi Investor*

Mentan Anton Apriyantono menyatakan, program pengembangan perkebunan kelapa sawit di wilayah perbatasan Kalimantan dengan Malaysia terbuka bagi investor asing maupun dalam negeri.

Menurut Mentan Deptan merencanakan pengembangan perkebunan kelapa sawit di kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara petani di tanah air dengan negara tetangga.

"Siapa saja yang berminat mengembangkan kelapa sawit di kawasan perbatasan boleh saja menanamkan modalnya,"ujarnya. Anton menyatakan, investor dari luar negeri yang akan menanamkan modalnya bagi pengembangan kelapa sawit di kawasan

perbatasan harus bekerjasama dengan pemilik modal dari dalam negeri.

Menyinggung kebutuhan benih kelapa sawit yang masih harus diimpor, Mentan menyatakan selama belum bisa dipenuhi dari dalam negeri maka pemerintah mengizinkan untuk impor. Mengenai realisasi pengembangan kebun kelapa sawit di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia saat ini tengah dibahas dengan enam instansi terkait.

Kawasan perbatasan yang akan dijadikan daerah pengembangan komoditas perkebunan tersebut yakni Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas yang membentang dari arah barat ketimur Kalimantan Barat sepanjang 850 kilometer.

42 *2009, PDB Sektor Pertanian Rp 226 Triliun*

Selama periode 2005-2009, target PDB sektor pertanian dalam arti sempit (tidak termasuk perikanan dan kehutanan) meningkat dari 2,97% pada 2005 menjadi 3,58% pada 2009, atau rata-rata meningkat 3,29% per tahun.

Mentan Anton Apriyantono memberi perincian yakni pertumbuhan PDB subsektor tanaman pangan bervariasi antara tahun, berkisar 0,43% hingga 1,08% atau rata-rata 0,89% pertahun. Berdasarkan harga konstan tahun 2000 PDB subsektor tanaman pangan akan meningkat dari Rp 77 triliun pada 2005 menjadi Rp 79 triliun pada 2009.

PDB sektor hortikultura meningkat dari 2,86% pada 2005 menjadi 4,57% pada 2009 atau rata-rata meningkat 3,38% per tahun. Berdasarkan harga konstan

tahun 2000 PDB meningkat dari Rp 46 triliun pada 2005 menjadi Rp 53 triliun pada 2009. PDB sektor perkebunan meningkat dari 6,01% pada 2005 menjadi 6,49% pada 2009 atau meningkat rata-rata 6,27% per tahun. Berdasarkan konstan tahun 2000 PDB perkebunan akan meningkat Rp 48 triliun pada 2005 menjadi Rp 61 triliun pada 2009 sedangkan PDB sektor peternakan meningkat dari 4,11% pada 2005 menjadi 4,58% pada 2009 atau rata-rata 4,37% per tahun. Berdasarkan harga konstan 2000 PDB peternakan akan meningkat dari Rp 28 triliun pada 2005 menjadi Rp 33 triliun pada 2009.

Dengan perincian tersebut kebutuhan investasi subsektor tanaman pangan Rp 30,05 triliun dengan rata-rata Rp 5,08 triliun per tahun; hortikultura Rp 9,92 triliun dengan rata-rata Rp 1,98 triliun per tahun; perkebunan Rp 20,52 triliun dengan rata-rata Rp 4,10 triliun per tahun; dan peternakan Rp 16,12 triliun dengan rata-rata Rp 3,22 triliun per tahun.

43 *Tangerang Daerah Merah Flu Burung*

Pemerintah menetapkan Tangerang sebagai daerah merah (kawasan endemik) flu burung, sementara itu hasil tim peneliti Deptan di Tangerang dan daerah lainnya akan diumumkan pekan depan.

Mentan Anton Apriyantono mengatakan, Deptan menetapkan Tangerang sebagai daerah (zone) merah artinya kawasan itu adalah daerah endemik flu burung dengan penetapan itu, Tangerang yang menjadi pusat terjadinya kasus flu burung, harus diisolasi.



Deptan sudah mengirim tim investigasi ternak Deptan di Tangerang untuk menemukan hewan atau ternak mana yang bebas dan mana yang kena virus flu burung.

Mentan menyayangkan banyaknya pemberitaan diberbagai media masa yang menggambarkan seolah-olah serangan flu burung saat ini besar. padahal yang terjadi kecil yaitu di Sukabumi dan Banyumas dan hanya menyerang ribuan ekor.

Menurut dia dibandingkan dengan kasus yang terjadi pada 2004 yang menyerang juta ekor unggas kasus sekarang bisa terjadi penurunan. hal itu terjadi karena Deptan melakukan pengawasan dan penyuluhan secara terus menerus kepada masyarakat peternak.

Mentan juga menjelaskan penanganan flu burung tidak terlalu sulit. Cukup menerapkan prinsip bio security secara benar di peternakan. Selain itu para peternak juga menjaga prinsip itu selama masa pengiriman atau pun transportasi dan penjualan.

Kalau hal itu dilakukan tidak akan ada masalah, karena penerapan bio security yang benar adalah memusnahkan setiap hewan yang terkena virus flu burung kemudian kandang didesinfektan. Jadi resiko itu kecil kalau sistem itu dilakukan kita bisa menerapkan bio security dengan baik.

44 *Pemerintah Belum Keluarkan Kebijakan Isolasi Ternak*

Mentan Anton Apriyantono menegaskan, pemerintah secara resmi belum mengeluarkan kebijakan isolasi maupun larangan keluar masuk atau perdagangan

unggas dan babi di Tangerang akibat ditemukannya virus flu burung.

Mentan mengemukakan pemerintah terus mengisolasi upaya pencegahan dan penanggulangan flu burung. Juga melaksanakan kampanye upaya makan ayam yang dimasak secara benar.

"Kami sedang konsolidasi dengan Pemda Tangerang dan pemda lainnya yang daerahnya tertular virus flu burung. Setiap keputusan akan dikeluarkan sebijaksana mungkin agar tidak merugikan semua pihak, khususnya peternak," ujar Mentan.

Dalam UU Peternakan disebutkan pemerintah berhak mengisolasi daerah yang terkena virus flu burung dan berhak memusnahkan hewan yang tertular penyakit itu. Puluhan peternak unggas di wilayah Tangerang, mengeluhkan kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan flu burung dan pemberitaan yang merugikan peternak terutama unggas.

45 *Dana Penjamin Syariah Deptan Ditolak DPR*

Rencana Deptan memberikan penjaminan pembiayaan pertanian dengan pola syariah urung dilakukan. DPR RI menolak program tersebut dengan alasan melanggar UU APBN.

Mentan Anton Apriyantono, menegaskan, "Program ini macet di DPR karena mereka merasa hal itu melanggar UU APBN," ujarnya. Pola syariah menurut

Anton Apriyantono memiliki kemiripan dengan pola pertanian tradisional. Karena itu ia berharap dengan dana dari bank syariah, petani agribisnis yang selama ini sulit mengakses dana perbankan karena tidak mencukupi persyaratan bisa terbantu.

Mentan mengatakan, sebelum ada kebijakan penjaminan ini dana tersebut akan langsung disalurkan kepada petani. "Karena itu sebagian dana ini akan kita salurkan sesuai rencana semula," ujarnya. Mentan berpendapat dengan pola penjaminan, sebetulnya petani yang terbantu lebih banyak dibandingkan menyalurkannya secara langsung. Dengan hanya Rp 90 miliar, dana yang bisa dialokasikan kepada petani melalui kredit perbankan menjadi sepuluh kali lipat.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Fahri Andi Leluasa, menyatakan karena dana berasal dari sisa anggaran maka ada peraturan khusus. Total anggaran Deptan sebesar Rp 2,4 triliun dan disetujui Rp 2,3 triliun. Bila pada akhir tahun anggaran dana tersebut masih ada atau bersisa, perlu diperhitungkan bagaimana penggunaan dana itu selanjutnya.

Hama wereng juga menyerang beberapa daerah lain, namun dalam jumlah kecil, yakni di Sumbar seluas 104 ha, Bengkulu 24 ha, DKI Jakarta 8 ha, DI Yogyakarta 5 ha, Jateng 312 ha, Bali 6 ha, NTB 5 ha, NTT 55 ha, Kalsel 5 ha, Susel 10 ha, Banten 647 ha dan Gorontalo 104 ha.

"Kami terus memantau dan berupaya membantu antara lain dengan mengirimkan petugas, alat semprot dan obat pembasmi hama," ujar Mentan Anton Apriyantono.

Anton mengungkapkan, meluasnya serangan WBC antara lain disebabkan musim kemarau yang basah saat ini memungkinkan meningkatnya tingkat keperidian (jumlah telur yang dihasilkan) wereng karena kondisi iklim mikro sangat sesuai bagi pertumbuhan populasinya.

Berkaitan dengan hal tersebut, pelaksanaan harian Dirjen Tanaman Pangan Deptan, Sutarto Alimoeso, pengendalian dilapangan oleh petani dilakukan secara sensitif sejak munculnya serangan WBC beberapa petani telah melakukan 10X pengendalian dengan menggunakan pestisida.

Selain itu, ujar Mentan penggunaan pestisida yang kurang memenuhi kaidah 6 tepat yakni jenis, konsentrasi, dosis, waktu, cara dan saran, karena kepanikan petani.

46 *Hama Wereng Serang Jabar dan Jateng*

Sejumlah kawasan pertanian di provinsi Jabar dan Jateng diserang hama wereng batang coklat (WBC). Luas serangan WBC secara kumulatif 38.862 ha dan 3.238 ha diantaranya puso.

47 *Indonesia Bisa Bebas Tahun 2007*

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, Indonesia akan mampu mengakhiri wabah flu burung pada tahun 2007.

"Pemerintah Indonesia memiliki anggaran terbatas sehingga wabah flu burung tidak dapat segera diatasi, ujar Mentan.

Awal bulan ini, keempat di Asia yang tercatat terjangkit wabah flu burung. Virus flu burung di Indonesia telah menelan seorang bapak dan dua putrinya setelah positif terkena virus itu.

Pemerintah Indonesia telah mengisolasi dan melakukan pengawasan peternakan unggas. Selanjutnya mengenyahkan virus flu burung sebagai sumber penyakit. Virus flu burung telah menyangkiti populasi ternak di Asia sejak tahun 2003. Jutaan unggas terbunuh akibat penyebaran virus tersebut. Begitu pula tercatat 60 orang meninggal dunia yang sebagian besar terjadi di Vietnam dan Thailand.

Kini kematian mengetahui manusia yang terjangkit virus dari unggas. Para ahli kedokteran hewan juga mulai terasa khawatir akan meluas penularannya dari manusia ke manusia. Penularan dengan cara seperti ini berpotensi membunuh jutaan manusia di dunia.

48 *Juli, Industri Ayam Rugi Rp 7 Miliar*

Anjloknya penjualan ayam hingga 50 % membuat penjual pakan, bibit ayam dan obat ternak turun drastis. Untuk menyelamatkan industri, pemerintah memperbaiki cara penanganan isu flu burung. Misalnya dengan mempercepat pengungkapan hewan yang menularkan AI kepada Iwan S dan dua putrinya, serta lebih banyak mensosialisasikan keamanan ayam untuk konsumsi.

Ditempat terpisah Mentan Anton Pariyanto, mengatakan pemerintah berhak memberi sanksi jika Pemda Tangerang menolak wilayahnya ditetapkan sebagai 'zone merah' endemi flu burung, yang harus diisolasi. Berdasarkan Undang-Undang No 4/1984 tentang wabah penyakit menular, pemerintah berhak menetapkan suatu daerah sebagai daerah endemi, mengisolasinya, dan memusnahkan ternak yang terinfeksi.

"Jika Pemda Tangerang keberatan-meski dengan dalih isolasi dapat merugikan daerah- pemerintah dapat memberi sanksi. Berdasarkan UU Penanganan Penyakit, pemerintah punya kewenangan ini," ujar Mentan.

Anton menjelaskan Tangerang ditetapkan sebagai 'zone merah', karena dua alasan yaitu pertama ada orang yang meninggal karena virus flu burung. Kedua, karena jumlah babi di Tangerang positif flu burung. Babi-babi ini dikhawatirkan bisa menghasilkan virus ganas AI yang menyerang manusia.

49 *Deptan Segera Batasi Impor Buah*

Menurut Dirjen Hortikultura Deptan A. Dimayati, pengaturan impor buah tidak hanya untuk melindungi petani nasional, tetapi juga konsumen. "Dua impor porsi kecil dibandingkan total produksi nasional, yaitu 5%. Tapi, porsi itu pengaruhnya besar, menekan harga jual lokal. Maka itu, kami akan membatasi, misalnya buah yang boleh masuk maksimal 3 bulan dari saat dipanen, ujamnya.

Dimiyati mengatakan, buah impor yang masuk Indonesia ada yang sudah 2 tahun disimpan digudang pendingin. Meski ditangani secara baik, penyimpanan yang terlalu lama pasti menurunkan kualitas. Buah impor tersebut juga belum tentu aman dikonsumsi.

Atas dasar itu, draf regulasi yang disiapkan Ditjen Hortikultura dan Badan Karantina Deptan akan mengatur pula soal keamanan produk. Misalnya, kandungan residu pestisida tidak boleh melebihi batas maksimum residu yang ditetapkan pemerintah.

50 *Daya Saing Jamur Indonesia Turun*

Jamur digunakan untuk pangan maupun nutraceutical (makanan dan minuman untuk pencegahan dan pengobatan penyakit). Dari sisi nilai, menurut peneliti Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bioindustri Henky Isnawan, pertumbuhan pasar jamur nutraceutical sangat tinggi. Nilai perdagangan globalnya tahun 1999 US\$ 38,2 miliar, naik menjadi US\$ 57,9 miliar pada 2002, dan diperkirakan meningkat menjadi US\$ 74,7 miliar tahun 2007. Di Amerika Serikat, 40% nutraceutical digunakan sebagai terapi alternatif.

Menurut Dirjen Hortikultura Deptan Ahmad Dimiyati mengatakan, tahun 2000 volume ekspor jamur Indonesia (mayoritas olahan) 29,93 juta ton. Namun, tiga tahun berikutnya merosot menjadi 25,93 juta ton, 18,23 juta ton dan 3,66 juta pada 2000 menjadi US\$ 1,72 juta tahun 2003. Sedangkan impor jamur Indonesia cenderung naik. Jika pada 2000 impor hanya 1,47 juta ton (US\$ 0,39 juta), pada 2003 naik menjadi 1,54 juta ton (US\$ 0,68 juta).

51 *Pemusnahan 24 Kontainer Gagal*

Deptan gagal memusnahkan daging sapi ilegal sebanyak 24 kontainer. Seluruh daging yang kondisinya sudah membusuk itu kini masih tersimpan di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

Menurut Kepala Badan Karantina Deptan Syukur Iwantoro, ke 24 kontainer daging sapi ilegal itu seharusnya dimusnahkan pada pekan pertama Juli 2005 di lokasi baru di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Pada Mei 2005, seluruh daging ilegal yang merupakan sisa impor tahun 2004 itu kembali gagal dimusnahkan. Daging ilegal 24 kontainer itu setiap kontainer berukuran 20 kaki berisi 26 ton daging-adalah sisa dari 80 kontainer daging ilegal yang masuk ke Indonesia sejak Mei 2004. Pada Januari 2005, Deptan melalui Balai Karantina Hewan Kelas I Tanjung Priok Jakarta berhasil memusnahkan sebagian besar daging, yaitu 56 kontainer, berlokasi di Rawa Banteng, Cibitung. Menteri Pertanian Anton Apriyantono berjanji segera memusnahkan daging-daging ilegal itu, baik dengan cara membakar atau mengubur.

Daging-daging sapi impor tersebut dianggap tidak sah (ilegal) karena berasal dari sejumlah negara yang belum terbebas dari PMK (penyakit mulut dan kuku) dan penyakit sapi gila, seperti Argentina, Brasil, Uruguay, Kanada, Amerika Serikat, dan India.

Kelima negara itu oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (International Office for Epizootic Diseases-OIE) dinyatakan belum bebas PMK atau sapi gila. Menurut ketentuan UU Karantina, produk peternakan dari negara yang belum bebas penyakit hewan tidak boleh masuk ke Indonesia, karena berpotensi menularkan penyakit ke ternak maupun manusia.



52 *RI Pasok 0,9% Kebutuhan Jamur Dunia*

Indonesia baru mampu memasok 0,9% kebutuhan jamur dunia, padahal budidaya jamur sangat mudah dikembangkan didalam negeri, apalagi lahan untuk itu di Indonesia juga tersedia. Sementara China memasok 33,2%. Berdasarkan data yang ada di Ditjen Hortikultura, pada 2000 volume ekspor jamur Indonesia mencapai 29,33 juta ton dengan nilai mencapai US\$ 3,66 juta. Sementara pada 2003 ekspor menurun mencapai 16,1 juta ton dengan nilai US\$ 1,72 juta. Sebaliknya pada 2000 impor jamur mencapai 1,47 juta ton dengan nilai US\$ 0,39 juta dan pada 2003 volume impor naik menjadi 1,54 juta dengan nilai US\$ 0,68 juta.

Dirjen Hortikultura Deptan, Ahmad Dimiyati dalam Workshop tentang Pengembangan Produk dan Industri Jamur Indonesia, mengatakan produksi jamur Indonesia rendah dan volumenya terus menurun, padahal jamur sangat potensial menjadi sumber devisa Indonesia.

53 *Daging Ilegal Segera Dimusnahkan*

Menteri Pertanian Anton Apriyantono menyatakan pihaknya akan segera memusnahkan sisa daging impor ilegal yang telah menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta selama lebih dari satu tahun. "Secepatnya akan dimusnahkan, maka akan merugikan," ujarnya.

Saat ini, sebanyak 24 kontainer daging ilegal dari Brasil dan India, setiap kontainer berisi 26 ton, masih

menumpuk di Terminal Petikemas Internasional (JITC) Pelabuhan Tanjung Priok dalam keadaan membusuk dan belum dimusnahkan oleh Badan Karantina Deptan.

Ke-24 kontainer daging tersebut merupakan sisa dari 80 peti kemas yang masuk ke Indonesia pada tahun lalu dan sebanyak 53 kontainer telah dimusnahkan serta sebagian diekspor. Menurut Mentan metode pemusnahan daging tersebut mirip dengan pemusnahan babi dan unggas yang terkena virus flu burung yakni dibakar dalam sebuah lubang besar kemudian di kubur.

Namun, tambahnya, pembakaran ini tidak bisa dilakukan sembarangan dengan alasan daging itu kemungkinan mengandung berbagai jenis penyakit karena sudah membusuk.

54 *Arah Pangan 2025, Fortifikasi Beras*

Kebutuhan pangan pokok dari 273,7 juta penduduk Indonesia pada tahun 2025 masih tetap tergantung pada beras. Karena itu, selain persoalan pemenuhan volume kualitas sumber karbohidrat dengan melakukan fortifikasi beras.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan masalah produksi pangan pada tahun 2025 ditanggulangi dengan ekstensifikasi dan peningkatan produktivitas padi. Peningkatan produktivitas dilakukan dengan menggunakan bibit unggul dan teknologi yang tepat. "Dengan melihat China mampu memproduksi padi hibrida dengan produktivitasnya 12 ton per ha, sebenarnya kita

masih bisa meningkatkan produktivitas padi. Riset yang ada sedang berjalan. Saya sudah minta agar ada varietas baru," ujarnya.

Mengenai kemungkinan penggunaan benih transgenik, Mentan mengatakan, pihaknya belum meloloskan ataupun menolak. Penggunaan produk transgenik sangat tergantung dari evaluasi keamanan. Dari evaluasi keamanan ini akan ditentukan apakah boleh digunakan atau tidak.

55 *Mentan Pertanyakan Izin 12 PG Rafinasi*

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mempertanyakan izin 12 pabrik gula (PG) rafinasi yang dikeluarkan besar Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Gula rafinasi ini digunakan untuk industri makanan, minuman dan farmasi. Menurut Mentan kebutuhan didalam negeri hanya 7000-8000 ton per tahun. Sedangkan tiga perusahaan gula rafinasi yang ada-PT Angel Product, PT Jawa Manis Rafinasi dan PT Sentra Usaha Tama Jaya-kapasitas produksi pabriknya 900.000-950.000 ton per tahun.

"Sekarang ketiga perusahaan itu sudah dapat mencukupi kebutuhan gula rafinasi di dalam negeri. Jadi, pemberian izin 12 perusahaan pengolah gula rafinasi akan membuat pasokan gula rafinasi berlebihan," ujar Mentan.

Oleh karena itu, ujarnya Deptan akan membahas permasalahan tersebut dengan BKPN serta Ditjen Industri

Kimia Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian. "Sebab peningkatan kapasitas produksi itu akan menciptakan persaingan tidak sehat terhadap industri gula, sehingga mengganggu program revitalisasi pergulaan nasional, ujar Mentan.

Untuk mencegah kemungkinan beredarnya gula rafinasi ke pasar umum, Wakil Sekjen Ikatan Gula Indonesia (Ikagi) Adig menyarankan agar setiap izin pendirian atau perluasan produksi gula rafinasi atau impor raw sugar wajib disertai kontrak penjualan dengan industri makanan dan minuman yang akan menggunakannya.

56 *Goodyear Jual Kebun Karet Ke Bridgestone*

Departemen Pertanian menyetujui penjualan kebun karet milik PT Goodyear Indonesia Tbk di Sumatera Utara kepada Bridgestone Cooperation melalui anak perusahaannya PT Bridgestone Tire Indonesia.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengaku telah merekomendasikan penjualan kebun karet milik PT Goodyear Indonesia kepada investor asing. Sebab investor lokal tiada berminat terhadap kebun karet milik Goodyear. Memang ada kabar sejumlah investor lokal berminat, tetapi setelah ditelusuri tidak ada investor lokal yang menawarkan," ujarnya.

Berdasarkan catatan investor daily, PT Goodyear Indonesia mengoperasikan pabrik pengolahan karet alam berikut perkebunan karet di Sumut (PT Goodyear Sumatera Plantations), tepatnya di Bandar Pulau, Asahan dan Dolok Batu Nagari, Simalunggun.



57 *Mentan dan Gubernur Kampanye Makan Ayam*

Menteri Pertanian Anton Apriyantono bersama Gubernur Jabar H. Danny Setiawan dan masyarakat, melakukan santap ayam di Kec. Cicurug Kab. Sukabumi, Kamis (4/8). Melakukan kampanye mengkonsumsi daging ayam sehubungan dengan merebaknya kasus flu burung. Menurut Mentan, virus flu burung tidak akan menular dari makanan secara langsung.

Kasus-kasus flu burung yang muncul di Desa Tenjolaya Kec. Cicurug Kab. Sukabumi, di nilai masih relatif masih kecil dibandingkan serangan penyakit yang sama pada tahun 2003, 2004, dan awal 2005. Menurut Gubernur kasus flu burung dapat juga di sebabkan akibat lingkungan yang kurang sehat, sedangkan Pemerintah sudah berupaya memberikan seoptimal mungkin kepada masyarakat termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai.

Untuk mengantisipasi terjadinya kasus flu burung Pemerintah memberikan vaksinasi kepada 16 Kecamatan yang ada di Kab. Sukabumi dengan sasaran 360.000 ayam. Selain itu Mentan memberikan uang kompensasi bagi 815 ayam dan entok milik salah satu warga di Kab. Sukabumi Sebesar Rp 16 juta lebih.

58 *Target Swasembada Gula Mundur*

Target swasembada gula nasional, yang semula dipatok oleh Departemen Pertanian akan tercapai tahun 2007, kini dikoreksi menjadi tahun 2009. Koreksi tersebut

kesimpulan rapat Dewan Gula Indonesia (DGI). Menurut Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Kerjasama Internasional Delima Azahari mempertimbangkan adanya perubahan sejumlah indikator dan asumsi sebagai faktor pendukung rencana swasembada gula.

Delima menyatakan, swasembada gula bukan berarti 100% konsumsi bisa dipenuhi dari produksi gula nasional, setidaknya 92% konsumsi gula nasional sudah mampu dipenuhi produksi domestik.

Ahmad Dimyati, Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian mengungkapkan perkembangan dana pendukung tidak tercapai atau dibawah sasaran, sedangkan dana sangat menentukan swasembada gula. Untuk itu Departemen Pertanian berupaya menggalangkan dana alternatif dari investor domestik maupun investor asing.

59 *Hama Wereng Menyerang*

Hama wereng melanda sentra padi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Munculnya hama ini terkait dengan musim kemarau yang masih basah sehingga cocok untuk perkembangbiakan wereng. Serangan hama itu cenderung meningkat karena terjadi migrasi dari satu daerah ke daerah lainnya.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, hujan yang sekarang ini masih berlangsung menjadikan udara lembab di sejumlah areal sawah. Keadaan ini menjadikan hama wereng mudah berkembang biak. "Pihaknya sudah menurunkan tim untuk



meneliti penyebaran wereng itu. Sepertinya terlihat ada jalur penyebaran yang jelas, mulai dari daerah Sragen (Jawa Tengah) kemudian kini sudah mencapai Cirebon (Jawa Barat)," ujar Mentan. Dalam laporannya kepada Menteri Pertanian, Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan Sutarto Alimoeso menyebutkan, hingga Juli luas areal yang terserang wereng 38.862 ha, dengan 3.238 ha di antaranya puso. Serangan ini terjadi di 13 provinsi, serangan paling luas di alami Jawa Tengah (27.406 ha) dan Jawa Barat (10.171 ha). Jumlah ini diperkirakan sudah bertambah, memasuki minggu keempat.

Serangan di Jawa Barat dan Jawa Tengah dilaporkan mengalami peningkatan. Peningkatan itu diakibatkan oleh migrasi wereng baik jarak dekat maupun jarak jauh. Secara umum penyebab munculnya serangan itu adalah akibat musim kemarau yang basah. Hal ini memungkinkan meningkatnya jumlah telur yang dihasilkan karena kondisi iklim mikro sesuai untuk pertumbuhan kepadatan populasi wereng. Dominasi pamanaman satu varietas padi dalam jangka lama hampir 20 tahun seperti IR 64 yang sudah lama dilepas dan masih disenangi petani juga menjadi penyebab. Kemampuan adaptasi wereng memungkinkan varietas yang semula tahan menjadi berkurang ketahanannya. Apalagi kini petani cenderung menanam padi terus menerus karena air tersedia dan iklim sesuai.

Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir, mengatakan situasi yang lembab menyebabkan pembiakan wereng lebih cepat cuaca sekarang memungkinkan hal itu. Perlu kewaspadaan semua pihak baik petani maupun aparat agar tidak makin menyebar. Dari laporan terakhir hama wereng yang semula di Jateng sudah masuk ke Cirebon dan Indramayu. Ia mengatakan serangan hama wereng sudah lama tidak ada tetapi pada musim ke dua atau gadu tahun

ini kembali muncul. Dibandingkan dengan hama lainnya pada musim gadu tahun ini hama dan penyakit tanaman padi didominasi oleh wereng.

60 *Produktivitas Benih Padi tak Cukupi Kebutuhan 2025*

Menteri Pertanian Anton Apriyantono menyatakan, produktivitas benih padi pada saat ini masih rendah sehingga dikhawatirkan tak akan mampu mencukupi kebutuhan pangan bangsa Indonesia pada 2025.

"Peningkatan produksi tak bisa mengimbangi jumlah penduduk, akan terjadi kekerungan pangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan produktivitas benih," selain meningkatkan produktivitas tanaman padi, perlu diimbangi pula dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, serta penggunaan varietas tanaman yang memiliki ketahanan tinggi terhadap serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Menurut Mentan petani selian masih menggunakan benih yang produktivitasnya rendah juga varietasnya yang tidak tahan serangan hama, yakni sekitar 40 persen sehingga perlu dilakukan pergantian benih yang berkualitas.

Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Deptan Achmad Suryana menyatakan, untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk Indonesia pada 2025 bisa dilakukan dengan penurunan konsumsi beras di masyarakat. Upaya menurunkan tingkat konsumsi

beras di masyarakat, menurut mantan Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan itu dapat dilakukan dengan menggalakan kembali program penganeekaragaman atau diversifikasi pangan.

"Terutama terhadap makanan pokok diupayakan agar masyarakat tidak lagi berganrung pada beras namun bisa jagung, ubi, ketela, ataupun yang lainnya."

61 *Serangan Hama Padi Meningkat*

Departemen Pertanian mengungkapkan kerugian karena kehilangan hasil akibat serangan OPT dalam 10 tahun terakhir mencapai 130.349 ton Gabah Kering. Jumlah itu setara dengan Rp 225,2 miliar.

Sementara itu menyinggung luas serangan ketiga OPT tersebut selama 2005, untuk WBC selama Januari-Agustus mencapai 53.590 ha dengan kerusakan berat atau puso 3.438 ha atau lebih tinggi dibandingkan periode sama pada tahun 2004. Serangan WBC tahun ini terutama di Provinsi Jawa Tengah mencapai 32.424 ha dengan puso 2.923 ha sedangkan di Jawa Barat serangan seluas 15.460 ha yang mana 435 ha diantaranya puso.

Menurut Mentan, peningkatan serangan WBC tahun ini terjadi karena kondisi iklim mikor yang sangat cocok untuk perkembangan hama tersebut, petani masih menanam varietas yang rentan terhadap serangan hama serta pola tanam dalam satu tahun hanya padi tanpa ada selingan. Selain itu penggunaan pestisida yang tidak memenuhi enam tepat yakni tepat jenis, waktu, dosis, konsentrasi, sasaran dan cara penyemprotan biotipe

hama. Sementara itu luas serangan tikus secara nasional selama Januari-Juli 2005 mencapai 60.196 ha diantaranya 1.371 ha mengalami puso yakni di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Lampung.

62 *Deptan Setuju Koptan Salurkan Pupuk*

Departemen Pertanian mendukung usulan agar produsen pupuk juga melibatkan koperasi tani (Koptan) maupun organisasi tani sebagai penyalur ataupun distributor bahan penyubur tanaman tersebut hingga ketingkat petani.

Mentan Anton Apriyantono menyatakan, saat Koptan maupun organisasi tani tidak pernah dilibatkan dalam sistem distribusi pupuk. Oleh karena itu mekanisme distribusi pupuk perlu diubah, yakni Lini IV yang saat ini dikabupaten sebaiknya langsung ditingkat desa dan melibatkan koperasi tani ataupun organisasi tani.

Menurut Mentan, jika koperasi tani ataupun organisasi tani dilibatkan dalam distribusi pupuk, penyalurannya akan lebih bertanggung jawab sehingga sarana produksi pertanian tersebut benar-benar bisa sampai ketangan petani saat dibutuhkan. "Saat ini kita tengah membentuk tim untuk membebaskan mekanisme distribusi pupuk tersebut," ujar Anton.

63 *Indonesia Bebas Flu Burung 2007*

Indonesia baru bisa terbebas dari flu burung pada 2007 jika proses penanganannya seperti yang dilakukan seperti selama ini. Direktur Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Mathur Riady



Penanggulangan Flu Burung

mengatakan, Indonesia bisa terbebas dalam waktu hanya enam bulan jika penanganannya dilakukan dengan pemusnahan.

"Namun pemusnahan membutuhkan dana yang sangat besar karena berkaitan dengan kerugian para peternak" kata Direktur Jenderal Peternakan Departemen Pertanian di Jakarta. Penanganan flu burung yang dilakukan selama ini adalah dengan vaksinasi, isolasi atau karantina peternakan dan penelusuran atau pengecekan ulang.

Sementara itu Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, Pemerintah memutuskan akan memusnahkan unggas dan ternak milik sejumlah peternak di tiga propinsi yang terkena wabah flu burung. Ketiga propinsi tersebut adalah Banten (khususnya Tangerang), Sumatera utara dan Jambi. Tangerang

merupakan giliran pertama. "Khususnya di Legok, Tangerang. Pemusnahan unggas dan ternak akan dilakukan pada kawasan dalam radius tiga kilometer dari peternakan yang terkena virus tersebut. Ini terkait dengan penyebaran virus yang menggunakan media udara.

Lebih lanjut dikatakan Menteri Pertanian, Pemerintah akan memberikan ganti rugi kepada peternak yang ternaknya dimusnahkan. Sumber ganti rugi berasal dari dana darurat yang semua dialokasikan untuk membeli bibit tanaman, ternak, penanggulangan banjir dan kekeringan yang jumlahnya mencapai Rp. 104 miliar. " Separuh dana tersebut akan digunakan untuk penanggulangan flu burung" ujarnya.

64 *Pelaksanaan Sumpah PNS Lingkup Barantan*

Bertempat di Auditorium Mini Gd F Kanpus Deptan, pada 15 Juli 2005 Kepala Barantan, Ir. Syukur Iwantoro, MS, MBA, melaksanakan sumpah/janji bagi 208 orang PNS lingkup Barantan, yang disaksikan oleh Sekretaris Barantan, Kapus TM Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan, Kabag Kepegawaian dan Perlengkapan dan Kasubbag Kepegawaian Barantan.

Pelaksanaan sumpah/janji PNS dilakukan sesuai dengan UU No.8 Th 1974 Jo UU No.43 Th 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian pasal 26 (1) yang menyebutkan, bahwa setiap CPNS pada saat pengangkatannya menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji. Hal ini dilakukan agar para PNS tidak

melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan.

Menurut Kepala Barantan, sesungguhnya pelaksanaan sumpah PNS kali ini sangatlah terlambat seharusnya pelaksanaan sumpah/janji dilaksanakan pada saat CPNS menerima SK Pengangkatan sebagai PNS (SK Pengangkatan 100%) setelah dinyatakan lulus dalam pelatihan Prajabatan. Keterlambatan ini terjadi akibat belum adanya kesiapan kita pada Pasca Otonominasi Daerah, dimana pada masa sebelumnya pelaksanaan sumpah PNS dilakukan pada setiap Kanwil di seluruh Indonesia.

Dalam kata sambutannya, Kepala Barantan berpesan agar seluruh PNS yang telah disumpah perlu mawas diri agar tidak terjebak pada kondisi yang tidak diharapkan. Reformasi, Birokrasi dan gerakan anti KKN telah digulirkan oleh Pemerintah semoga para PNS/Pejabat lingkup Barantan mampu beradaptasi pada perubahan yang terjadi saat ini.

65 *Workshop dan Pelantikan PPNS Lingkup Barantan*

Bertempat di Hotel Raddin Ancol Jakarta Utara, Kepala Barantan, Ir. Syukur Iwantoro, MS, MBA, pada tanggal 12 Juli 2005 membuka Pelaksanaan Workshop dan Pelantikan PPNS lingkup Barantan.

Peserta PPNS 250 orang yang terdiri dari PPNS, Kepala UPT selaku atasan Penyidik, dan sekaligus melakukan Pelantikan bagi 30 orang PPNS angkatan ke V lingkup Barantan yang disaksikan Kapus Diklat Reskrim Polri, Pejabat dari Kejaksaan Agung RI, Pejabat dari Dep.

Kehakiman dan HAM RI dan seluruh Pejabat lingkup Barantan.

Fungsi PPNS semakin vital karena adanya pasar Global dan kecanggihan teknologi. Proses penegakan hukum perkarantinaaan tidak saja menuntut adanya dukungan perundang-undangan yang tegas dan lugas akan tetapi menuntut adanya penegakan hukum yang Cerdas dan Profesional. PPNS sebagai penegak hukum teknis perkarantinaaan harus mampu secara cerdas mengamati proses tranformasi pasar sesuai dengan perundang-undangan. Pemalsuan dokumen yang sering terjadi saat ini harus dapat dicegah.

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PPNS lingkup Barantan yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan Reserse dan Kriminal Megamendung Puncak Bogor, merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Diklat Penyidik PNS yang dilaksanakan Barantan bekerjasama dengan Biro BINPOLSUS dan PPNS Mabes Polri .

Diharapkan para PPNS yang telah mengikuti pengambilan sumpah dapat segera menjalankan tugasnya sebagai Penyidik di unit kerja dan wilayah kerja masing masing.

66 *Masalah Pangan Bukan Pada Ketersediaannya*

Masalah gizi buruk dan kerawanan pangan justru terjadi saat ketersediaan pangan, khususnya beras, secara nasional dinyatakan surplus. Namun dalam kondisi ini, ketahanan pangan nasional dianggap sudah baik. Kejadian itu menyadarkan semua pihak bahwa masalah pangan yang dihadapi saat ini bukanlah pada

ketersediaannya . Namun pada kemampuan rumah tangga untuk memperolehnya. Hal tersebut dikemukakan Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, Kaman Nainggolan, pada acara Dialog dan Renungan Keprihatinan" Memperkuat Solidaritas Melawan Kelaparan" di Jakarta.



Pangan bukan pada ketersediaannya saja

Dijelaskan Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, masalah gizi buruk dan kerawanan pangan telah berlangsung lama dan terus menerus. Kondisi ini adalah cerminan dari lemahnya ketahanan pangan di tingkat keluarga, yang menurut Undang-undang No. 7/1996 tentang Pangan, harus diwujudkan oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat.

Kemiskinan, kegagalan panen, ketidaktahuan dan ketidakpedulian merupakan penyebab utama meluasnya kasus gizi buruk di Indonesia. Masalah ini juga terjadi pada masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik dipedesaan maupun perkotaan yang terpaksa hidup dalam kemiskinan, kekurangan pangan dan gizi serta terancam wabah penyakit menular.

Untuk itu, Kaman Nainggolan mengajak semua pihak untuk menyatukan gerak dan langkah dalam satu wadah, yakni membentuk aliansi independen, yang

beranggotakan pihak yang peduli terhadap masalah gizi buruk dan kerawanan pangan yang menghormati prinsip dan kreativitas masing-masing. Wadah tersebut akan diberi nama Aliansi Nasional Melawan Kelaparan. Melalui wadah tersebut diharapkan penanggulangan masalah gizi buruk dan rawan pangan dapat semakin meluas dan efektif.

67 *Apresiasi Keortalaan*

Penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung saat ini begitu dinamis, menurut aparaturnegara harus lebih mampu mengantisipasi terhadap setiap perubahan yang terjadi. Untuk itu dibutuhkan penyelenggara pemerintahan yang baik dan profesional dibidangnya, guna mendukung tercapainya apa yang direncanakan dan di cita-citakan menuju pemerintahan yang baik (good governance).

Antisipasi terhadap perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis tersebut, tidak terlepas dari kebutuhan akan wawasan dan pemahaman terkait dengan aspek organisasi dan emtode (OM). dewasa ini banyak hal yang terkait dengan aspek OM, muncul dilapangan sebagai permasalahan dan menjadi pertanyaan, dikarenakan ketidakjelasan dan kesimpangsiuran pemahaman terhadap substansi yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut guna meningkatkan pemahaman penyelenggaraan pemerintahan serta untuk memberikan penyegaran guna menambah wawasan dan pedalaman pemahaman

terhadap aspek OM kepada para pejabat yang membidangi fungsi keortalaan di lingkungan Departemen Pertanian, maka Sekretariat Jenderal C.q Biro Organisasi dan Tata Usaha menyelenggarakan Apresiasi Keortalaan pada 24 s/d 25 Juni 2005 bertempat di hotel Prameswari Jl. Cipanas Km. 81,2 Ciajur-Jawa Barat.

Materi disampaikan oleh Tim dari Kementrian PAN yang meliputi Peran dan Fungsi Organisasi dan Metode (OM) dalam penyelenggaraan Pemerintahan; penjelasan terhadap ketentuan INPRES No. 5 Tahun 2004 dan tindaklanjutnya; serta penetapan kinerja dan penerapannya di lingkungan instansi pemerintah sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Acara tersebut dihadiri oleh para pejabat lingkup Biro Organisasi dan Tata Usaha dan para pejabat yang membidangi fungsi keortalaan Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian.

Cianjur. Minyak kelapa murni (VCO) merupakan minyak kelapa yang dibuat dari kelapa segar (bukan kopra), tanpa proses kimiawi dan tidak menggunakan panas tinggi. Keunggulan VCO, memiliki kandungan asam laurat mencapai 48-55% dan asam lemak bebas sangat rendah (FFA) 0,01%. VCO, selain digunakan sebagai bahan baku kosmetika dan farmasi, juga sangat bermanfaat menangkal virus, bakteri dan patogen lain, serta membangun sistem kekebalan tubuh seperti halnya ASI.

Pure Buah PURESSO adalah produk intermediate, berasal dari buah mangga, sirsak, jambu biji, dan strawberry yang diproduksi oleh CV. Promindo Utama Cirebon. Pabrik mini berkapasitas maksimum 500 kg buah/jam ini juga mulai memproduksi puree buah untuk aneka bahan baku produk olahan lanjutan.

68 *Peluncuran Virgin Coconut Oil dan Puree Buah oleh Mentan*

Pada pembukaan Agro and Food Expo tanggal 19 Mei 2005 lalu, Mentan sekaligus meluncurkan dua buah produk hasil penelitian BB-Pasca Panen, Balitbangtan berupa minyak kelapa murni atau Virgin Coconut Oil (VCO) dengan merek Laurica dan puree buah dengan nama Pureesso. Diharapkan peluncuran produk ini dapat memacu pengembangan teknologi pengolahan ditengah-tengah petani.

Laurica diproduksi Koperasi Mutiara Baru Cianjur, bekerjasama dengan Balitbangtan (BB-Pascapanen dan BPTP Jabar) dan Disperindag Kab.

69 *Peringatan Hari Krida Pertanian Ke XXXIII*

Bertempat di lapangan upacara Kanpus Departemen Pertanian, Menteri Pertanian memimpin upacara peringatan Hari Krida Pertanian ke XXXIII. Hari Krida Pertanian merupakan hari bersyukur, hari berbangga hati dan sekaligus hari mawas diri serta hari Dharma Bakti yang setiap tahunnya diperingati segenap masyarakat, pegawai dan pengusaha yang bergerak di sektor pertanian, sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan nikmatNya.



Menteri Pertanian dalam sambutannya mengatakan pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta seluruh masyarakat, dan



Hari Krida Pertanian Ke XXXIII

banyaknya tantangan yang dihadapi merupakan awal dicanangkannya revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan oleh Presiden tanggal 11 Juni 2005.

Pencanangan tersebut merupakan momentum strategis dalam merumuskan kebijakan, strategi serta program operasional pembangunan pertanian di lingkungan internal Departemen Pertanian untuk menumbuhkan sikap profesionalisme dan "Interpreneur Beaucrates", serta peningkatan efisiensi kerja melalui penerapan administrasi modern.

Pada kesempatan tersebut Menteri Pertanian, Sekretaris Jenderal Inspektorat Jenderal dan Kepala Badan Karantina Pertanian melaksanakan penyematan Tanda Kehormatan "Satyalancana Karya Satya" kepada 120 PNS yang telah melaksanakan pengabdian secara terus menerus, kesetiaan dan kejujuran, kecakapan dan kedisiplinan sesuai dengan Keppres Nomor 017/TK/2005.

70 Eksistensi Pengkajian Teknologi Pertanian di Irian Jaya Barat

Pengkajian teknologi Pertanian Irian Jaya Barat (PTP-IJB) merupakan cikal bakal Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Balitbangtan, yang berlokasi di Kabupaten Manokwari, Irian Jaya Barat. Sejak awal tahun 2005, PTP-IJB dipandang telah berhasil melaksanakan sosialisasi tentang keberadaanya dan diberi kepercayaan untuk memberikan solusi/tanggapan terhadap kesuksesan program pengembangan padi di Kabupaten Manokwari. Bahkan PTP IJB secara khusus di minta oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan IJB agar lebih banyak memainkan perannya, khususnya untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam upaya perluasan areal tanam padi dengan menyumbangkan paket teknologi tepat guna spesifik lokasi. Terutama sejak Bupati mencanangkan Kabupaten Manokwari sebagai sentra produksi padi bagi IJB. Sebagai realisasi dari pencanangan tersebut, pada tanggal 7 Mei 2005 lalu dilakukan kegiatan panen raya padi di distrik Oransbari pada lahan seluas 250 Ha, dengan menghasilkan produksi 5 ton/Ha varietas Cisantana yang di hasilkan oleh Balitpa.

71 Peningkatan Kinerja Melalui Penyediaan Teknologi Tanaman Pangan

Puslitbang Tanaman Pangan diharapkan lebih meningkatkan perannya dalam penyediaan inovasi teknologi, sesuai arahan Kepala Balitbangtan saat

membuka Raker Puslitbangtan di Bogor tanggal 30 Juni 2005 lalu. Dalam program revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan, yang dicanangkan Presiden RI baru-baru ini, telah ditetapkan bahwa padi, jagung dan kedelai menjadi komoditas prioritas dalam kebijakan pengembangan produk pertanian baru. Komoditas tersebut merupakan mandat yang diemban Puslitbangtan.

Raker yang bertujuan untuk melakukan konsolidasi manajemen litbang berbasis kinerja serta mengevaluasi dan memantapkan penelitian tanaman pangan 2005-2006 berlangsung selama 3 hari dengan menyajikan materi secara pleno dan sidang kelompok. Hadir sebagai peserta pejabat struktural eselon II-IV Puslit/Balit/Lolit, peneliti, staff muda, bendahara serta kepala instalasi penelitian. Materi yang disajikan sangat menarik, tidak hanya menyangkut program penelitian, namun juga membahas sistem penganggaran dan pengawasan, pengelolaan sumberdaya manusia, fasilitas, dan motivasi diri. Penyaji juga dihadirkan dari lingkup Deptan, Dep. Keuangan, dan Perguruan tinggi.

Terwujudnya kesamaan persepsi tentang perencanaan dan pelaksanaan litbang tanaman pangan berbasis kinerja merupakan harapan dan keluaran dari Raker ini. Tugas mulia ini sangat diharapkan oleh pengguna, seperti Variates unggul baru dan inivasi teknologi lainnya.

72 *Satu Abad Lembaga Penelitian Tanah Indonesia*

Kegiatan penelitian tanah di Indonesia secara umum telah berlangsung lebih dari satu abad, sejak pemerintahan Belanda mendirikan Kebun Raya Bogor

sekitar tahun 1817. Hitungan satu abad Lembaga Penelitian Tanah Indonesia (LPTI) didasarkan pada di mulainya pembangunan gedung lembaga penelitian tanah tersebut pada tahun 1905. Lembaga ini terbentuk karena adanya tuntutan untuk meningkatkan teknologi pertanian. Pemerintah pusat dan daerah melihat bahwa masalah yang melekat dalam penggunaan lahan pertanian memerlukan peranan teknologi sumberdaya lahan, untuk mengatasi luas lahan-lahan pertanian produktif semakin menurun akibat konsekuensi lahan untuk tujuan non pertanian; rendahnya tingkat efisiensi pengelolaan hara tanah di berbagai ekosistem; belum termanfaatkan secara optimal lahan kering yang cukup luas di luar Jawa; dan pemanfaatan lahan rawa.

Pada tanggal 28 Juni 2005, peringatan satu abad LPTI dilaksanakan di Jl. Juanda Bogor tempat kantor LPTI berada. Pada pembukaan acara Kepala Balitbangtan menyatakan bahwa "usia seratus tahun ini adalah momentum yang bertujuan untuk melihat kemajuan yang telah di capai". Sementara itu, Mentan menyampaikan apresiasinya kepada Balitbangtan, dalam hal ini Puslitbang Tanah dan Agroklimat, karena upayanya yang terus menerus menggali informasi dan teknologi sumber daya lahan. Dalam rangkaian acara ini digelar seminar, pameran dan kegiatan pendukung lainnya. acara dimeriahkan dengan kehadiran para pembicara dari dalam dan luar negeri serta sektor swasta.

73 *Pelantikan Direktur Puslit Karet dan Puslit Kopi dan Kakao*

Terjadi dua pelantikan di Balitbangtan yang berlangsung pada bulan Juni 2005. pada tanggal 16 Juni

2005 di Tanjung Morawa, Medan, Dr. Ir. Cairul Anwar, M.Sc. dilantik sebagai Direktur Puslit Karet menggantikan Dr. Ir. Soekirman Prawirosoedjo, MS. dan pada tanggal 23 Juni 2005 di Jember Dr. Teguh Wahyudi, M.ENG. dilantik sebagai Direktur Puslit Kopi dan Kakao menggantikan Dr.Ir. Zaenudin, SU. Kedua dilantik oleh Kepala Balitbangtan selaku Ketua Dewan Penyantun Lembaga Riset Perkebunan Indonesia.

74 *Varietas Unggul Kakao Baru*

Dua varietas unggul kakao, ICCRI 01 dan ICCRI 02, hasil penelitian Puslit Kopi dan Kakao, Balitbangtan dilepas oleh Deptan berdasarkan SK Mentan No.212 dan 213/Kpts/SR.1205/2005 tanggal 11 Mei 2005. Klon unggul kakao ini memiliki potensi lebih dari 2.000 kg/ha/tahun dan toleran terhadap penyakit busuk buah *Phytophthora palmivora* dan hama *Helopeltis*. Sementara pertanaman kakao mulia yang ada sampai saat ini masih berpotensi produksi 1500 kg/ha, dan kurang toleran terhadap penyakit busuk buah.

Klon ICCRI 01 adalah hasil seleksi individu pada populasi kakao trinitario asal biji di Kebun Penataan Blitar, Jawa Timur. Tajuknya berukuran sedang, merata, kokoh; bunga tersebar di batang dan cabang, dapat menyerbuk silang dan menyerbuk sendiri; tingkat kompatibilitas 42-58%; buah berwarna merah, besar buah sedang dan permukaan kasar. Berat biji kering 1,36 g, warna biji putih (99,71%), kadar lemak (59%). Potensi produksi 2508 kg/ha/th (populasi 1100 ph/ha). Sedangkan klon ICCRI 02 merupakan hasil seleksi individu pada populasi kakao

Trinitario asal biji di Kebun Penataran, Blitar, Jawa Timur. Tajuk berukuran sedang, merata kokoh; bunga tersebar di batang dan cabang, dapat menyerbuk silang dan menyerbuk sendiri dengan tingkat kompatibilitas 29-56%; buah berwarna merah, besar buah sedang, permukaan kasar. Berat biji kering 1,32 g, warna biji putih (99,75%), kadar lemak (56%). Potensi produksi 2376 kg/ha/th (populasi 1100 ph/ha).

75 *Swasembada Gula Tertunda*

Swasembada gula yang direncanakan pada tahun 2007 dipastikan tidak akan tercapai. Menurut Menteri Pertanian Anton Apriyantono, swasembada gula bagi konsumsi masyarakat dan industri kemungkinan baru bisa dilaksanakan pada 2009. Itupun jika pada 2007 produksi gula untuk konsumsi sudah mendekati kebutuhan nasional sekitar 2,6 juta ton per tahun. "Sekarang sudah diprediksi sekitar 2,2 juta ton," ujarnya.

Mentan menjamin, untuk gula rafinasi tidak akan ada pendirian pabrik baru. Dia juga mengatakan, gula rafinasi harus segera memperoleh Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib dari Badan Standarisasi Nasional (BSN). Mentan mengklaim, meski swasembada molor, namun saat ini sudah terjadi pengurangan jumlah gula impor yang cukup signifikan.

Selain itu, menurut Mentan, kenaikan HPP itu juga akibat kenaikan inflasi dan dampak krisis BBM. Saat ini HPP yang ditetapkan awal 2005 untuk Gabah Kering Panen (GKP) Rp 1.330 per kg, dan Gabah Kering Giling

(GKG) Rp 1.725 per kg. Sebelumnya HPP untuk GKP Rp 1.230 dan GKG Rp 1.685.

Mengenai impor beras Anton mengatakan, pada akhir Desember 2005, pemerintah akan mengevaluasi kebijakan larangan impor beras. "Sampai akhir Desember 2005, tidak ada impor beras," ujarnya.

76 *Gula Rafinasi Agar Masuk Daftar Negatif Investasi*

Dewan Gula Indonesia (DGI) merekomendasikan agar industri gula rafinasi masuk ke dalam Daftar Negatif Investasi (DNI). Langkah ini dipandang bisa mengurangi 'benang kusut' yang terjadi antara industri gula rafinasi dan industri makanan dan minuman.

Gula rafinasi (HS 1701.99.11.00 dan 1701.99.19.00) adalah gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi. Gula ini biasa disebut gula industri. Namun, sebagaimana gula putih produksi petani, gula rafinasi bisa dimakan langsung.

Dengan tidak adanya investasi baru di industri gula rafinasi, benang kusut tersebut diharapkan dapat lebih cepat terurai. Selain itu, "kapasitas produksi gula rafinasi sudah lebih permintaan pasar," ujar Ketua DGI sekaligus menjabat sebagai Menteri Pertanian Anton Apriyantono.

Berbeda dengan konsensus internasional, Indonesia membedakan pengertian gula rafinasi dan gula putih. Kebijakan tata niaga gula per 2002 menetapkan gula rafinasi di industri, sedang untuk gula putih-yang

diproduksi petani dan diimpor-untuk konsumsi akhir.

Benang kusut antar Asosiasi Rafinasi Indonesia (AGRI) dan industri mamin yang dalam Forum Komunikasi Pangan Indonesia (FKPI) bermula dari kebijakan yang terlalu akomodatif. Di satu sisi pemerintah mendorong tumbuhnya industri gula rafinasi, tapi di sisi lain terus memberi izin impor gula kepada industri mamin.

Padahal, gula yang diproduksi industri rafinasi ditunjukkan kepada industri mamin. inilah yang menjelaskan mengapa sejak kebijakan tat niaga gula dinikin per 2002 oleh pemilik antara AGRI dan FKPI bertahan hingga kini.

77 *Harga Gabah Akan Dinaikkan*

Pemerintah akan menaikkan harga gabah pada akhir 2005. Kini Gabah Kering Panen (GKP) Rp 1.330/kg dan Gabah Kering Giling (GKG) Rp 1.725/kg. "Harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap gabah sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan harga riil di pasar. Karena itu, kami degan mempelajari kenaikannya, paling lambat akhir tahun," ujar Menteri Pertanian Anton Apriyantono usai panen perdana padi di Sidrap, Sulawesi Selatan.

Kini HPP yang ditetapkan pada awal 2005 untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 1.330/kg dan gabah kering giling (GKG) Rp 1.725/kg. Sebelumnya HPP untuk GKP adalah Rp 1.230 dan GKG Rp 1.685.

Untuk kualitas GKG misalnya, turun 5,39% dari Rp 1.726,56/kg menjadi Rp 1.633,50/kg, kualitas GKP

naik 1,16% dan gabah kualitas rendah naik 6,02%. Ke empat belas propinsi yang disurvei adalah Sumut, Sumbar, Jambi, Lampung, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Banten, Bali, NTB, Kalsel, Sulut, dan Sultra.

Harga terendah ditingkat petani sebesar Rp 1.000/kg dijumpai di Kecamatan Cisaat dan Sukaraja, Sukabumi, Jabar, untuk kulaitas rendah dan Kecamatan Lambuaya, kabupaten Kendari, Sultra untuk kulaitas GKP.

"Sedangkan harga tertinggi sebesar Rp 2.200/kg dijumpai di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Sumut, untuk kualitas GKP dan kualitas rendah," ujarnya.

78 *Paha Ayam AS Serbu Pasar*

Mewabahnya flu burung yang melanda Indonesia membuat peternak unggas panik. Akibatnya, konsumen menyerbu produk unggas asal Amerika Serikat (AS) berupa paha (CLQ) dan sayap ayam.

Pasalnya, daging ayam asal negara Paman Sam itu, dijual dengan harga sangat murah. "Mereka menjual sekira 30 sen dolar AS/kg. Peternak kita tidak kuat bersaing lantaran untuk membesarkan ayam potong dibutuhkan biaya Rp 6.000 hingga Rp 7.000/ekor. Harga ayam potong di pasaran berkisar Rp 8.000 hingga Rp 10.000/kg.

Hantaman flu burung ternyata bukan satu-satunya yang menimbulkan kekhawatiran dikalangan peternak unggas Indonesia. Kemungkinan terjadinya

'serbuan' produk unggas asal AS ke Indonesia, juga membuat mereka dibanyangi kerugian luar biasa. Namun ketakutan itu berusaha diredam Menteri Pertanian Anton Apriyantono.

Kekhawatiran ini sebelumnya dilontarkan Ketua Forum Perunggasan Don Utoyo, yang menyatakan masuknya paha dan sayap ayam potong dari AS akan membuat banyak peternak Indonesia mengalami kebangkrutan, karena tidak akan kuat bersaing.

Selain itu Dirjen Produksi Peternakan Deptan Mathur Riady mengakui, kekhawatiran para peternak unggas itu sangat beralasan. Untuk melindunginya, pemerintah siap menerapkan sejumlah instrumen untuk menghalangi masuknya impor paha dan sayap ayam, terutama dengan menerapkan persyaratan kehalalan. Namun, jika negara eksportir mampu memenuhi persyaratan itu, larangan impor tidak lagi diterapkan.

79 *Perlu Jalin Aliansi Strategis dengan Cina*

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, Indonesia perlu menjalin aliansi strategis dengan Cina dalam pengembangan perkebunan karet di tanah air.

Menurut Mentan, tahun ini produksi karet Indonesia hanya 1,63 juta ton, jauh dibawah Thailand yang menghasilkan 2,35 juta ton. "Namun dalam jangka panjang kita akan menjadi produsen karet terbesar dunia.

Maka itu kita harus memperluas pasar dari sekarang, terutama ke Cina," ujar Mentan.

Mentan memprediksi, tahun 2009 produksi karet alam Indonesia mencapai 2,3 juta ton, dimana 10% diserap industri domestik dan sisanya diekspor. pada 2005 Indonesia akan menjadi produsen karet terbesar, dengan produksi 3,5 juta-4 juta ton. Industri dalam negeri diperkirakan hanya akan menyerap 25% produksi, sehingga sisanya harus diekspor.

Dengan menghasilkan 4,2-4,3 juta mobil per tahun periode 2001-2003, konsumsi karet di Cina naik 9,09% per tahun. Tahun 2004 produksi mobil sudah menggapai 4,8 juta unit, atau 96% dari permintaan pasar mobil Cina yang 5 juta unit. Diperkirakan, dalam tiga tahun ke depan industri mobil Cina menyerap US\$ 10 miliar investasi langsung dari luar negeri.

Konsumsi karet alam juga membesar dengan naiknya harga minyak bumi, yang kini mencapai US\$ 66 per barel. Naiknya harga minyak otomatis menyerap harga karet sintesis, karena karet ini dibuat dari minyak bumi. Sejak harga minyak bumi menyetuh US\$ 50 per barel, konsumen cenderung beralih ke karet alam.

Karet sintesis ini muncul sejak tahun 1970-an dengan harga yang jauh lebih murah dari karet alam. Namun demikian produk karet alam tetap memiliki pangsa yang besar, karena kebutuhan akan produk dari karet alam tetap banyak. Karet alam tetap menjadi bahan baku utama ban, sejumlah onderdil kendaraan bermotor, pembungkus karet, sepatu karet, sandal karet dan balon. Karet alam juga mempunyai elastisitas (daya lenting) yang lebih sempurna dan plastisitas lebih baik.

80 *Indonesia Akan Impor Gula 2006*

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, kebutuhan impor gula untuk konsumsi tahun depan sekitar 200 ribu ton. Perkiraan impor gula ini turun dari angka sebelumnya, sebesar 500 ribu ton.

Anton menjelaskan, produksi gula nasional 2005 mencapai 2,2 juta ton. Sedangkan konsumsi gula untuk rumah tangga diperkirakan mencapai 2,5 juta ton. Data DGI menunjukkan, produksi gula nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000 produksi baru mencapai 1,69 juta ton terus naik hingga 2002 sebesar 1,75 juta ton. Pada tahun 2003 sempat menurun jadi 1,63 juta ton, tapi naik kembali pada tahun 2004 menjadi 2,05 juta ton. Untuk 2007, Mentan optimis produksi gula nasional dari lahan tebu yang ada akan mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Mentan menjelaskan, pemerintah ada kemungkinan akan menghapus tata niaga gula impor untuk konsumsi rumah tangga pada tahun 2007. Tapi tata niaga gula rafinasi untuk industri akan dipertahankan sampai 2009. Pemerintah juga akan mengatur mekanisme impor gula konsumsi dari kriteria perusahaan yang mendapatkan izin impor gula.

"Namun, penunjukan importirnya merupakan kewenangan Departemen Perdagangan," ujarnya. tahun lalu, empat perusahaan yaitu PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX, PTPN X, PTPN XI, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia, mendapat izin mengimpor gula 500 ribu ton.

81 *Konversi Hutan Untuk Kebun Sawit*

Pemerintah menilai rencana pengembangan dua juta ha kelapa sawit di perbatasan Kalimantan dan Sabah, sulit dilakukan tanpa mengkonversi hutan.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, rencana pengembangan dua juta ha perkebunan kelapa sawit sepanjang 850 km, sulit dilakukan tanpa perombakan hutan menjadi lahan perkebunan.

Untuk itu, Mentan berpendapat lembaga pemangku kepentingan di kehutanan dan perkebunan kelapa sawit, yakni World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, Komisi Minyak Sawit Indonesia (KMSI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) turut memikirkan rencana tersebut. Jadi, tak hanya asal mengkritisi atau menolak kegiatan konversi.

82 *Penyuluh Honor Masa Kerja 10 Tahun diangkat Tanpa Testing*

Menteri Pertanian Anton Apriyantono menyatakan, bahwa penyuluh honorer yang masa kerjanya sudah 10 tahun akan diangkat langsung tanpa testing. Sedangkan yang di bawah 10 tahun harus mengikuti testing, ujar Menteri Pertanian Anton Apriyantono.

Dari 300 ribu PNS yang akan diangkat tahun ini sekitar 46 ribu orang adalah penyuluh pertanian dengan persyaratan berkualitas dan lulus testing. Sementara untuk rekrutmen pengamat hama rencananya dapat dimasukkan ke penyuluh karena pengangkatan petugas pengamat hama kenyataan belum ada jatah secara khusus.

Kalau ada koperasi petani maka koperasi-koperasi inilah yang akan mengatur melakukan pembelian pupuk untuk keperluan petani di wilayahnya, dan membayarnya kembali utang tersebut dengan padi.

Tapi, ujar Mentan, koperasi tani tersebut sebaiknya dioperasionalkan oleh petani baik pengurusnya dan anggotanya. Dengan jalan ini dimungkinkan usulan tersebut dapat dilaksanakan secara nyata.

83 *Harga Beras Lampaui Batas Psikologis*

Harga beras kualitas sedang di beberapa daerah melampaui batas psikologis, Rp 3.500/kg. Hal itu di picu kenaikan harga BBM dan ketatnya pengawasan terhadap penyelundupan beras.

"Kenaikkan harga beras lebih dipicu meningkatnya biaya transportasi. Selain itu karena impor dilarang, penyelundupan semakin ketat pengawasannya, permintaan makin besar," ujar Menteri Pertanian Anton Apriyantono.

Akibatnya, di Pasar Induk Beras Cipinang saat ini kekurangan pasokan dan harga terdongkrak. Faktor

lain, karena perdagangan beras antar pulau yang semakin aktif. Sementara itu, Direktur Operasi Perum Bulog Bambang Prasetyo mengatakan, stok beras Bulog aman sampai akhir tahun. Menurutnya, laporan BPS tentang harga beras kualitas sedang naik di beberapa daerah harus diklarifikasi, karena ada kualitas beras atas masuk dalam kelas sedang. "Misalnya, beras Rojolele, Mudam, Super win dan Siam Unus, ujar Bambang.

Langkah selanjutnya, Deptan akan mengembalikan lembaga penyuluh pertanian dan tenaga penyuluh lapangan ke tingkat pusat. "Saat ini kami telah mengirim surat ke Depdagri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk menggantikan PP No.8 dan PP No. 25 Tahun 2000 yang mengatur penyerahan PPL dan lembaganya kepada daerah," ujarnya.

84 *Hati-Hati Konversi Hutan Jadi Lahan Sawit*

Rencana pembukaan dua juta ha lahan perkebunan sawit di perbatasan Kalimantan dengan Malaysia oleh Menteri Pertanian dengan mengkonversi hutan perlu kehati-hatian dan harus ada penelitian lebih mendalam agar tidak mengulang kegagalan program serupa sebelumnya.

Menurut Kepala Bidang Analisis dan Pengyajian Informasi, Dephut Masyhud, pihaknya akan mendukung rencana pembangunan kebun sawit di daerah perbatasan itu sepanjang menguntungkan pemerintah Indonesia.

Masyhud menandakan rencana pembangunan kebun sawit itu harus dibarengi dengan kajian masalah pemasaran hasil panen serta dampak dari kerusakan hutan yang ditimbulkan. "Jangan sampai rencana pembangunan kebun sawit itu menjadi kedok pembabatan hutan," ujarnya.

Pernyataan tersebut menanggapi pernyataan Menteri Pertanian Anton Apriyantono yang mengatakan pemerintah menilai rencana pengembangan dua juta ha kelapa sawit di perbatasan Kalimantan dan Sabah sepanjang 850 km, sulit dilakukan tanpa mengkonversi hutan.

Mentan menambahkan kegiatan konversi hutan untuk rencana ini pasti tidak bisa dihindarkan. Sebab, kebutuhan lahan dua juta ha cuma bisa dipenuhi apabila dilakukan pembongkaran hutan. Bila hanya dipilah, maka upaya menjadikan Kalimantan sebagai perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia tidak akan tercapai.

Untuk itu, Anton berpendapat lembaga pemangku kepentingan di Kehutanan dan Perkebunan kelapa sawit, yakni World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, Komisi Minyak Sawit Indonesia (KMSI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) turut memikirkan rencana tersebut.

85 *Kurang 44.000 Penyuluh Tani*

Saat ini terjadi kekurangan 44.000 tenaga penyuluh pertanian. Pemerintah secara bertahap akan menambah tenaga penyuluh. Tahun depan pemerintah akan mengangkat 1.600 tenaga penyuluh baru.



Pemerintah juga akan memberi intensif operasional sebesar Rp 250.000/bln.

Kepala Badan Sumber Daya Manusia Pertanian, Deptan, Ato Suprpto mengatakan, jumlah penyuluh pertanian masih jauh dari ideal. Jumlah ideal tenaga penyuluh diharapkan untuk setiap satu desa memiliki satu penyuluh pertanian.

Bila dihitung, jumlah penyuluh ideal mencapai sekitar 69.000 orang. Saat ini baru terdapat 25.000 tenaga penyuluh di seluruh Indonesia. Ato mengatakan, terkait dengan penambahan penyuluh, pemerintah akan mengangkat langsung penyuluh yang telah menjadi tenaga honorer penyuluh dengan umur kerja diatas 10 tahun.

Pemerintah juga akan memberi bantuan operasional sebesar Rp 250.000 untuk satu penyuluh. Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 162 miliar atau setara hampir separuh dari anggaran Badan Pengembangan SDM.

86 *100 Kabupaten Rawan Pangan*

Sebanyak 100 Kabupaten di Indonesia pada saat ini mengalami rawan pangan, dimana 30 daerah diantaranya tergolong dalam kondisi sangat parah. Ke-30 Kabupaten yang masuk kategori sangat rawan pangan itu adalah Jayawijaya, Paniai, Puncak Jaya, Sumba Barat, dan Landak. Sementara itu, 30 Kabupaten lainnya dikategorikan cukup rawan dan 40 lainnya kategori sedang (menengah).

Kondisi tersebut diungkapkan oleh Menteri Pertanian Anton Apriyantono dalam peluncuran buku Peta Kerawanan Pangan Indonesia (a Food Insecurity Atlas of Indonesia) 2005.

Menurut Menteri Pertanian Anton Apriyantono, peta yang di susun sejak 2002 itu merupakan peta yang menggambarkan sebaran wilayah kerawanan pangan di Indonesia. Peta kerawanan pangan Indonesia yang menghabiskan biaya produksi Rp 888 juta itu berisikan 135 halaman kumpulan peta indeks berwarna dan tabel indikator yang memberikan analisis komprehensif yang pertama kali untuk penanganan kerawanan pangan di Indonesia.

Anton berharap peta tersebut menjadi awal bagi pengambil kebijakan di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten untuk menyusun perencanaan yang lebih baik tepat sasaran, efektif, dan efisien dalam mengatasi kerawanan pangan dan gizi.

87 *Subsidi Pupuk Tahun Depan 6 Juta Ton*

Subsidi pupuk pada tahun depan 6 juta ton. Pupuk Urea masih mendominasi subsidi yang dianggarkan, yang mencapai Rp 2,2 triliun.

Menurut Direktur Jenderal Pengolahan Lahan dan Air Deptan Hilman Manan, pupuk urea yang di subsidi sebanyak 4,3 juta ton. Kemudian pupuk ZA 600 ribu ton, SP-36 700 ribu ton, dan NPK 400 ribu ton. "Angka pasti Rp 2,2 triliun masih berkembang terus karena menyesuaikan harga gas dan bahan bakar," ujarnya.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono menambahkan, subsidi pupuk tahun depan mencapai Rp 2,2 triliun sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Rencananya, dana subsidi itu akan dibayarkan kepada produsen audit Badan Pemriksa Keuangan. Audit itu untuk mengetahui volume pupuk yang disalurkan produsen sesuai dengan kewajibannya.

"Kewajiban pasokan bergantung pada kapasitas masing-masing pabrik," hingga kini pemerintah masih menunjuk PT Pupuk Kalimantan Timur, Petrokimia Gresik, Pupuk Iskandar Muda, Pusri dan Pupuk Kujang sebagai penyalur pupuk bersubsidi.

88 *Swasembada Gula Pada 2009*

Indonesia di perkirakan baru bisa mencapai swasembada gula pada 2009. Mentan Anton Apriyantono optimis produksi nasional tahun ini diperkirakan 2,3 juta ton masih dibawah konsumsi gula tahunan yang mencapai 2,5 juta ton.

Untuk tahun depan kekurangan pasokan diperkirakan hanya 200 juta ton. Setahun kemudian lahan tebu yang ada bahkan sudah akan mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Dengan adanya peningkatan produksi, impor gula pasir terus menurun tahun ini gula yang diimpor diperkirakan hingga 500 juta ton, yang berarti turun tajam dari tahun sebelumnya yang 900 juta ton. Untuk 2006 DGI menargetkan impor gula tinggal 200 juta ton.

89 *Indonesia Pacu Produksi CPO*

Indonesia melajukan rencana memacu produksi minyak kelapa sawit dalam tiga tahun ke depan untuk mendukung pembuatan bahan bakar, menyusul kecaman dari kelompok lingkungan.

Menurut Mentan, Indonesia akan memangkas impor gula pada 2006, dengan akan berlangsungnya panen raya tebu lokal. Pemerintah juga tengah mempelajari keuntungan pengembangan bibit modifikasi genetika.

Namun, Mentan menyatakan Indonesia adalah produsen dan eksportir CPO terbesar kedua setelah Malaysia, yang akan memacu area panen dalam perkebunan hingga 8 juta ha dalam tiga tahun ke depan dari saat ini 5 juta ha.

Indoensia memproduksi 12 juta ton CPO pada 2004 dimana area CPO Indonesia sudah 2 kali lipat sejak 1999. Ditengah rencana Indoensia memacu produksi, aktivis lingkungan mempersalahkan kebakaran hutan baru-baru ini yang menyebarkan asap di perkebunan sawit.

Berbagai kritik menyatakan pekerja melakukan pembakaran untuk membuka lahan dengan cara ilegal yang baru saja mendapat perhatian luas oleh pemerintah. Indoensia berencana mewujudkan perkebunan sawit yang terbesar mencakup area seluas 1,8 juta ha dikalimantan, sepanjang perbatasan Malaysia.

Bahan bakar bio-fuels menjadi rencana terbaru secara global, menyusul penajakan berbagai negara memangkas emisi yang membahayakan. Minyak sawit bkembang pesat di pasar beberapa dekade setelah ethanol diperkenalkan dan dibuat dari tebu dan aditif lainnya.



90 *Deptan Dorong Ekspor Kakao Olahan*

Departemen Pertanian akan mendorong eksportir kakao dalam negeri untuk mengeksport komoditas tersebut dalam bentuk yang telah difermentasi atau olahan. Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) Deptan, Djoko Said Damarjadi, menyatakan saat ini ekspor kakao Indonesia lebih banyak dalam bentuk mentahan sehingga harganya rendah dan merugikan petani.

"Tanpa menyebut besaran harganya, Djoko menyatakan, perbedaan harga antara kakao yang difermentasi dan mentahan sangat tinggi yakni mencapai 180 dolar AS per ton. Padahal selain mengeksport kakao dalam bentuk mentah, terutama AS, Indonesia juga mendatangkan kakao yang sudah difermentasi sehingga dengan selisih harga yang tertinggi tersebut berarti devisa yang terbuang juga sangat besar.

Menurutnya, saat ini produksi kakao Indonesia sebanyak 450 ribu ton per tahun yang mana sekitar 100 ribu ton untuk memenuhi pasaran ekspor dalam bentuk mentah sebaliknya Indonesia mengimpor kakao fermentasi sekitar 40 ribu ton/tahun. "saat ini Indonesia yang merupakan eksportir kakao ketiga setelah Ghana dan Pantai Gading.

91 *Kemitraan Tembakau Tak Perlu Perangkat Hukum*

Kemitraan petani tembakau dengan pengusaha rokok belum perlu diikat dengan perangkat hukum, namun berdasarkan sikap saling percaya antar pihak terkait.

Menurut Dirjen Perkebunan Deptan A. Dimiyati, perangkat hukum yang mengatur kemitraan tembakau memang bagus kalau bisa diupayakan.

Berdasarkan pengalaman, ujar Dirjen dengan perangkat hukum sekalipun ternyata masih terjadi penyimpangan. Karena itu, yang bisa menjamin keberhasilan kemitraan adalah saling percaya diantara pelaku kemitraan.

Tentang perlunya harga dasar tembakau, Dirjen menjelaskan bahwa pemerintah belum bisa menerapkan harga dasar komoditas diluar gabah. Justru yang dibutuhkan kemitraan dengan kepercayaan, dan itu dianggap bisa lebih lestrasi dibandingkan kebijakan harga dasar, yang dalam prakteknya sering tidak terpenuhi.

92 *Dana Subsidi BBM Untuk Kembangkan Biodisel*

Mentan Anton Apriyantono mengusulkan sebagian dana kompensasi subsidi BBM dialokasikan untuk pengolahan biodisel dan bioetanol, dari bahan baku jarak, minyak sawit dan bahan nabati lainnya.

"Pengembangan biodisel dari jarak merupakan solusi yang bagus untuk petani-petani di daerah kering seperti di NTT. Biodisel merupakan bahan bakar alternatif pengganti solar dari minyak nabati seperti jarak pagar, minyak sawit (Crude Palm Oil/ CPO) dan kepala. Sedangkan bioetanol adalah bahan bakar pengganti bensin yang dibuat dari bahan bergula atau berpati, seperti singkong, tetes tebu, nira sorgum, nira nipah, ganyong dan ubi jalar.

"Pengembangan renewable energy (energy terbarukan ini urgen untuk dipercepat kita ini sudah ketinggalan bahkan dibandingkan negara-negara berkembang seperti Brazil. Mereka sudah membangun pengolahan bioetanol dari tebu, "ujar Mentan.

Selain untuk memecahkan krisis BBM, pengembangan renewable energy dapat memperbaiki kesejahteraan petani. Pembangunan pengolahan minyak jarak ini cocok di NTT dan NTB. Terjadinya kelangkaan BBM di banyak daerah, sudah saatnya dijadikan momentum pemerintah untuk mantapkan kebijakan yang mendukung penggunaan biodisel dan bioetanol.

93 *Impor Beras Wangi PHRI Ditolak*

Mentan Anton Apriyantono menolak permintaan rekomendasi PHRI atas dispensasi terhadap impor brown roce- Thai Hom Mali (beras wangi) dari Thailand sebanyak 6.000 ton per bulan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para tamu hotel.

Mentan menjelaskan komoditas beras unggulan dalam negeri yang cukup banyak di antaranya jenis Mentik Wangi, Rojolele dan sejenisnya yang memiliki kualitas tidak kalah dengan beras impor itu, sehingga sangat layak untuk dikonsumsi para tamu hotel.

"Rekomendasi tidak akan diberikan hanya untuk PHRI, tetapi semua pihak, mengingat pemanfaatan komoditas beras produk lokal masih memadai," ujarnya.

Semua pihak yang berkepentingan membutuhkan beras cukup banyak diminta dapat mengoptimalkan konsumsi terhadap produk hasil petani lokal itu. Olah karena itu, Mentan menambahkan sebaiknya semua pihak bisa menyesuaikan diri, karena Deptan tidak mengizinkan impor beras oleh siapapun terkecuali ada penunjukan tertentu yang selama ini dilakukan Bulog.

94 *Indonesia Swasembada Jagung 2007*

Indonesia ditargetkan swasembada jagung pada 2007. Saat ini Indonesia masih mengimpor jagung sebanyak 1 juta ton hingga 1,5 juta ton per tahun.

Mentan Anton Apriyantono optimis target swasembada tersebut bisa tercapai. Dengan asumsi akan terjadi pertumbuhan produksi jagung sekitar 3 juta ton per tahun. Selama lima tahun terakhir, produksi jagung Indonesia naik 4,2%, yaitu dari 9,7 juta ton pada 2000 menjadi 11,2 juta ton pada 2004. Sedangkan pada tahun ini, produksi ditargetkan mencapai 11,7 juta ton.

Untuk mendukung swasembada jagung pada 2007, pemerintah mulai mengembangkan produksi jagung dengan konsentrasi di tujuh provinsi, yakni Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Bali.

Meningkatnya kebutuhan jagung dunia itu antara lain disebabkan sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat dan China memanfaatkan produksi jagung menjadi etanol, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pencampur bahan bakar minyak, menyusul terus melonjaknya harga minyak dunia sampai menyentuh level US\$68 per barel.

Pada kesempatan yang sama, menanggapi rencana swasembada jagung pada tahun 2007, Ketua Dewan Jagung Nasional Fadel Muhammad yang juga Gubernur Gorontalo, Gorontalo dengan kondisi lahan yang tandus dan kering dengan sistem air perpipaan mampu mengembangkan tanaman jagung dengan baik.

Menurutnya, lahan-lahan tadah hujan yang ada di Bali umumnya sangat subur. Lahan tersebut, di musim kemarau dapat ditanami jagung dengan penghasilan yang tidak kalah dibandingkan menanam padi.

95 *OP Dilaksanakan Jika Harga Beras Diatas Rp 3.500/Kg*

Menteri Pertanian Anton Apriyantono menegaskan pihaknya akan melakukan operasi pasar jika harga beras di lapangan melebihi Rp 3.500/kg.

"Kenaikan harga beras tersebut masih dalam batas yang normal dan itu hanya terjadi di beberapa wilayah," sebelumnya harga Gabah Kering Panen (GKP) sebesar 20 persen dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 1.330/kg di sentra produksi beras mengakibatkan petani menjual ke pasar umum.

Mentan menyatakan pemerintah telah menetapkan patokan harga beras kelas medium sesuai dengan HPP yakni sebesar Rp 2.790/kg ditambah dengan 25 persen, sehingga kenaikan harga menjadi Rp 3.000/kg hal itu masih normal.

Ketika menyinggung serangan hama wereng pada areal persawahan padi di sejumlah daerah. Mentan menyatakan hal itu belum berdampak pada penurunan produksi padi nasional. "Kita memiliki lahan pertanian jutaan hama tersebut masih sangat kecil belum mencapai 100 ribu ha," ujarnya.

96 *Deptan Rekrut 40 Ribu Penyuluh Pertanian*

Departemen Pertanian berencana merekrut sebanyak 40 ribu tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) untuk ditempatkan diseluruh Indonesia.

"Saat ini tenaga penyuluh pertanian belum mencapai 22 ribu sedangkan jumlah desa di Indonesia ada 66 ribu. Jika setiap desa membutuhkan satu PPL, berarti masih kurang 46 ribu petugas." ujar Menteri Pertanian Anton Apriyantono.

Penyuluh pertanian yang akan direkrut itu minimal berpendidikan Sekolah Pembangunan Pertanian-Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPP-SPMA). Anggaran untuk pengadaan PPL ditanggung bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian beban pembiayaan ini tengah dibicarakan Deptan dengan Menteri Dalam Negeri.

Menurut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian Ato Suprpto, menambahkan Deptan akan memberikan intensif bagi PPL sebesar Rp 250.000 per bulan, diluar gaji. Untuk tahun 2006 Deptan mengalokasikan anggaran Rp 162 miliar, yang diambilkan dari Rp 339 miliar jatah APBN Deptan untuk Badan Peningkatan SDM Pertanian.

Oleh karena itu, ujar Ato, Deptan berencana mengembalikan lembaga penyuluh pertanian dan tenaga PPL ke pusat. Deptan telah mengirim surat ke Departemen Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk mengganti PP No 8 Tahun 2003 dan PP No 25 Tahun 2000, agar PPL ditugasi sebagai wakil pemerintah pusat di Kabupaten.

Ketua Komisi IV DPR Mindo Sianipar mengatakan, sistem penyuluhan pertanian baru akan diperkuat dengan dukungan peraturan perundang-undangan, guna memberikan kepastian hukum dan keadilan. DPR kini menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, yang dipastikan selesai tahun ini.

97 *Deptan Siapkan RUU Penyuluhan Pertanian*

Departemen Pertanian mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Penyuluhan Pertanian ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. UU ini sangat penting karena puluhan ribu penyuluh pertanian membutuhkan ketegasan dan kepastian hukum.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, setelah RUU itu disetujui DPR. Deptan akan mengajukan Peraturan Pemerintah (PP) agar UU tersebut dapat diterapkan dengan baik. Sebab di lapangan dikhawatirkan akan berbenturan dengan UU lain seperti tentang otonomi dan pemerintahan daerah.

"Kewenangan pusat dan daerah dalam masalah ini perlu diatur dengan baik, termasuk kelembagaannya, jangan sampai tumpang tindih atau malah tidak ada yang mau bertanggung jawab. Pemerintah akan mengangkat sekitar 40 ribu penyuluh pertanian baru."

Pihaknya juga telah meminta Depdagri untuk merevisi PP No 8 / 2003 serta PP No 25 / 2000 yang membatasi kewenangan dan kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah setelah diberlakukan otonomi daerah. Setelah adanya revisi terhadap dua PP itu diharapkan kelembagaan penyuluhan pertanian bisa dibentuk kembali di tingkat provinsi kabupaten.

98 *Teknologi Kabi, Peluang Genjot Produksi*

Penerapan teknologi anjuran untuk budidaya kacang-kacangan (Kabi) merupakan peluang untuk bisa menggenjot produksi komoditi Kabi hingga dua kali lipat. Menurut Dirjen Tanaman Pangan Deptan Achmad Suryana mengatakan komoditi kabi rata-rata baru 50 persen dari potensi produktivitas bila menerapkan ajuran.

Dia mencontohkan rata-rata produktivitas kedelai baru 1,2-1,3 ton/ha, sementara potensi produksi bila menerapkan teknologi anjuran yang dihasilkan



Badan Litbang Pertanian bisa mencapai 2,5-3 ton/ha sementara potensi hasilnya mencapai 25-40 ton/ha, dan ubi jalar angka produktivitasnya mencapai 10,3-10,5 ton/ha sedangkan potensi hasilnya mencapai 30-40 ton/ha.

Menurut Achmad Suryana ada empat faktor utama masih senjangnya hasil produksi lapangan komoditi Kabi dibandingkan dengan potensi hasilnya.

Pertama, sosialisasi teknologi Kabi memang sangat lambat. Kedua, kacang-kacangan dan umbi-umbian masih dianggap sebagai secondary crop, tanaman utamanya adalah padi dan jagung. Departemen Pertanian mentargetkan paling tidak bisa memenuhi 65 persen dari total kebutuhan kedelai tahun 2010. Saat ini Indonesia baru bisa memenuhi 54 persen dari total konsumsi kedelai dalam negeri. Produksi kedelai Indonesia baru mencapai 791 ribu ton. Ketiga, pasar dan harga menjadi faktor yang bisa meningkatkan suatu komoditas atau tidak. Soal pasar kedelai, Achmad Suryana, berpendapat terbuka lebar. "Adanya impor kedelai yang masih tinggi, berarti pasar kedelai terbuka luas, tinggal soal harga," ujarnya. Keempat, ketersediaan benih unggul di lapangan. Dia khawatir benih unggul komoditi Kabi belum tersedia hingga ke tingkat petani. untuk menyediakan benihnya, Badan Litbang Pertanian sejak tiga tahun yang lalu telah mengalokasikan uang APBN yang cukup untuk meningkatkan produksi benih BS.

Benih BS yang diproduksi Badan Litbang Pertanian adalah untuk komoditas utama tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Untuk tanaman pangan antara lain sudah diproduksi benih BS kacang hijau, padi, kedelai dan jagung. "Kita mulai memproduksi bibit kakao tahun depan," tambahnya.

99 *Dewan Minyak Sawit dan Kakao Perlu Dibentuk*

Pemerintah perlu segera membentuk Dewan Minyak Sawit dan Dewan Kakao untuk mengatasi masalah yang muncul dalam masalah ini dari hulu hingga hilir. Dalam UUD No.18/2004 tentang perkebunan disebutkan perlu dibentuk Dewan-Dewan Komoditas, maka pembentukan Dewan Minyak Sawit dan Dewan Kakao sudah sangat mendesak.

Dirjen PPHP Deptan Djoko Said Darmajadi mengatakan, awal September 2005 diharapkan sudah dibentuk kelompok kerja untuk pembentukan Dewan Minyak Sawit dan Kakao, sehingga akhir 2005 diharapkan kedua dewan itu sudah terbentuk.

Dikatakan, rencana pembentukan dewan komoditas bukan sebagai lembaga untuk mengatur tata niaga komoditas pertanian. Pembentukan dewan komoditas seperti dewan minyak sawit dan kakao untuk memfasilitasi pengembangan bidang usaha komoditas ini guna meningkatkan daya saing kesejahteraan petani.

Djoko mengatakan, dewan komoditas memiliki peran memberikan saran dan pertimbangan kebijakan kepada pemerintah, memfasilitasi pelaksanaan ekspor dan promosi serta sebagai pusat data dan informasi.

Pemerintah akan mendorong eksportir kakao dalam negeri untuk mengeksport komoditas ini dalam bentuk yang telah difermentasi atau olahan. Perbedaan harga antara kakao yang difermentasi dengan pementahan sangat tinggi, yakni mencapai US\$ 180 per ton, ujarnya.

Selain mengeksport kakao dalam bentuk mentah, terutama ke AS, Indonesia juga mendatangkan kakao yang sudah difermentasi.

100 *Penjaminan Harga Komoditas Strategis Diperluas*

Pemerintah akan memperluas penjaminan harga komoditas strategis. Dalam waktu dekat akan dibentuk penjaminan harga jagung, dengan pelaksana Perum Bulog.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono menyatakan, idealnya seluruh komoditas strategis pertanian mendapatkan intensif penjaminan harga. Persoalannya, anggaran pemerintah sangat terbatas. "Namun, dalam waktu dekat pemerintah siap menjamin harga jagung, yang pelaksanaannya akan diserahkan ke Bulog," ujarnya dalam Rapat Kerja Menteri Pertanian dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Mentan menjelaskan, penjaminan harga jagung diharapkan dapat mendukung pencapaian target swasembada jagung tahun 2007. Saat ini Indonesia masih mengimpor jagung sekitar 1-1,5 juta ton per tahun.

Sedangkan target swasembada gula untuk konsumsi ditetapkan tahun 2008. Dari total kebutuhan 2,62 juta ton per tahun, sekarang impor Indonesia tinggal 250 ribu ton. Periode swasembada gula untuk industri yang kini masih harus diimpor (1 juta ton per tahun), ditargetkan tahun 2009.

Untuk swasembada daging sapi, target waktunya sekitar tahun 2010. Mentan pun optimis target kemandirian atas daging sapi akan terealisasi. Sebab saat ini sudah ada investor besar yang siap memberikan 10 ribu bibit sapi unggul di Sulawesi Selatan. Selain itu Deptan juga akan membantu pengadaan bibit unggul untuk dibesarkan peternak, dengan sistem bagi hasil, dan untuk swasembada komoditas kedelai ditargetkan tahun 2015.

101 *Mentan. Impor Gula Belum Perlu*

Menteri Pertanian Anton Apriyantono menegaskan, menaikkan harga gula yang terjadi belakangan ini bukan disebabkan rendahnya pasokan dari dalam negeri sehingga belum diperlukan impor.

Harga eceran gula pasir disejumlah wilayah Indonesia pada awal September 2005 mulai naik sekitar Rp 300-Rp 500/kg. Misalnya di Medan harga gula melonjak dari Rp 5900 menjadi Rp 6500/kg, dan di Pekanbaru Riau bahkan harga mencapai Rp 7000/kg. Sedangkan di Jakarta harga gula di tingkat eceran mencapai Rp 6000/kg.

Menurut Anton yang juga Ketua Dewan Gula Indonesia, kenaikan harga gula saat ini lebih disebabkan karena dampak naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun turunnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar AS, sehingga mengakibatkan kenaikan harga sejumlah produk.

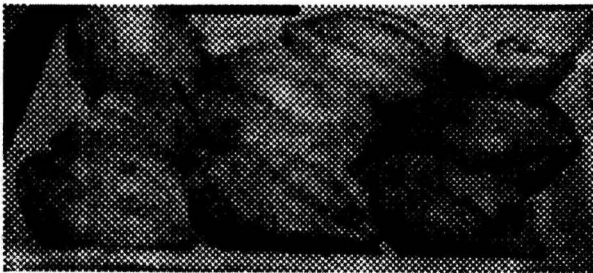
Dengan kondisi tersebut, Mentan mengatakan, meskipun pasokan gula didalam negeri melimpah namun tidak menurunkan harga sebaliknya pedagang gula ikut-ikutan menaikkan harga karena produk lain juga melonjak harganya. Pihaknya belum akan mengeluarkan izin impor, terlebih lagi sebentar lagi memasuki musim giling kedua sehingga persediaan gula akan semakin meningkat.

102 *Varietas Unggul Kakao Baru*

Dua varietas unggul kakao, ICCRI 01 dan ICCRI 02, hasil penelitian Puslit Kopi dan Kakao, Balitbangtan dilepas oleh Deptan berdasarkan SK Mentan No.212 dan

213/Kpts/SR.1205/2005 tanggal 11 Mei 2005. Klon unggul kakao ini memiliki potensi lebih dari 2.000 kg/ha/tahun dan toleran terhadap penyakit busuk buah *Phytophthora palmivora* dan hama *Helopeltis*. Sementara pertanaman kakao mulia yang ada sampai saat ini masih berpotensi produksi 1500 kg/ha, dan kurang toleran terhadap penyakit busuk buah.

Klon ICCRI 01 adalah hasil seleksi individu pada



Varietas Unggul Kakao

populasi kakao trinitario asal biji di Kebun Penataan Blitar, Jawa Timur. Tajuknya berukuran sedang, merata, kokoh; bunga tersebar di batang dan cabang, dapat menyerbuk silang dan menyerbuk sendiri; tingkat kompatibilitas 42-58%; buah berwarna merah, besar buah sedang dan permukaan kasar. Berat biji kering 1,36 g, warna biji putih (99,71%), kadar lemak (59%). Potensi produksi 2508 kg/ha/th (populasi 1100 ph/ha). Sedangkan klon ICCRI 02 merupakan hasil seleksi individu pada populasi kakao Trinitario asal biji di Kebun Penataran, Blitar, Jawa Timur. Tajuk berukuran sedang, merata kokoh; bunga tersebar di batang dan cabang, dapat menyerbuk silang dan menyerbuk sendiri dengan tingkat kompatibilitas 29-56%; buah berwarna merah, besar buah sedang, permukaan kasar. Berat biji kering 1,32 g, warna biji putih (99,75%), kadar lemak (56%). Potensi produksi 2376 kg/ha/th (populasi 1100 ph/ha).

103 *Pembukaan Pelatihan Polsus Badan Karantina Pertanian di SPN Lido*

Bertempat di SPN Lido Sukabumi, pada tanggal 18 Agustus 2005 AKABP Drs. Dhani Sujoko, SH, MM Kepala Bagian BIN Polsus SDOPS membuka Pelatihan POLSUS Badan Karantina Pertanian, dan disaksikan Sekretaris Badan Karantina Pertanian H. Ir. Zufiar Zubir serta beberapa pejabat lingkup Badan Karantina Pertanian dan Mabes POLRI.

AKBP Drs. Dhani Sujoko, SH, MM yang bertindak selaku Inspektur upacara dalam pembukaan pelatihan polsus lingkup Barantan mengatakan, bahwa kesempatan pelaksanaan pelatihan ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan diharapkan seluruh peserta pelatihan dapat meningkatkan jiwa kedisiplinan yang tinggi dan profesional. Selanjutnya diharapkan para peserta polsus karantina agar dapat menerapkannya dalam tugas dilapangan membantu petugas yang sudah ada sesuai dengan misi dan visi Karantina.

Jumlah peserta pelatihan Polsus lingkup Badan Karantina Pertanian kurang lebih 60 orang yang terdiri dari 4 orang pegawai Badan Karantina Pertanian dan 56 orang dari UPT Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan dari seluruh Indonesia.

104 *Apresiasi Keortalaan*

Penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung saat ini begitu dinamis, Aparatur Negara harus lebih mampu mengantisipasi terhadap setiap

perubahan yang terjadi. Untuk itu dibutuhkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan profesional, guna mendukung tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*).

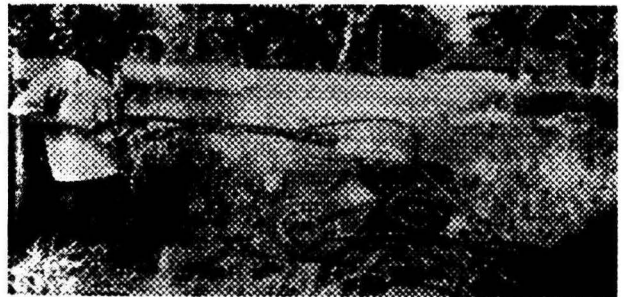
Antisipasi terhadap perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis tidak terlepas dari kebutuhan akan wawasan dan pemahaman yang terkait dengan aspek organisasi dan metode (OM). Dewasa ini banyak hal yang terkait dengan aspek OM, muncul dilapangan sebagai permasalahan, dikarenakan ketidakjelasan dan kesimpangsiuran pemahaman terhadap substansi yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut guna meningkatkan pemahaman penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan penyegaran guna menambah wawasan dan pendalaman pemahaman terhadap aspek OM kepada para pejabat yang membidangi fungsi keortalaan di lingkungan Departemen Pertanian, Sekretariat Jenderal C.q Biro Organisasi dan Tata Usaha menyelenggarakan Apresiasi Keortalaan pada 24 s/d 25 Juni 2005 bertempat di hotel Prameswari Jl. Cipanas Km. 81,2 Ciajur-Jawa Barat.

Materi disampaikan oleh Tim dari Kementrian PAN yang meliputi Peran dan Fungsi Organisasi dan Metode (OM) dalam penyelenggaraan Pemerintahan; penjelasan terhadap ketentuan INPRES No. 5 Tahun 2004 dan tindaklanjutnya; serta penetapan kinerja dan penerapannya di lingkungan instansi pemerintah sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Acara tersebut dihadiri oleh para pejabat lingkup Biro Organisasi dan Tata Usaha dan para pejabat yang membidangi fungsi keortalaan Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian.

105 *Peningkatan Kinerja Melalui Penyediaan Teknologi Tanaman Pangan*

Kepala Balitbangtan saat membuka Raker Puslibangtan di Bogor, menyatakan Puslitbang Tanaman Pangan diharapkan lebih meningkatkan perannya dalam penyediaan inovasi teknologi. Dalam program revitalisasi



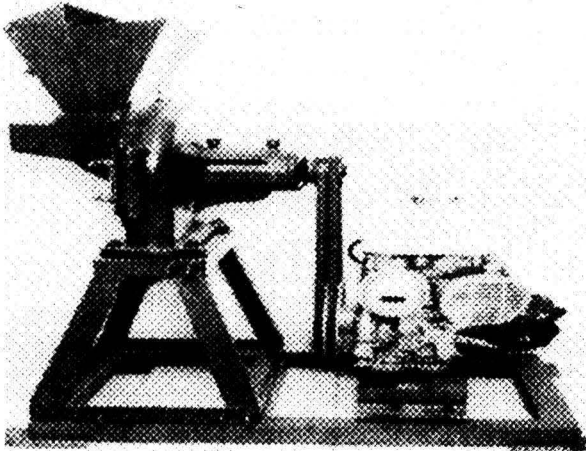
Penyediaan Teknologi Tanaman Pangan

pertanian, perikanan, dan kehutanan yang dicanangkan Presiden RI . Di tetapkan bahwa padi, jagung dan kedelai menjadi komoditas prioritas dalam kebijakan pengembangan produk pertanian. Komoditas tersebut merupakan mandat yang diemban Puslitbangtan.

Raker yang bertujuan untuk melakukan konsolidasi manajemen litbang berbasis kinerja serta mengevaluasi dan memantapkan penelitian tanaman pangan 2005-2006, menyajikan materi secara pleno dan sidang kelompok. Hadir sebagai peserta pejabat struktural eselon II-IV Puslit/Balit/Lolit, peneliti, staff muda, bendahara serta kepala instalasi penelitian. Materi membahas sistem penganggaran dan pengawasan, pengelolaan sumberdaya manusia, fasilitas, dan motifasi diri.

106 *Eksistensi Pengkajian Teknologi Pertanian di Irian Jaya Barat*

Pengkajian teknologi Pertanian Irian Jaya Barat (PTP-IJB) merupakan cikal bakal Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Balitbangtan, yang berlokasi



Teknologi Pertanian

di Kabupaten Manokwari, Irian Jaya Barat. Sejak awal tahun 2005, PTP-IJB dipandang telah berhasil melaksanakan sosialisasi dalam memberikan solusi/tanggapan terhadap kesuksesan program pengembangan padi di Kabupaten Manokwari. Bahkan PTP IJB secara khusus di minta oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan IJB agar lebih banyak memainkan perannya, khususnya untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam upaya perluasan areal tanam padi dengan menyumbangkan paket teknologi tepat guna spesifik lokasi. Terutama sejak Bupati mencanangkan Kabupaten Manokwari sebagai sentra produksi padi bagi IJB.

Sebagai realisasi dari penancangan tersebut, telah dilakukan kegiatan panen raya padi di distrik

Oransbari pada lahan seluas 250 Ha, dengan menghasilkan produksi 5 ton/Ha varietas Cisantana yang di hasilkan oleh Balitpa.

107 *Satu Abad Lembaga Penelitian Tanah Indonesia*

Kegiatan penelitian tanah di Indonesia secara umum telah berlangsung lebih dari satu abad, sejak pemerintahan Belanda mendirikan Kebun Raya Bogor sekitar tahun 1817. Hitungan satu abad Lembaga Penelitian Tanah Indonesia (LPTI) didasarkan pada di mulainya pembangunan gedung lembaga penelitian tanah pada tahun 1905. Lembaga ini terbentuk karena adanya tuntutan untuk meningkatkan teknologi pertanian. Pemerintah pusat dan daerah melihat bahwa masalah yang melekat dalam penggunaan lahan pertanian memerlukan peranan teknologi sumberdaya lahan, untuk mengatasi luas lahan-lahan pertanian produktif semakin menurun akibat konserfasi lahan untuk tujuan non pertanian; rendahnya tingkat efisiensi pengelolaan hara tanah di berbagai ekosistem; belum termanfaatkan secara optimal lahan kering yang cukup luas di luar Jawa; dan pemanfaatan lahan rawa.

Peringatan satu abad LPTI telah dilaksanakan di Jl. Juanda Bogor tempat kantor LPTI berada.

Kepala Balitbangtan pada acara tersebut menyatakan bahwa "usia seratus tahun adalah momentum yang bertujuan untuk melihat kemajuan yang telah di capai". Sementara itu, Mentan menyampaikan apresiasinya kepada Balitbangtan, dalam hal ini Puslitbang Tanah dan Agroklimat, karena upayanya yang

terus menerus menggali informasi dan teknologi sumber daya lahan. Dalam rangkaian acara ini digelar seminar, pameran dan kegiatan pendukung lainnya. acara dimeriahkan dengan kehadiran para pembicara dari dalam dan luar negeri serta sektor swasta.

108 *Pelantikan Pengurus Koperasi Waikatera Badan Karantina Pertanian*

Bertempat di ruang rapat Gedung E Lantai VII Departemen Pertanian telah dilakukan rapat koperasi Waikatera Badan Karantina Pertanian, rapat dipimpin oleh Kepala Badan Karantina dan didampingi Sekretaris Badan Karantina Pertanian. Dalam sambutannya Kepala



Pelantikan Pengurus Koperasi Waikatera BKP

Badan Karantina Pertanian Ir. Syukur Iwantoro MS, MBA menghimbau kepada seluruh karyawan/karyawati Barantan untuk menjadi anggota koperasi Waikerta, menurut Kepala Badan Karantina Pertanian ada beberapa syarat untuk menjadi pengurus koperasi, professional, kredibel, jujur dan punya naluri bisnis tanpa mempunyai kriteria tersebut mustahil koperasi dapat maju.

Rapat anggota yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2005 telah melakukan pengambilan suara secara demokrasi memilih H. Hermansyah, SH, MM sebagai Ketua dan DR. Drh. Hardiman, MM sebagai Wakil Ketua KPN Waikerta periode 2005-2009. Pada hari yang sama setelah terpilih Ketua Koperasi mengadakan rapat membentuk kepengurusan antara lain: Manager Konsultan, Manager Fumigasi, Manager Ekspor/Impor, Manager Event Organizer, Manager Simpan Pinjam, manager Perdagangan dan Manager Pest Control.

Setelah sepuluh hari berjalan pada tanggal 8 Agustus 2005 bertempat di ruang rapat lantai I Gedung E Deptan, Kepala Badan Karantina Pertanian melantik kepengurusan koperasi Waikerta. dalam sambutannya Kepala Badan mengatakan pengurus Koperasi harus mampu mengelola secara baik, disiplin dan penuh tanggung jawab karena koperasi adalah wujud dari rasa percaya yang diberikan oleh seluruh anggota agar dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengabadikan diri bagi kemaslahatan keluarga besar Badan Karantina Pertanian.

109 *Peluncuran Buku Food Insecurity ATLAS (FIA) INDONESIA*

Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian selaku sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dengan World Food Programme (WFP), pada tanggal 15 Agustus 2005 di Auditorium Kampus Deptan melakukan kerjasama dalam penyusunan Food Insecurity Atlas (FIA)

Indonesia dan bersama-sama melakukan pelatihan dan pengembangan FIA di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan tersebut Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan meluncurkan buku A Food Insecurity Atlas (FIA) Indonesia, dan secara simbolis membagikan kepada perwakilan undangan.

Mentan pada kesempatan tersebut mengatakan permasalahan kerawanan pangan, baik yang bersifat transien maupun kronis di Indonesia memerlukan perhatian yang serius. Penanganannya harus didukung secara optimal melalui kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi faktor-faktor penyebabnya, dilanjutkan dengan perumusan strategi dan penyusunan program kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi. Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan koordinasi dan keterpaduan program dengan instansi terkait dalam rangka memfasilitasi kegiatan intervensi pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan dan gizi sangat dibutuhkan.

Tujuan dilakukannya peluncuran buku FIA Indonesia adalah untuk mengapresiasi kepada para pemangku kepentingan bahwa buku FIA Indonesia telah selesai disusun dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk penanganan kerawanan pangan di Indonesia. Dengan sasaran diperolehnya dukungan lebih lanjut dan termanfaatkannya buku FIA Indonesia.

110 *Pelantikan Direktur Puslit Karet dan Puslit Kopi dan Kakao*

Kepala Balitbangtan selaku Ketua Dewan Penyantun Lembaga Riset Perkebunan Indonesia, melantik Dr. Ir. Cairul Anwar, M.Sc. dilantik sebagai

Direktur Puslit Karet menggantikan Dr. Ir. Soekirman Prawirosoedjo, MS diTanjung Morawa, Medan. Di Jember Dr. Teguh Wahyudi, M.ENG. dilantik sebagai Direktur Puslit Kopi dan Kakao menggantikan Dr.Ir. Zaenudin, SU.

111 *Peluncuran Virgin Coconut Oil dan Puree Buah oleh Mentan*

Menteri Pertanian membuka Agro and Food Expo sekaligus meluncurkan dua buah produk hasil penelitian BB-Pasca Panen, Balitbangtan berupa minyak kelapa murni atau Virgin Coconut Oil (VCO) dengan merek Laurica dan puree buah dengan nama Puresso. Diharapkan peluncuran produk ini dapat memacu pengembangan teknologi pengolahan ditengah-tengah petani.

Laurica diproduksi Koperasi Mutiara Baru Cianjur, bekerjasama dengan Balitbangtan (BB-Pascapanen dan BPTP Jabar) dan Disperindag Kab. Cianjur. Minyak kelapa murni (VCO) merupakan minyak kelapa yang dibuat dari kelapa segar (bukan kopra), tanpa proses kimiawi dan tidak menggunakan panas tinggi. Keunggulan VCO, memiliki kandungan asam laurat mencapai 48-55% dan asam lemak bebas sangat rendah (FFA) 0,01%. VCO, selain digunakan sebagai bahan baku kosmetika dan farmasi, juga sangat bermanfaat menangkal virus, bakteri dan patogen lain, serta membangun sistem kekebalan tubuh seperti halnya ASI.

Pure Buah PURESSO adalah produk intermediate, berasal dari buah mangga, sirsak, jambu biji, dan

strawberry yang diproduksi oleh CV. Promindo Utama Cirebon. Pabrik mini berkapasitas maksimum 500 kg buah/jam ini juga mulai memproduksi puree buah untuk aneka bahan baku produk olahan lanjutan.

113 *Orientasi Pembangunan Pertanian Perlu Diubah*

Menteri Pertanian Anton Apriyantono, menyatakan pelaksanaan pembangunan pertanian memerlukan penyempurnaan. Orientasi pembangunan pertanian perlu diubah.

Untuk memicu keberhasilan pertanian berbasis teknologi ini, perlu ada kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pihak swasta. Pola kerja sama nantinya diharapkan sanggup memicu kreativitas masyarakat disektor bidang pertanian.

Peningkatan produksi, ujamya Mentan tetap harus diimbangi dengan perbaikan mutu dan teknologi. Dalam bidang pertanian jagung, bentuk teknologinya berupa pengeringan sederhana yang bisa diterapkan petani.

Pemerintah daerah diharapkan berperan dalam meningkatkan potensi pertanian di daerahnya. Sebagai contoh ia mengatakan pemerintah lokal dapat memberi fasilitas. "Apalagi klaau bisa menyediakan dana untuk mengembangkan pertanian di tingkat lokal." Dukungan tersebut akan sangat menentukan keberhasilan pertanian di daerah. Menurut Anton salah satu contoh sukses dukungan pemerintah daerah terhadap teknologi pertanian ada di Gorontalo. Selain itu, kendati berdaerah kering, teknologi untuk memompa air dari sungai demi irigasi berhasil dikembangkan litbang pertannian dan perguruan tinggi setempat. "Juga ada mesin pngering dan pemopil jagung yang dikembangkan pemerintah Gorontalo," ujamya.

112 *Perketat Impor Unggas*

Merebaknya wabah flu burung (AI) menjadikan kantor wilayah kerja Karantina Hewan Tanjung Balai Karimun memperketat pengawasan masuknya hewan unggas, khususnya ayam dan itik yang diimpor dari Malaysia tapi juga pasokan dari Pekanbaru mendapat perlakuan yang sama. Pengusaha ternak yang ingin memasukkan unggasnya harus mengantongi sertifikat kesehatan dari Karantina sesuai Instruksi Kepala Badan Karantina Pertanian No. 1204/NM.110/L/05.

Kepala Wilayah Kerja Karantina Hewan Tanjung Balai Karimun Drh. Yoeyoen Marhayoeni pada acara hearing dengan DPRD Komisi III Kabupaten Karimun mengatakan untuk mencegah masuknya wabah flu burung ke Kabupaten Karimun langkah-langkah yang sudah dilakukan: peningkatan biosekuriti, peningkatan pengawasan terhadap lalintas unggas dan produk unggas, koordinasi dengan instansi terkait seperti administarur pelabuhan, pemerintah daerah, bea cukai, KP-3 dan sosialisasi ke masyarakat melalui media cetak.

Saat ini Propinsi Riau dan Propinsi Kepaluan Riau termasuk Kabupaten Karimun masih aman terbebas dari wabah flu burung sehingga masyarakat tidak perla untuk mengkonsumsi daging ayam.

114 *Tujuh Komoditas Prioritas Agroindustri*

Departemen Pertanian menetapkan tujuh komoditas sebagai prioritas pengembangan bidang agroindustri, dari 17 komoditas yang menjadi prioritas pembangunan pertanian 2005-2010.

Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Deptan Achmad Suryana, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen mengidentifikasi ada tujuh komoditas yang memiliki prospek untuk dikembangkan agroindustri.

Agroindustri sebagai terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, karena menciptakan nilai tambah tinggi bagi hasil pertanian. Misalnya komoditas iles, dalam bentuk chip (kripik) harga eksponnya hanya US\$ 0,8/kg, namun setelah diolah menjadi tepung iles naik menjadi US\$ 4/kg.

Menurut Mentan, jika pembangunan pertanian hanya didasarkan pada target produksi sering kesejahteraan petani tidak ikut terangkat. Lebih jauh achmad Suryana menyatakan, produksi beras domestik di masa mendatang tidak akan mencukupi kebutuhan nasional, tanpa disertai keseriusan upaya diversifikasi pangan. Sebab, pertumbuhan produksi nasional hanya 0,7%, separo dari angka pertumbuhan penduduk yang 1,49%.

Dengan sistem agroindustri penggilingan padi terpadu, 10 ribu kg GKG akan menghasilkan beras utuh sebanyak 63-65% (6.442 kg), menir (beras pecah) 1,5-2%, dedak 8-18%, dan sekam 20-23%. Menir selanjutnya diolah menjadi tepung atau legendar, sedangkan sekam diolah menjadi arang atau bahan bakar sekam.

BPS mencatat, produksi jagung nasional tahun 2004 mencapai 11,23 juta ton pipilan kering, naik 3,11% dibandingkan tahun 2003. Tahun 2005 produksi diperkirakan naik lagi (4,56%), menjadi 11,74 juta ton. Untuk tahun depan, Deptan mentargetkan produksi mencapai 12,45 juta ton, dari luas panen 3,52 juta ha. Dengan akan diterapkannya penjaminan harga jagung seperti gabah dan gula diperkirakan tahun 2007 Indonesia sudah mencapai swasembada jagung. Saat ini impor jagung masih 1-1,5 juta ton per tahun.

Sedangkan untuk jeruk akan dibangun rantai pengolahan pure juice (jus murni) dan hasil samping berbahan ampas, biji dan kulit. Pada rantai produksi, akan dikembangkan sistem manajemen dengan fokus mempertahankan kesegaran buah.

115 *Mentan . Kurangi Konsumsi Pupuk Kimia*

Departemen Pertanian akan mengurangi penggunaan pupuk anorganik (kimia) terutama a=urea secara bertahap. Tujuan kebijakan ini tidak terkait dengan upaya menekan subsidi tapi untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono, menargetkan dalam sepuluh tahun akan terjadi pengurangan secara drastis penggunaan pupuk anorganik meskipun tidak bisa menghilangkan sama sekali pupuk anorganik.

Berdasarkan pengalaman di lapangan, penggunaan pupuk anorganik secara rutin akan cenderung meningkatkan dosisnya. Sebagai contoh, pada 1970-an petani hanya membutuhkan 150kg urea per ha, namun makin lama kebutuhan urea meningkat, dan sekarang mencapai 500 kg per ha.

Selain itu, produk pertanian organik belakangan sangat diminati masyarakat dan harganya cukup tinggi, sehingga penggunaan pupuk organik bisa dianjurkan sebagai keharusan.

Penggunaan pupuk organik tersebut berkaitan dengan sistem pertanian yang hendak dicapai Deptan dalam 10 tahun mendatang, yaitu sistem pertanian yang dilandasi budaya industri, yang ditandai dengan meningkatnya muatan teknologi dan ramah lingkungan serta zero waste.

Saat ini sejumlah perusahaan swasta di tanah air sudah memproduksi pupuk organik dalam bentuk cairan, padat, dan lainnya. Bahan baku pupuk organik bisa berasal dari kotoran hewan atau limbah organik (sampah).

Misalnya pupuk organik yang memanfaatkan serbuk sabut kelapa ditambah antara lain kotoran kelelawar dan pupuk kandang, kompos dari sampah rumah tangga, tulang ikan, dan lainnya.

116 *Mentan . Beras Impor Jangan Rusak Pasar*

Menteri Pertanian Anton Apriyantono meminta beras yang akan di impor Bulog benar-benar untuk kepentingan program beras untuk rakyat miskin dan dijaga agar tidak merusak pasar.

Pada tahun 2005 terdapat 53 juta ton Gabah Kering Giling atau setara 32 juta ton beras, sementara angka kebutuhan hanya sekitar 31 juta ton beras. "Bahkan kita kelebihan 1 juta ton beras tahun ini," ujar Mentan.

Mentan mengatakan pertimbangan pemerintah yang akhirnya memutuskan impor beras karena untuk menjaga stok beras Bulog sebesar 1,2 juta ton hingga akhir tahun dan mengantisipasi paceklik.

Namun, keputusan mengimpor beras telah diambil pemerintah terkait dengan fungsi Bulog sebagai public service obligation untuk menjalankan program raskin. Selain itu dijaga agar beras impor tersebut benar-benar untuk raskin dan tidak sampai masuk pasar, karena akan merusak harga beras yang saat ini dikatakan sangat mengembirakan bagi petani.

Untuk pengawasan, Mentan meminta Pemda ikut melakukan pengawasan distribusi raskin di tingkat bawah dengan melibatkan Camat dan Kepala Desa.

117 *Deptan Bentuk Tim Riset Flu Burung*

Departemen Pertanian membentuk tim riset untuk meneliti cara penularan virus flu burung sehingga menginfeksi manusia dan menyebabkan korban di Indonesia.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono memandang kasus flu burung yang mengakibatkan kematian Rini Dina sangat unik, karena sejak awal Agustus 2005 hingga saat ini tidak ada laporan unggas



yang mati akibat virus flu burung. Karena itu perlu dicairkan jawaban untuk memecahkan masalah ini dengan jalan melakukan penelitian secara menyeluruh.

Mentan juga mengingatkan jika memang ada virus lain yang sudah berkembang dan bisa menyerang manusia, tentu hal itu di luar pengendalian dan harus ditangani lebih baik. Masyarakat diminta memahami kasus ini dan tidak menyalahkan peternak. "Selain itu juga jangan lantas kaku dalam mengkonsumsi produk ternak, karena itu sesuatu yang belum ditentukan jawabanya. Belum tentu hal tersebut dikarenakan flu burung," tandanya.

118 *Pemanfaatan Teknologi Pertanian Belum Maksimal*

Menteri Pertanian Anton Apriyantono menyatakan, inovasi teknologi pertanian yang dihasilkan para peneliti selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal, akibat petani belum melihat keunggulannya secara langsung.

Menurut Mentan, sosialisasi teknologi dan penyuluhan pertanian menjadi salah satu pilar penentu keberhasilan untuk meningkatkan produksi, khususnya padi. Mengecilnya laju pertumbuhan produksi padi nasional belakangan ini terkait dengan lemahnya sistem penyuluhan pertanian. Bahkan, sebagian petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) telah memasuki masa pensiun.

Mentan juga menjelaskan, pengangkatan PPL dalam jumlah yang memadai harus didukung para peneliti untuk mampu menghasilkan teknologi secara berkelanjutan.

Revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pertengahan Juni 2005, sebagai upaya memperbaiki sistem produksi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian. Menurut Kepala Litbang Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Deptan Achmad Suryana menyatakan, untuk memantapkan kondisi pangan nasional, selain swasembada beras secara berlanjut juga menggarap lebih intensif pengembangan komoditas jagung, kedelai, serta peternakan sapi potong. Indonesia adalah penghasil padi terbesar ketiga setelah Cina dan India dari 113 negara produsen padi di seluruh dunia.

119 *Oktober Harga Gabah Naik*

Departemen Pertanian pada Oktober 2005 siap menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah produksi petani, atau bersamaan waktunya dengan keputusan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Menteri Pertanian Anton Apriyantono HPP Gabah kering Panen (GKP) akan dinaikkan dari Rp 1.330/kg menjadi Rp 1.470-Rp 1.500/kg. demikian pula HPP GKG yang sekarang Rp 1.740/kg akan dinaikkan, namun perhitungan angka finalnya belum final.

Deptan akan memperbaiki regulasi perbesaran nasional pada akhir 2005, guna meningkatkan harga jual

gabah/beras petani. Misalnya, menutup celah yang memungkinkan Perum Bulog mengimpor beras seperti sekarang, saat terjadi surplus beras 1,62 juta ton hingga akhir 2005.

Mengingat izin impor beras itu sudah menjadi keputusan pemerintah, menurut Mentan, pihaknya harus legowo. Berdasarkan Intruksi Presiden No 2 Tahun 2005, harga pengadaan Bulog dari petani kita Rp 1.330/kg GKP atau Rp 2.790/kg untuk beras. "Sebab tidak ada aturan yang membatasi harga beli Bulog untuk beras impor," ujarnya.

Dengan demikian, kelebihan produksi harus diekspor, agar tidak mengganggu stabilitas harga di dalam negerinya. Hal itulah yang mendasari keinginan Thailand mendesakkan kepentingan agar pasar beras Indonesia yang sangat besar dibuka, sehingga bisa mengekspor surplus berasnya ke sini.

Salah satu penerima GOLDEN AWARD adalah Kepala Balai Karantina Tumbuhan, David Daud Suweny SP, Pemberian penghargaan oleh panitia diberikan atas



Pemberian Penghargaan APEEGA 2005

dasar prestasi, dedikasi dan usaha dari seorang, tokoh masyarakat, figur-figur yang berprestasi baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang mempunyai Kalimantan Tengah dan Bali. Kepala David Daud Suweny kami ucapkan selamat. Semoga dapat memacu untuk mendapatkan Award-Award lainnya.

120 Kepala Balai Karantina Tumbuhan Jayapura Menerima Penghargaan

Bertempat di Ballroom Kirana Hotel Kartika Chandra tanggal 26 Agustus 2005 telah dilakukan pemberian penghargaan ASIA PACIFIC ECONOMIC EXECUTIVE GOLDEN AWARD 2005, ASEAN DEVELOPMENT GOLDEN 2005 DAN CITRA WANITA PEMBANGUNAN INDONESIA 2005. Acara ini diselenggarakan oleh Citra Mandiri Indonesia yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat.

121 International Flora Show 2005

Bertempat di Assembly Hall 2- Balai Sidang Jakarta Convention Center, pada tanggal 8-11 September 2005 telah dilaksanakan International Flora Show 2005. Kegiatan tersebut dibuka Ibu Mufidah Jusuf Kalla, Istri Wakil Presiden Republik Indonesia.

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk membahas kendala permasalahan dan kendala yang

ada, khususnya di bidang anggrek dan florikultura. Selain itu, untuk menginformasikan dan mensosialisasikan aneka ragam florikultura yang ada di Indonesia.

Dalam pelaksanaan International Flora Show 2005 diadakan seminar dan dialog mengenai "Peningkatan daya saing produk Florikultura Nasional melalui Penerapan Manajemen Mutu"; seminar "Anggrek Sebagai Citra Bangsa"; lomba tanaman anggrek; pemilihan paviliun terbaik dan kegiatan ke Taman Bunga Nusantara Cipanas yang bertujuan mensosialisasikan keindahan dan keanekaragaman tanaman bunga dari seluruh Indonesia.

Acara tersebut dihadiri Duta Besar dari negara-negara sahabat, menteri terkait, pimpinan perusahaan swasta, pejabat pemerintah pusat dan daerah.

122 Seminar Nasional Implementasi Cites Di Indoensia

Bertempat di Hotel Mirah Bogor tanggal 24 Agustus 2005 telah dilaksanakan "Seminar Nasional Implementasi CITES di Indonesia", seminar ini merupakan kerjasama Badan Karantina Pertanian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indoneisa, dan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Seminar di buka oleh Kepala Badan Karantina Pertanian Syukur Iwantoro, Kepala Badan Karantina Pertanian dalam sambutannya mengatakan bahwa Karantina sebagai salah satu unsur CIQS di Bandar Udara dan Pelabuhan Laut mempunyai peran yang

sangat strategis dalam membantu pengawasan lalu lintas tumbuhan dan satwa liar di samping tugas pokoknya dalam menangkal hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri maupun penyebarannya di dalam wilayah Republik Indonesia. Karantina sebagai pintu gerbang menyadari upaya penyelundupan flora dan fauna yang termasuk daftar dilindungi telah banyak di galkan aparat karantina. Untuk menghindari bertanggung jawab telah dilakukan uapaya perjanjian internasional diantaranya Convention On Internasional



Seminar Nasional Implementasi Cites di Indonesia

Trade In Endangered Species Of Wild Fauna and Flora (CITES). Dalam rangka antisipasi terhadap uapaya penyelundupan perdagangan ilegal satwa liar CITES telah menerbitkan daftar species yang perlu diawasi.

Peserta seminar berjumlah kurang lebih seratus orang. Turut hadir dalam seminar tersebut Sekretaris Badan, Kepala Pusat Karantina Hewan, Kepala Pusat Karantina Tumbuhan, PHKA, LIPI, Busda DKI, Tenaga Ahli Menteri, Fungsional KH dan KT. Diharapkan seminar mampu menghasilkan strategi terpadu dalam upaya kemungkinan terjadinya kepunahan satwa liar di Indoneisia.

123 *Pertemuan CORRA dan BOT IRRI, Konferensi Padi Internasional, dan Ekspose Inovasi Teknologi Padi*

Padi merupakan makanan pokok (staple food) lebih dari separuh penduduk dunia dan sekitar 60-70% kebutuhan kalori penduduk Asia yang jumlahnya lebih dari dua milyar berasal dari beras. Indonesia adalah penghasil padi terbesar ke tiga setelah China dan India dari 113 negara produsen padi di seluruh dunia, dengan tingkat produktivitas tertinggi di negara tropik. Bagi bangsa Indonesia padi bukan hanya sebagai makanan pokok dan sumber pendapatan, tetapi juga menyangkut berbagai aspek kehidupan sebagian besar penduduknya, baik secara ekonomi, sosial dan budaya, maupun politik dan keamanan nasional.

Council for Partnership of Rice Research in Asia (CORRA) merupakan forum komunikasi dan koordinasi para Pengambil Kebijakan penelitian padi masing-masing negara Asia. Forum yang dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian Padi Internasional (IRRI) ini diselenggarakan setiap tahun sejak tahun 1997. Selama ini, Indonesia sebagai negara anggota selalu aktif dan berpartisipasi dalam forum CORRA tersebut. Pertemuan ke VII CORRA di Korea Selatan menetapkan bahwa pertemuan yang ke IX akan diselenggarakan di Tabanan Bali tanggal 9-16 September 2005.

Pertemuan CORRA dihadiri oleh para pengambil kebijakan penelitian padi masing-masing negara anggota serta para koordinator program dan peneliti senior IRRI. Pertemuan membahas berbagai kebijakan penelitian yang berkaitan dengan issue-issue

internasional dan aktual tentang penelitian dan pengembangan padi, antara lain : (a) Hak Kekayaan Intelektual (IPR), (b) Kerjasama pemanfaatan sumberdaya genetik, (c) Pencapaian hasil penelitian, (d) Perencanaan strategik IRRI, (e) "Business meeting," dll.

Tujuan utama IRC 2005 adalah mengkomunikasikan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi padi hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri, baik oleh Badan Litbang Pertanian maupun Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian lainnya, serta hasil-hasil penelitian Internasional. Selain IRC juga ditunjukan untuk menghimpun informasi IPTEK padi dan berbagai pembelajaran Internasional tentang padi dalam aspek IPTEK, industri dan perdagangan, lingkungan dan sumberdaya alam, sosial-budaya dan, pengembangan SDM, dll.

124 *Dewan Ketahanan Pangan Harus Dilibatkan*

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengusulkan agar lokasi penggunaan beras impor oleh Perum Bulog untuk keperluan operasi pasar maupun program beras untuk orang miskin melibatkan Dewan Ketahanan Pangan (DKP).

Beberapa waktu lalu, Mendag Mari Elka Pangestu mengungkapkan, pemerintah mengizinkan Bulog mengimpor beras sebanyak 250 ribu ton guna menambah stok pangan nasional, meski saat ini dan

beberapa waktu ke depan persediaan beras di dalam negeri masih cukup aman, prediksi panen baik, dan cuaca tidak menjadi faktor yang mengganggu produksi beras petani.

Menurut Mentan, dengan perkiraan produksi gabah pada tahun 2005 ini mencapai 53,01 juta ton gabah kering giling, serta stok beras di gudang Bulog sebanyak 1,6 juta ton, kebutuhan pangan nasional diperhitungkan tercukupi. Deptan memahami kebijakan mengimpor beras, Deptan menilai beras sebanyak 250 ribu ton yang akan diimpor Bulog masih terlalu kecil dibanding stok beras nasional.

"Selain itu, menurut peraturan, jika harga beras medium di pasaran mencapai Rp 3.500/kg, serta persediaan nasional di bawah tujuh juta ton, Bulog diperbolehkan impor beras," ujar Mentan.

125 *Swasembada Pangan Perlu Rp 53,4 Triliun*

Departemen Pertanian memperkirakan perlu adanya investasi sebesar Rp 53,4 triliun guna mengembangkan lima komoditas pertanian strategis yang meliputi beras, jagung, kedelai, daging, dan gula selama 2005-2009.

Investasi yang terbesar untuk pengembangan tanaman padi sebesar Rp 18,5 triliun, disusul daging Rp 18 triliun, tebu Rp 8,3 triliun, kedelai Rp 5,8 triliun, dan jagung Rp 2,8 triliun, ujar Menteri Pertanian Anton Apriyantono.

Sedangkan investasi swasta dan masyarakat tani diharapkan akan mencapai Rp 42,8 triliun. Itu akan dimanfaatkan untuk membangun usaha pertanian primer dan pengolahan, rehabilitasi lahan milik petani dan saluran irigasi yang menjadi tanggung jawab petani, serta pembelian alat dan mesin pertanian.

Mentan menyatakan, dengan berbagai upaya tersebut diharapkan Indonesia mampu meraih swasembada jagung pada 2007, kedelai 2015, gula 2007-2008, dan gula konsumsi rumah tangga 2009-2010.

126 *Deptan Perluas Areal dan Produktivitas Padi*

Untuk menjamin swasembada beras berkelanjutan periode 2006-2010, Deptan akan menerapkan skenario pengembangan produksi padi melalui perluasan areal dan peningkatan produktivitas.

Perluasan areal panen diproyeksikan naik 0,37% per tahun pada 2006. Sedangkan produktivitas, diproyeksikan tumbuh sebesar 0,48% per tahun, yang akan di mulai 2006. Dengan skenario itu, pada 2010, target luas panen padi mencapai sekitar 12,14 juta ha dan produktivitas sekitar 4,67 ton GKP per ha.

Kemudian, pada 2007 produksi beras meningkat menjadi 54, 579 ton, dengan tingkat permintaan sekitar 54.012 ton. "Pada 2010, diperkirakan akan terjadi defisit mencapai 1,097 ton."

Menurut Anton, upaya pemenuhan kebutuhan beras nasional hingga 2010 akan ditempuh melalui tiga cara yaitu peningkatan produktivitas dengan penerapan teknologi usaha tani terobosan, peningkatan luas areal panen melalui peningkatan intensitas tanam, pengembangan tanaman padi ke areal baru, rehabilitasi irigasi, pencetakan sawah baru, serta peningkatan penanganan panen dan pasca panen.

Untuk mendukung upaya tersebut, dilaksanakan pula dengan pembentukan korporasi usaha yang diupayakan melalui pembentukan Kelompok Usaha Agribisnis Terpadu, pendidikan, latihan dan pengembangan kelembagaan petani, asosiasi komoditas, profesi serta pelayanan.

127 *Sebagian Besar PG Tidak Efisien*

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan sebagian besar Pabrik Gula (PG) yang berpotensi di Indonesia berumur lebih dari 75 tahun dan kurang mendapat perawatan yang memadai sehingga tingkat efisiensinya rendah.

Karena itu, dia mendesak pihak terkait untuk segera melakukan rehabilitasi terhadap PG yang sudah terkait untuk segera melakukan rehabilitasi terhadap PG yang sudah tidak efisien lagi. "Dari 68 PG yang ada, 52 pabrik di antaranya perlu segera direhabilitasi."

Kebijakan itu perlu dilakukan segera untuk meningkatkan kinerja dan efisiensinya terutama

rendemen dan produktivitas pabrik. Selama ini kinerja produksi PG sudah tidak efisien sehingga mengakibatkan biaya produksi gula per ton sangat tinggi.

128 *Mentan Harus Cepat Ajukan Kenaikan HPP Gabah*

Walau beras impor tak bocor, bisa mempengaruhi harga beras di tingkat petani. Menteri Pertanian Anton Apriyantono harus secepatnya menghitung dan mengajukan peraturan harga dasar gabah yang baru, melalui penetapan harga pembelian pemerintah (HPP).

Rencana Menteri Pertanian mengusulkan kenaikan HPP gabah dan beras kepada Presiden disampaikan pada Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR. Kenaikan HPP terutama untuk mengimbangi rencana Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Bustanul, alasan Perum Bulog mengimpor beras antara lain karena hambatan Inpres Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penetapan HPP. Jika Inpres HPP dikeluarkan dan harga gabah atau beras di petani naik lagi di atas HPP maka kejadian serupa akan berulang, seolah saling kejar.

Dia memperkirakan pekan depan Deptan akan merealisasikan revitalisasi sektor pertanian, yang antara lain mengusulkan kenaikan HPP gabah. Sementara HPP beras belum akan dinaikkan dan dibiarkan bergerak sendiri, agar selisih dari harga gabah tidak terlalu jauh.

Diakui, Mentan terpaksa "menyetujui" rencana impor beras karena ada desakan dari pejabat yang lebih tinggi kedudukannya. Namun, dia tidak bersedia menyebutkan siapa pejabat yang lebih tinggi kedudukannya itu. Akibatnya, Mentan terpaksa mengalah karena tidak mau terkesan tidak ada kekompakan di dalam kabinet.

129 *Peternakan Ayam Terbebas Flu Burung*

Menteri Pertanian Anton Apriyantono, sejak 1 Agustus 2005 sudah tidak ada kasus flu burung di peternakan ayam di Indonesia.

"Ayam paling rentan dengan virus flu burung, jika terinfeksi 90% pasti mati. Uniknya, meski sekarang ditemukan lagi penyakit flu burung menyerang manusia, tidak ada peternakan ayam yang terinfeksi flu burung," ujar Mentan.

Dirjen Peternakan Deptan, Mathur Riyadi menambahkan, hingga Juli 2005 masih dilaporkan adanya ternak yang terserang wabah flu burung. Meski sekarang di peternakan tidak ada ayam yang terserang flu burung, virus tetap ada untuk jangka waktu lama.

Mentan menjelaskan, kini muncul hipotesa kemungkinan kasus penyakit flu burung pada manusia di Indonesia berasal dari hewan pembawa hewan virus. Sebab, saat ini tidak ada wabah flu burung di peternakan ayam dan belum ditemukan pekerja peternakan yang

sakit karena flu burung. Flu burung pada hewan carrier tidak menimbulkan sakit pada hewan yang bersangkutan, tetapi dapat menularkan ke hewan lain atau manusia. Hewan pembawa virus itu, misalnya burung liar, bebek, atau babi.

Sedangkan, Mentan menjelaskan unggas yang terinfeksi ini jenis belibis mandarin, belibis buah, elang kondor, kakatua raja, beo kecil, merak hijau, bangau tongtong, bleang sumatera, ayam katai dan bluek.

Anton menambahkan, Deptan bekerjasama dengan Depkes dan perguruan tinggi akan menuntaskan kasus penyakit flu burung yang menyerang manusia. Penyelidikan dan penelusuran ulang akan dituntaskan hingga menemukan jenis hewan apa yang menjadi sumber penularan virus flu burung ke korban agar mata rantai penyebaran flu burung bisa diputus.

130 *Deptan Tawarkan Sawah Sejuta Hektare di Merauke*

Deptan menawarkan areal persawahan baru seluas satu juta ha di Merauke, Papua kepada swasta untuk digarap sebagai lahan pertanian khususnya padi guna mengantisipasi lonjakan permintaan pangan dalam negeri.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pertanian, Deptan Achmad Suryana mengatakan lahan sejuta ha itu di peruntukan sebagai areal persawahan baru.

"Kami menyiapkan jaringan irigasi," ujar Suryana seusai pengukuhan tiga Ahli Peneliti Utama (APU) Balitbang Pertanian di Bogor. Pemerintah sendiri juga akan ikut membuka lahan persawahan baru yang melibatkan langsung masyarakat setempat.

Menurut Suryana, pada 2005 penduduk Indonesia mencapai 400 jiwa sehingga memerlukan tambahan pangan dua kali dari jumlah permintaan saat ini yang rata-rata 133 kg per kapita per tahun.

Kalau peningkatan konsumsi itu tidak diimbangi dengan peningkatan produksi, pemerintah tidak mampu mempertahankan swasembada beras seperti saat ini. Selain pembukuan areal persawahan baru di merauke, Balitbang Pertanian juga merekomendasikan Deptan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan basah, rawa, dan pasang surut yang banyak terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Meskipun produktivitasnya tidak terlalu bagus, tapi mampu menambah stok beras dalam negeri mungkin untuk ekspor.

131 *Anggaran Penanganan Flu Burung Mandek*

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, anggaran tamban yang diajukan Deptan untuk penanggulangan wabah flu burung di Indonesia hingga kini mandek atau belum disetujui Menteri Keuangan.

Mentan menjelaskan, Deptan telah mengeluarkan dana Rp 24 miliar untuk menanggulangi wabah flu burung di peternakan rakyat, baik untuk

vaksinasi maupun tindakan pencegahan lainnya. Biaya tersebut di ambil dari dana tanggap darurat Deptan tahun 2005 sebesar Rp 104 miliar.

Mentan menegaskan, tidak mungkin Indonesia bebas dari virus flu burung dalam waktu dekat. Bahkan, untuk penancangan target Indonesia terbebas dari flu burung tahun 2007, itu semata-mata merupakan target kolektif negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Mentan lebih jauh menyatakan, daerah-daerah peternakan unggas di Indonesia harus selalu diwaspadai. Idealnya peternakan maupun tempat pemotongan hewan juga tidak ada lagi yang berada di kota-kota besar, karena pemukiman sudah sangat padat.

Anton menjelaskan, infeksi flu burung tidak bisa diantisipasi dengan vaksinasi, seperti pada ayam di peternakan. Untuk memperkecil resiko infeksi flu burung pada manusia, Mentan mengatakan hewan-hewan liar sepanjang daerah Legok hingga kebun binatang ragunan akan diawasi secara khusus. Menurut aturan, ayam-ayam dari peternakan hanya bisa dipasarkan jika sudah mendapat surat pernyataan sehat dari dokter hewan yang bertanggung jawab.

132 *Impor Beras Tertutup*

Impor beras akan tetap tertutup hingga Desember 2005, sepanjang harga rata-rata beras kualitas medium tidak melebihi Rp 3.500,-/kg. Selain itu, posisi stok beras di Perum Bulog masih diatas 1 juta ton.

Menurut Dirjen Pengolahan Hasil dan Pemasaran Pertanian Deptan, Djoko Said Damarjati mengatakan rencana impor beras oleh Bulog telah

berdampak psikologis di pasar beras dunia maupun domestik. Jika di pasar internasional harga beras langsung naik, di pasar domestik harga beras kini turun sekitar Rp 100,-/kg, tekanan harga ditingkat petani lebih parah, harga gabah turun hingga Rp 200,-/kg.

Bulog seharusnya bisa membeli beras dari petani diberbagai daerah. Terkait dengan hal itu, pemerintah akan menaikkan HPP untuk GKP dari Rp 1.330,-/kg menjadi sekitar Rp 1.500,-/kg, agar Bulog bisa membeli gabah didalam negeri, untuk menambah stok.

Bulog sebelumnya tidak bisa membeli gabah didalam negeri karena harga gabah petani di atas HPP. Dengan HPP baru gabah Rp 1.500,-/kg berarti Bulog dapat membeli gabah didalam negeri, karena sekarang harga GKP turun dari Rp 1.500,-/kg-Rp 1.600,-/kg menjadi Rp 1.400,-/kg.

Kebijakan larangan beras sejak tahun 2004 membuat perdagangan beras didalam negeri makin efisien dan lebih adil. Hal itu bisa dilihat dari kenaikan harga gabah tahun 2005 yang jauh lebih tinggi dari kenaikan harga beras. Misalkan jika harga beras naik Rp 100,-/kg ditingkat pedagang, gabah mampu naik hingga Rp 300,-/kg artinya keuntungan yang selama ini lebih banyak dinikmati pedagang mulai ditransper ke petani. Kebijakan penutupan impor juga mengaktifkan perdagangan beras antar pulau.

Menurut Djoko, pemerintah harus berhati-hati mengeksekusi rencana impor beras sebanyak 250 ribu ton, sejumlah prasyarat dan prosedur harus dipenuhi terlebih dahulu, termasuk ijin dari Dewan Ketahanan Pangan Nasional.

133 *Rencana Impor Beras Langkah Antisipasi*

Rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 250 ribu ton merupakan langkah persiapan untuk mengantisipasi bila diperkirakan akan terjadi kenaikan harga beras yang tidak terkendali.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan hal itu karena impor beras tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat dan memerlukan persiapan serta peninjauan supplier dari luar negeri.

Pernyataan Mentan menyusul munculnya berbagai pendapat pemerintah terbetik berita pemerintah berencana untuk mengijinkan impor beras 250 ribu ton oleh Bulog. Pemerintah tetap konsisten dengan kebijakan yang diterapkan selama ini, yakni impor beras oleh pemerintah tidak dilakukan bila kondisi tertentu masih terpenuhi. Yakni harga beras kelas menengah ditingkat eceran rata-rata di Indonesia tidak melebihi Rp 3.500,-/kg dan stok Bulog berjumlah diatas 1 juta ton.

Serta sebagai wujud keberpihakan kepada petani, maka merencanakan untuk meningkatkan HPP untuk GKP yang pada saat ini Rp 1.330,-/kg menjadi sekitar Rp 1.500,-/kg seiring dengan rencana kenaikan harga BBM.

134 *Perlu Rp 100 M Basmi Virus Flu Burung*

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, merebaknya virus flu burung di seluruh

daerah di Indonesia, Deptan sudah minta anggaran Rp 100 miliar total anggaran yang diajukan Rp 134 miliar, sisanya untuk mengatasi penyakit hewan lain seperti antrax maupun rabies yang menyerang ternak.

Dikatakan, Deptan akan melakukan tindakan peningkatan surveilans di wilayah-wilayah yang merupakan daerah endemik flu burung.

Menyinggung kemungkinan pemusnahan binatang dikebun binatang yang terkena flu burung, Anton mengatakan, hal itu hanya akan dilakukan untuk binatang yang tidak dilindungi. Untuk binatang yang tergolong dilindungi diupayakan diobati apalagi obat virus flu burung sudah ada.

135 *Cukup Besar, Dampak Flu Burung Terhadap Perekonomian Indonesia*

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, pemusnahan massal terhadap ternak yang terinfeksi virus flu burung, hanya akan dilakukan pada peternakan yang tingkat infeksiya tinggi yakni minimal mencapai 20 persen dari jumlah ternak.

Pemerintah, kata Mentan, akan mengganti bibit dan biaya pakan yang telah dikeluarkan oleh peternak yang ternaknya dimusnahkan.

Ditanya apakah sudah ada peternakan yang tingkat infeksiya tinggi, Anton mengatakan sejak Agustus hingga saat ini baru ada satu peternakan yang diduga tingkat infeksiya tinggi yakni di Bandung. Namun, kasus ini belum dikonfirmasi dengan baik mengenai kebenarannya.

Ia mengatakan pemusnahan massal unggas yang terinfeksi virus flu burung tersebut cukup sulit, karena lokasi peternakan unggas terpencar. Hal itu berbeda dengan peternakan di Belanda yang terkonsentrasi di daerah tertentu.

Mengenai unggas, terutama burung liar yang bisa menjadi penyebab virus flu burung, Mentan mengatakan hal itu sulit diatasi. Untuk itu, terpenting masyarakat harus melakukan biosecurity serta memperhatikan kebersihan dan kesehatan ternak maupun diri sendiri.

136 *Direktur Kesehatan Hewan Diganti*

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengakui, ada kekurangan pada mantan Direktur Kesehatan yang bernama Tri Satya Naipospos Deptan. Menurut Mentan banyak faktor yang menjadi pertimbangan seseorang mendapat penugasan sebagai eselon dua. Misalnya pertimbangan bakat, minat, kinerja, pendidikan, pelayan yang diberikan stake-holder dan kondite, sebagaimana diatur dalam regulasi kepegawaian.

Mentan menjamin pergantian Direktur Kesehatan Hewan kepada pejabat baru, Syamsul Bahri, tidak berdampak negatif terhadap penanganan kasus flu burung.

Meski telah merampungkan formasi pejabat eselon dua secara lengkap. Mentan hingga kini masih membiarkan kosong dua jabatan eselon satu yang strategis, yaitu Dirjen Tanaman Pangan, dan Dirjen Perkebunan. Mentan hanya menjanjikan, akan melantik dua Dirjen baru dalam waktu dekat untuk mengisi posisi tersebut.



137 *Buah Tak Layak Konsumsi Masuk RI*

Dirjen Hortikultura Deptan Ahmad Dimiyati menyatakan, banyak buah impor yang tidak layak konsumsi masuk ke wilayah Indonesia. Pemerintah hingga kini tak memiliki ketentuan persyaratan kualitas buah impor. Buah impor boleh dijual dimana saja, termasuk di pasar-pasar tradisional. "Akibatnya, buah impor membanjiri pasar domestik tanpa ada batasan."

Kebijakan buah impor di negara-negara lain sangat ketat, Mereka menerapkan persyaratan sanitary and phytosanitary (SPS), ketentuan mutu yang spesifik, sertifikasi Euro GAP, ketentuan Bio Terrorism Act, pembatasan maksimum kandungan kimia, serta didukung kebijakan nataristansi yang solid. Banyak negara juga hanya mengizinkan impor buah tertentu.

Deptan memang mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 358 Tahun 2005, tentang persyaratan teknis dan tindakan karantina tumbuhan dalam pemasukan buah dan sayuran segar ke Indonesia. Berdasarkan catatan Ditjen Hortikultura Deptan, nilai impor buah pada 2003 mencapai US\$191 juta, dengan volume 215,07 ribu ton. Angka ini naik signifikan dibanding nilai impor tahun 2000 (US\$ 145,06 juta), meski dari sisi volume turun. Impor buah tahun 2000 sebanyak 246,62 ribu ton.

Menurut Menteri Pertanian Anton Apriyantono, buah-buahan dari luar negeri umumnya mempunyai tampilan lebih baik dan harga lebih kompetitif. Sebaliknya, buah dari dalam negeri sulit memenuhi berbagai persyaratan yang diterapkan negara tujuan ekspor, khususnya Eropa dan negara maju.

Mentan memperkirakan, buah-buahan domestik yang bermutu baik hanya sekitar 20-30% dari total produksi. Sedikitnya buah bermutu ini karena sebagian besar produk buah berasal dari tanaman pekarangan atau usaha tanaman campuran. Tanpa perencanaan produksi dan mutu sejak awal, tanaman buah lokal varietasnya menjadi sangat beragam, pemeliharaan tanaman minimal, dan minim penerapan teknologi budidaya.

138 *Impor Buah Akan Diperketat*

Menteri Pertanian Anton Apriyantono, menegaskan, impor buah akan diperketat, terutama pada aspek karantina buah. Saat ini, pasar Indonesia dibanjiri buah-buahan impor dari HongKong, Cina, dan Taiwan. Kondisi itu bisa terjadi, ujar Anton, karena mutu buah petani lokal kurang bisa bersaing dengan produk impor itu.

Sebelumnya, Mentan mengatakan, Badan Karantina Deptan, telah menandatangani nota kesepahaman dengan Cina. Isinya soal pengaturan karantina buah yang masuk ke Indonesia. "Sudah ditandatangani beberapa minggu lalu," ujar Mentan.

Hal itu dibuktikan oleh beberapa kondisi. Pertama, peredaran buah impor yang tidak ada batasan. Padahal, menurut ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), kuota buah impor harus di bawah lima persen. "Sekarang tidak ada kuota," ujarnya. Kedua, biaya masuk buah impor yang masih rendah, yakni dibawah 5

persen. Ketiga, tidak ada pengawasan terhadap kesegaran buah, masa simpan, penampilan fisik, dan kandungan residu kimia. Keempat, belum ada standar dan prosedur pemeriksaan buah impor.

Selain itu, masih tingginya bunga pinjaman dan biaya produksi, daya beli masyarakat yang rendah, serta kurangnya dukungan pemerintah menjadikan usaha buah sulit berkembang.

139 *Presiden . Flu Burung Jangan Dilihat Berlebihan*

Mayoritas pasien flu burung telah membaik kondisinya. Menteri Pertanian, Anton Apriyantono, menegaskan kasus flu burung di Indonesia belum endemik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun meminta agar negara lain bisa memahami langkah serius penanganan flu burung yang sedang ditempuh Indonesia.

Badan Kesehatan Dunia (WTO), meminta masyarakat Indonesia tak panik menanggapi kasus flu burung ini. Mentan menjelaskan suatu wabah dikatakan endemik kalau sudah terjadi beberapa kasus serupa didaerah tertentu. Sejauh ini, 17 pasien yang diduga terinfeksi flu burung yang dirawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Sunter, Jakarta Utara, membaik.

Sebelumnya, para pasien, itu menderita gejala seperti demam, suhu badan diatas 38 derajat celcius, sesak napas akibat adanya infeksi paru-paru, dan batuk.

Setelah menjalani perawatan, demam yang diderita ke-17 pasien menurun. Suhu badan mereka rata-rata menjadi 37,6 derajat celcius.

Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyatakan, hingga 23 September 2005 terdapat 28 kasus flu burung di Indonesia. Dari jumlah itu, enam di antaranya berstatus *confirmed* alias positif flu burung tipe H5NI. Sebanyak 22 pasien lainnya berstatus *suspect*. Sebagian besar dirawat di RSPI Sulianti Saroso. Jumlah itu belum termasuk seorang warga yang berdomisili di luar Jawa dan diketahui positif H5NI.

Secara nasional, menurut Menkes, daerah yang terjangkit flu burung adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur.

140 *Serah Terima Jabatan Eselon II Lingkup Badan Karantina Pertanian*

Bertempat di ruang rapat lantai I Badan Karantina Pertanian pada tanggal 23 September 2005 telah dilaksanakan serah terima jabatan eselon II lingkup Badan Karantina Pertanian. Adapun pejabat lama yang melaksanakan serah terima adalah : Ir. Zulfar Zubir kepada Ir. Hari Priyono, M.Si selaku Sekretaris Badan Karantina Pertanian yang baru, Drh. Mukhtar A Baraniah kepada Drh. Kisman A Rasyid MM selaku Pj Kepala Pusat Karantina Hewan, Ir. Amir Hamzah kepada Kepala Badan Karantina Pertanian. Sedangkan Kepala Pusat Karantina Tumbuhan Ir. Arfany Bastony tidak melaksanakan serah

terima jabatan karena Kepala Pusat Karantina Tumbuhan masih dijabat oleh yang bersangkutan. Selanjutnya Pj Kepala Pusat Informasi dan Keamanan Hayati adalah Suharto, SH, MA.

Pada sambutannya Kepala Badan Pertanian Ir. Syukur Iwantoro MS, MBA telah memberikan pesan kepada para pejabat yang baru antara lain :

1. Blue print mengenai SDM telah tersedia. Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada Sekretaris Badan Karantina Pertanian untuk segera memenuhi kebutuhan baik kuantitas maupun kualitas.
2. Pengembangan Information Technology (IT) diharapkan pada tahun 2007. Landasan pengembangan IT sudah dirintis oleh Pusat TMKH dan KT melalui EDI.
3. Jabatan Eselon III dan IV segera di proses Baperjakatnya dan diharapkan sudah dilantik sebelum bulan Ramadhan sehingga bulan ramadhan Badan Karantina Pertanian memasuki era baru.
4. Evaluasi hasil pekerjaan akan dilakukan setiap 6 bulan sekali sehingga para pejabat yang baru dilantik diharapkan tidak "berbulan madu" karena harus segera melakukan tugas.

141 Workshop Operasional Notification Body Enquiry Point SPS- WTO

Bertempat di kota hujan Bogor tanggal 12-13 September 2005 badan karantina Pertanian menyelenggarakan Workshop Operasional Notification Body Enquiry Point SPS-WTO, workshop dihadiri kepala

Badan Karantina Pertanian, Sesban karantina Pertanian, Kapus KT, Kapus TM, PSA, Biro KLN, PUSKARI, Badan POM, PHKA Dephut, Deperinddag, ASKINDO, APPINDO, BSN, UPT, BBKH, BBKI Soekarno hatta, BBKT Tj. Priok, BBKH, BBKT Tj. Perak, Fungsional POPT dan Fungsional Medik Veteriner Badan Karantina Pertanian.

Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian No.170/KPTS/OT.210/3/2002 Pasal 16, Pusat Standarisasi dan Akreditasi Departemen Pertanian sebagai Notification Body (single Central Government Otority) untuk melakukan Notifikasi peraturan SPS di Indonesia dan Badan karantina Pertanian sebagai Enquiry Point untuk peraturan SPS. SPS berlaku sejak berdirinya organisasi perdagangan dunia (WTO) pada tanggal 1 januari 1995. Isi perjanjian SPS difokuskan pada peraturan keamanan pangan, kesehatan hewan dan tumbuhan yang bertujuan untuk perlindungan manusia, setiap negara anggota WTO harus mematuhi prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, Indonesia masuk Enquiry Point Tahun 1974 sedangkan Notifikasi baru 24 kali.

Kepala badan karantina Pertanian Syukur Iwantoro dalam sambutannya mengatakan Perjanjian Penerapan Ketentuan Sanitary dan Phytosanitary merupakan pedoman bagi negara anggota WTO untuk melindungi kesehatan hewan, tumbuhan dan manusia dari resiko hama dan penyakit. badan karantina Pertanian telah memanfaatkan kebijaksanaan Notification Body Enquiry Point di Karantina Tumbuhan melalui persyaratan ISPM#15, yaitu, semua produk yang dikemas menggunakan kayu wajib diberlakukan fumigasi ketentuan ini akan diterapkan karantina tahun 2006. Workshop ini diharapkan dapat merumuskan mekanisme terbaik dalam pelaksanaan transparansi

Newsletter



tentang ketentuan SPS, sehingga kepada pihak yang berkepentingan dapat memahami persyaratan dan prosedur pelaksanaan SPS di negara lain (negara tujuan ekspor).

142 *Pertemuan Komisi Nasional Karantina Hewan (KNKH)*

Bertempat di ruang rapat Gd. E Lt. I Departemen Pertanian tanggal 14 September 2005 Kepala Badan Karantina Pertanian Syukur Iwantoro membuka rapat Komisi Nasional Karantina Hewan (KNKH), pertemuan ini merupakan tukar menukar informasi serta masukan-masukan dari anggota KNKH. Pertemuan dihadiri kabit Hewan Hidup Karantina Hewan, Kabit Teknik dan Metode Karantina hewan serta Anggota KNKH Prof. Dr. Drh. Fachriyan Hasmi Pasaribu, Prof. Drh. Dondin Sayuti, PhD, Prof. Drh. Martin Malole, Dr. Drh. Bambang Sumiarto, SU, Msc, Drh. Abadi Sutisna, MSi, Dr. Drh. C.A. Nidom.

Dari hasil pertemuan tersebut telah disimpulkan point-point :

1. Karantina bukan sekedar sebagai benteng terdepan saja, melainkan safe guard negara RI ;
2. KNKH bagian integral dari BARANTAN dan merupakan supervisor Kepala Badan dalam hal penguatan dan pengembangan karantina hewan sehingga semua kebijakan prosesnya melibatkan KNKH;
3. KNKH sebagai pendamping Kepala Badan Karantina Pertanian diharapkan dapat memback -up dan mengkritik BARANTAN agar dapat menjadi lembaga

yang kuat dan kredibel di kancah Internasional Regional maupun Nasional;

4. KNKH dapat mengadakan pertemuan tanpa harus hadir Kepala Badan Karantina Pertanian, tapi hasil kesepakatan komisi harus dilaporkan;
5. Komisi-komisi yang ada di Deptan bila sidang-sidang Internasional di luar negeri BARANTAN dan KNKH akan mengirimkan utusannya;
6. KNKH diharapkan dapat membuat konsep karantina pulau, merencanakan Continuing Education dan In-House, Training petugas karantina hewan, diharapkan dapat memberikan masukan pada draft SK Mentan tentang Pelarangan Pemasukan, Pengeluaran dan Transit Media Pembawa Hama penyakit Hewan;
7. Mengadakan rapat/pertemuan koordinasi antar lembaga Deptan/Dephut/LIPI/Depkes dalam sosialisasi masalah dan fungsi karantina pertemuan rutin KNKH diharapkan satu kali sebulan;
8. BARANTAN akan menyampaikan Blue-print Recruitment dan pengembangan SDM Karantina kepada KNKH dan akan menerapkan Reward dan Punishment System;
9. Semua kegiatan KNKH pendanaannya akan ditanggung oleh BARANTAN, Sekretariat KNKH berada di Gd E Lt.I.

Hasil dari pertemuan tersebut secara aklamasi terpilih sebagai ketua koordinator Prof. Dr. Drh. Fachriyan Hasmi Pasaribu, Sekretaris Drh. Hadi Wardoko, MM.

143 *DPR Setuju Harga Gabah Petani Naik*

Komisi Pertanian DPR setuju harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah petani dinaikkan. persetujuan ini adalah keputusan rapat komisi itu dengan Menteri Pertanian, Perum Bulog, dan badan Pusat Statistik kemarin di Jakarta.

Menurut Mentan Anton Apriyantono, alasan kenaikan HPP gabah petani itu untuk menyesuaikan kenaikan harga BBM. HPP gabah kering panen berdasarkan instruksi presiden itu Rp 1.330 per kilogram. Bila harga BBM naik 50 persen, harga gabah petani itu akan dinaikkan menjadi Rp 1.530 per kilogram.

Meski naik, Anton menilai, Perum Bulog masih bisa menambah stoknya dengan membeli gabah petani. "Bulog tidak perlu mengimpor beras," ujarnya. komisi pertanian DPR juga belum memutuskan sikapnya atas rencana pemerintah mengimpor sekitar 250 ribu ton beras melalui Bulog.

Sedangkan Deptan kata Anton, hanya menghitung konsumsi langsung. Sehingga jumlah konsumsi beras lebih kecil, yakni 115,48 kilogram per kapita per tahun. Perbedaan ini juga ditambah kenyataan bahwa BPS tidak mempunyai data jumlah stok beras sisa 2004. Sehingga perhitungan BPS itu tidak memasukan komponen stok beras ini. Padahal Indonesia masih memiliki sisa stok tahun lalu sebesar 1,7 juta ton.

144 *Pemerintah Akan naikkan Harga Beli gabah*

Mentan Anton Apriyantono mengatakan pemerintah segera menaikkan harga gabah melalui pembelian pemerintah (HPP). Rencana kenaikan ini untuk mengimbangi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak.

"Kita telah menghitung untuk harga gabah kering panen naik dari Rp 1.330/kg menjadi Rp 1.500/kg, sedangkan gabah kering giling masih diperhitungkan nilai kenaikannya dari ketentuan saat ini sebesar rp 1.740 per kg," ujar Anton.

Mentan mengharapkan kenaikan HPP gabah tersebut bisa dipercepat sebelum harga BBM mengalami kenaikan. "Kenaikan HPP tersebut sangat dimungkinkan, sehingga nantinya tidak ada kesenjangan yang jauh dengan kenaikan harga BBM.

145 *Simpan Saja Beras Impor Di LN*

Mentan Anton Apriyantono meminta Bulog tetap menempatkan beras yang rencananya diimpor di luar negeri jika harga beras kelas II atau medium di pasar dalam negeri tidak melebihi Rp 3.500/kg.

Impor hanya bisa dilakukan jika harga beras di pasaran berada di atas Rp 3.500/kg serta cadangan beras di gudang Bulog kurang dari 2 juta ton. "Saat ini memang cadangan beras diBulog 1,6 juta ton namun harga beras yang akan diimpor itu bisa disimpan di luar negeri dulu," kata Anton.

Pemerintah juga terkesan tidak konsisten dalam mengambil kebijakan soal impor beras tersebut. "Pemerintah pernah menyatakan impor beras ditutup hingga Desember 2005, tetapi ternyata hal itu diubah.

"Pemerintah tetap konsisten dengan kebijakan yang diterapkan selama ini, yakni impor beras oleh pemerintah tidak dilakukan bila kondisi tertentu masih terpenuhi, yaitu harga beras kelas menengah ditingkat eceran rata-rata di Indonesia tidak lebih Rp 3.500 per kg dan stok Bulog diatas satu juta ton.

walaupun memang disadari beban industri produsen pupuk cukup berat dengan berbagai kendala yang dihadapi.

Beban yang ditanggung petani sudah cukup berat sehingga kami tidak berencana menaikkan harga pupuk untuk petani dalam waktu dekat ujar Mentan.

Anton mengatakan walaupun ada kenaikan, hal tersebut baru dapat dilakukan pada tahun depan dan kenaikan tersebut juga tidak terlalu besar, yakni 10%.

Kalaupun pemerintah jadi menaikkan harga pupuk untuk petani, kata Mentan, sebelumnya harus dihitung produksi riil pupuk nasional dan dihitung besaran subsidi, sehingga bisa di tetapkan besaran kenaikan berapa persen.

Apabila pemerintah tidak segera bertindak, pada tahun 2006 kondisi pupuk nasional akan semakin terpuruk. hal ini sudah nyata terjadi dengan dilikuidasinya PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF), tidak jelasny pasokan gas untuk PT pupuk Iskandar Muda (PIM), PT Pupuk Kujang dan PT Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim).

146 *Mentan Putuskan Harga Pupuk Tetap*

Mentan menolak keinginan produsen pupuk nasional untuk menaikkan harga bagi petani. hal itu dilakukan karena tingginya gas bumi dan kecenderungan turunnya harga ekspor.

Menurut Anton, kini waktunya kurang tepat seandainya pemerintah harus menaikkan harga pupuk

